

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Muara Enim telah memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), selanjutnya pada Pasal 70 Ayat (3) menyatakan LPPD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintahan Pusat.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, dalam mewujudkan Muara Enim yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Enim, 31 Maret 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	15
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	41
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	45
2.1 Capaian Kinerja Makro	45
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	46
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	46
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	57
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	60
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	290
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Muara Enim	291
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Muara Enim	291
3.2.1 Target Kinerja	291
3.2.2 Realisasi	291
3.3 Permasalahan dan Kendala	294
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	295
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	296
BAB V PENUTUP	359

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang. Desain pengaturan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Muara Enim dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956.

b. Data Geografis Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038, Pasal 3 Ayat (1) bahwa Wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki luas wilayah lebih kurang 7.383,90 km², terbagi menjadi 22

kecamatan, terdiri dari 246 desa definitif dan 10 kelurahan dengan ibu kota Kabupaten terletak di Kecamatan Muara Enim.

Jarak terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim ke Ibu Kota Kecamatan adalah Kecamatan Kelekar yaitu sejauh 250 km, diikuti Kecamatan Muara Belida sejauh 168 km, Kecamatan Sungai Rotan sejauh 150 km, dan Kecamatan Gelumbang sejauh 149 km. Sementara Kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Ujan Mas. Jika dilihat dari jumlah desa / kelurahan, maka jumlah desa / kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Gelumbang sebanyak 23 Desa/Kelurahan, dengan itu Kecamatan Gelumbang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan Kecamatan Benakat adalah kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan paling sedikit yaitu 6 desa.

Kabupaten Muara Enim digolongkan sebagai daerah dataran rendah dan lebih dari 60% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut dan selebihnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan laut dan tersebar di lima kecamatan yaitu Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Tanjung Agung dan Lubai Ulu.

Dari total luas wilayah Kabupaten Muara Enim, 23.407,2 Ha merupakan Lahan Sawah, 564.971,8 Ha merupakan Lahan Bukan Sawah dan 237.164 Ha Lahan Bukan Sawah merupakan Lahan Perkebunan. Kabupaten Muara Enim, secara geografis terletak pada posisi antara 3^o 0' 40'' sampai 4^o 22' 39'' Lintang Selatan dan 103^o 18' 57'' sampai 104^o 40' 37'' Bujur Timur, dengan batas administrasi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.

Kondisi topografi daerah cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada dibagian tengah. Terus ke utara–timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Lembak, Gelumbang, dan Sungai Rotan.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim sebanyak **667.083** jiwa. Data penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)
Semende Darat Laut	16.256
Semende Darat Ulu	19.425
Semende Darat Tengah	11.828
Tanjung Agung	30.981
Lawang Kidul	79.550
Muara Enim	84.879
Ujan Mas	27.648
Gunung Megang	36.924
Belimbing	27.533
Benakat	11.079
Rambang Niru	36.383
Rambang	29.675
Lubai	28.622
Lubai Ulu	36.121
Sungai Rotan	34.655
Lembak	20.367
Belida Darat	13.844
Kelekar	12.113
Muara Belida	8.559
Gelumbang	66.224
Panang Enim	13.492
Empat Petulai Dangku	20.925
Jumlah	667.083

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim Tahun 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 Kecamatan dengan total sebanyak 246 Desa dan 10 Kelurahan. Nama Kecamatan dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1	Tanjung Agung	1. Embawang 2. Pagar Dewa 3. Tanjung Bulan 4. Lesung Batu 5. Pandan Enim 6. Paduraksa 7. Matas 8. Tanjung Agung 9. Muara Emil 10. Tanjung Karang 11. Seleman 12. Penyandingan 13. Tanjung Lalang 14. Pulau Panggung
2	Muara Enim	1. Tanjung Raja 2. Karang Raja 3. Muara Lawai 4. Tanjung Jati 5. Lubuk Empelas 6. Kel. Tungkal 7. Kel. Pasar II 8. Kel. Pasar III 9. Kel. Pasar I 10. Kel. Muara Enim 11. Kepur 12. Tanjung Serian 13. Muara Harapan 14. Saka Jaya 15. Harapan Jaya 16. Kel. Air Lintang

3	Rambang Niru	1. Gemawang 2. Lubuk Raman 3. Jemenang 4. Tanjung Menang 5. Tebat Agung 6. Gerinam 7. Suban Jeriji 8. Air Limau 9. Muara Emburung 10. Manunggal Jaya 11. Air Talas 12. Air Enau 13. Manunggal Makmur 14. Aur Duri 15. Kasih Dewa 16. Air Cekdam
4	Gunung Megang	1. Penanggiran 2. Gunung Megang Luar 3. Gunung Megang Dalam 4. Lubuk Mumpo 5. Perjito 6. Tanjung Muning 7. Tanjung Terang 8. Bangun Sari 9. Sumaja Makmur 10. Sidomulyo 11. Pajar Indah 12. Kayu Ara Sakti 13. Panang Jaya
5	Gelumbang	1. Gaung Telang 2. Pinang Banjar 3. Segayam 4. Tambangan Kelekar 5. Suka Menang 6. Karang Endah 7. Jambu 8. Midar 9. Mililian 10. Pedataran 11. Teluk Limau 12. Kerta Mulya 13. Sebau 14. Sigam 15. Payabakal 16. Bitis 17. Gumai 18. Putak 19. Talang Taling 20. Suka Jaya 21. Karang Endah Selatan 22. Betung 23. Kel. Gelumbang

6	Lawang Kidul	1. Kel. Tanjung Enim 2. Kel. Pasar Tanjung Enim 3. Kel. Tanjung Enim Selatan 4. Tegal Rejo 5. Lingga 6. Keban Agung 7. Darmo
7	Semende Darat Laut	1. Penindaian 2. Babatan 3. Muara Dua 4. Muara Danau 5. Penyandingan 6. Tanah Abang 7. Pagar Agung 8. Pulau Panggung 9. Karya Nyata 10. Perapau
8	Semende Darat Tengah	1. Tenam Bungkok 2. Kota Padang 3. Gunung Agung 4. Sri Tanjung 5. Tebing Abang 6. Batu Surau 7. Tanjung Raya 8. Muara Tenang 9. Rekimai Jaya 10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa
9	Semende Darat Ulu	1. Tanjung Tiga 2. Cahaya Alam 3. Datar Lebar 4. Segamit 5. Siring Agung 6. Aremantai 7. Tanjung Agung 8. Pajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak
10	Ujan Mas	1. Pinang Belarik 2. Ujan Mas Lama 3. Ujan Mas Baru 4. Tanjung Raman 5. Muara Gula Baru 6. Muara Gula Lama 7. Guci 8. Ulak Bandung 9. Ujan Mas Ulu

11	Lubai	1. Aur 2. Beringin 3. Kota Baru 4. Pagar Gunung 5. Gunung Raja 6. Tanjung Kemala 7. Suka Merindu 8. Jiwa Baru 9. Air Asam 10. Menanti
12	Rambang	1. Baru Rambang 2. Sugihan 3. Tanjung Raya 4. Tanjung Dalam 5. Sukarami 6. Pagar Agung 7. Sugih Waras 8. Sumber Rahayu 9. Marga Mulya 10. Kencana Mulia 11. Negeri Agung 12. Sugihwaras Barat 13. Air Keruh
13	Sungai Rotan	1. Tanjung Miring 2. Danau Tampang 3. Kasai 4. Sungai Rotan 5. Sukamerindu 6. Tanding Marga 7. Muara Lematang 8. Sukadana 9. Modong 10. Sukacinta 11. Penandingan 12. Danau Rata 13. Paya Angus 14. Sukarami 15. Petar Dalam 16. Sukajadi 17. Sukamaju 18. Danau Baru 19. Petar Luar
14	Lembak	1. Petanang 2. Talang Nangka 3. Alai 4. Sungai Duren 5. Tapus 6. Lembak 7. Kemang 8. Lubuk Enau 9. Alai Selatan 10. Tanjung Baru

15	Benakat	1. Padang Bindu 2. Betung 3. Pagar Dewa 4. Pagar Jati 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai
16	Kelekar	1. Embacang Kelekar 2. Menanti 3. Menanti Selatan 4. Suban Baru 5. Pelempang 6. Teluk Jaya 7. Tanjung Medang
17	Muara Belida	1. Gedung Buruk 2. Arisan Musi 3. Harapan Mulia 4. Mulia Abadi 5. Arisan Musi Timur 6. Patra Tani 7. Tanjung Baru 8. Kayu Ara Batu
18	Belimbing	1. Simpang Tanjung 2. Cinta Kasih 3. Teluk Lubuk 4. Berugo 5. Belimbing 6. Bulang 7. Belimbing Jaya 8. Darmo Kasih 9. Dalam
19	Belida Darat	1. Tanjung Bunut 2. Babat 3. Lubuk Semantung 4. Lubuk Getam 5. Talang Balai 6. Talang Beliung 7. Sialingan 8. Tanjung Tiga 9. Ibul 10. Gaung Asam
20	Lubai Ulu	1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa 7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur

21	Empat Petulai Dangku	1. Muara Niru 2. Kahuripan Baru 3. Pangkalan Babat 4. Gunung Raja 5. Banuayu 6. Kuripan 7. Kuripan Selatan 8. Batu Raja 9. Dangku 10. Siku
22	Panang Enim	1. Lebak Budi 2. Lambur 3. Pagar Jati 4. Tanjung Baru 5. Sukaraja 6. Pandan Dulang 7. Muara Meo 8. Sugih Waras 9. Indramayu 10. Bedegung 11. Padang Bindu 12. Lubuk Nipis

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 berjumlah 58 OPD dengan uraian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Muara Enim memiliki susunan perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai (PNS dan PPPK)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1407
2.	Dinas Kesehatan	416
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111
4.	Dinas PERKIM	83
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	293
6.	DAMKAR	172
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50
8.	Dinas Sosial	51
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72
10.	Dinas Ketahanan Pangan	55
11.	Dinas PPPA	58

12.	Dinas Lingkungan Hidup	270
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63
15.	Dinas Perhubungan	92
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	47
17.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	78
18.	Dinas Koperasi dan UKM	55
19.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	66
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	95
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64
22.	Dinas Perikanan	74
23.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	57
24.	Dinas TPHP	332
25.	Dinas Perkebunan	78
26.	Dinas Perindag serta ESDM	146
27.	Sekretariat Daerah	247
28.	Sekretariat DPRD	88
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67
30.	BPKAD	85
31.	Badan Pendapatan Daerah	178
32.	BKPSDM	64
33.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	39
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40
35.	Inspektorat	80
36.	RSUD DR.H.M. Rabain	129
37.	Kecamatan Semende Darat Ulu	35
38.	Kecamatan Semende Darat Tengah	28
39.	Kecamatan Semende Darat Laut	30
40.	Kecamatan Tanjung Agung	32
41.	Kecamatan Lawang Kidul	33
42.	Kecamatan Muara Enim	33
43.	Kecamatan Ujan Mas	33
44.	Kecamatan Benakat	33
45.	Kecamatan Gunung Megang	34
46.	Kecamatan Rambang Niru	35
47.	Kecamatan Lubai	31
48.	Kecamatan Rambang	38
49.	Kecamatan Lembak	37
50.	Kecamatan Kelekar	33
51.	Kecamatan Gelumbang	35
52.	Kecamatan Sungai Rotan	33
53.	Kecamatan Muara Belida	32
54.	Kecamatan Belimbing	34
55.	Kecamatan Belida Darat	38
56.	Kecamatan Lubai Ulu	29
57.	Kecamatan Empat Petulai Dangku	27
58.	Kecamatan Panang Enim	31

Sumber : BKPSDM Kab. Muara Enim Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 439.188.803.647,03 dengan Realisasi sebesar Rp. 449.369.599.734,06 atau terealisasi sebesar 102,31%. Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.149.738.479.203,03 dengan total realisasi sebesar Rp. 3.956.202.807.557,90 atau terealisasi sebesar 95,33%. Anggaran Belanja dengan total sebesar Rp. 4.781.820.110.969,03 dan realisasi Belanja sebesar Rp. 4.281.718.954.767,00 atau terealisasi sebesar 89,54%. (Unaudited).

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Muara Enim 2025
(Unaudited)

KODE	URAIAN	2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
4. PENDAPATAN				
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	195.567.613.344,00	194.665.442.709,58	99,53
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	186.323.243.953,00	173.275.335.331,76	92,99
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	26.552.719.027,07	26.552.719.027,07	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.745.227.322,96	54.876.102.665,65	178,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH		439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31
4.2. PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.384.409.910.660,00	3.178.794.712.284,00	93,32
4.2.2	Transfer Antar Daerah	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56

KODE	URAIAN	2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
PENDAPATAN TRANSFER		3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02
4.3.2	Pendapatan lainnya	4.146.225.344,00	6.766.237.573,08	163,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97
JUMLAH PENDAPATAN		4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33
5.1. BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai	1.413.990.292.944,69	1.228.547.741.022,42	86,88
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.170.205.111.116,48	1.047.806.287.421,44	89,54
5.1.3	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,92
5.1.4	Subsidi	1.206.750.000,00	449.328.000,00	37,23
5.1.5	Hibah	79.919.408.400,00	75.397.682.999,00	94,34
5.1.6	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
BELANJA OPERASI		2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23
5.2. BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Modal Tanah	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.352.258.207,17	312.210.171.967,00	93,37
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.727.427.152,00	298.572.404.158,98	86,61
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	782.372.452.613,69	721.758.065.918,32	92,25
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.997.009.365,00	12.982.234.349,00	99,88

KODE	URAIAN	2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.050.000.000,00	1.461.855.900,00	71,31
BELANJA MODAL		1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06
BELANJA TIDAK TERDUGA		5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06
5.4. BELANJA TRANSFER				
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	38.193.085.729,00	38.181.085.729,00	99,96
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,63
BELANJA TRANSFER		566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72
JUMLAH BELANJA		4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54
SURPLUS/(DEFISIT)		(632.081.631.766,00)	(325.516.147.209,10)	51,49
6. PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03

6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	99,99
PEMBIAYAAN NETTO		632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		308.755.484.560,27		
TOTAL APBD		4.281.718.954.767,00		

Sumber : BPKAD Kab. Muara Enim Tahun 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Muara Enim dinilai dari permasalahan yang terjadi pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Periode RPJPD tersebut, serta berpedoman dengan arah kebijakan tahap I (tahun 2005-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 Kabupaten Muara Enim yaitu “Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Terutama Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan”. Perumusan masalah juga dilakukan dari hasil pendekatan secara teknokratik dan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen-komponen atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terdapat masalah pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Muara Enim, berikut ini disajikan masalah pokok, masalah dan akar masalah:

1) Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, salah satunya dapat diukur dari persentase capaian penurunan angka kemiskinan. Berkurangnya penduduk miskin, mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sebaliknya peningkatan persentase masyarakat miskin mengindikasikan penurunan kemampuan ekonomi penduduk.

Persentase kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 sebesar 9,79 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 9,45 persen. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk melalui berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Berikut ini masalah dan akar masalahnya

a. Pendapatan rendah dan biaya hidup tinggi pada kelompok miskin

Akar masalah rendahnya pendapatan serta tingginya pengeluaran pada kelompok penduduk miskin yaitu:

- Mayoritas penduduk bekerja pada sektor informal
- Keterbatasan dalam mengakses Keuangan dan Kredit Mikro
- Belum optimalnya cakupan peserta KB aktif

b. Tingkat pengangguran masyarakat masih tinggi

Akar masalah tingkat pengangguran masyarakat masih tinggi yaitu:

- Tingkat pendidikan penduduk/pencari kerja mayoritas berpendidikan dasar dan menengah
- Rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil
- Belum optimalnya kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) daerah
- Belum adanya sinergitas antara pemerintah dan swasta terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal

c. Belum Optimalnya Jaminan Sosial

Belum optimalnya cakupan jaminan sosial memiliki akar masalah:

- Bantuan sosial masih ada yang tidak tepat sasaran
- Penduduk yang mayoritas bekerja di sektor informal tidak dicover asuransi atau jaminan ketenagakerjaan
- Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

d. Infrastruktur Dasar Tidak Merata

Tidak meratanya infrastruktur dasar disebabkan karena:

- Masih banyak penduduk miskin yang mendiami rumah tidak layak huni
- Masih banyak penduduk miskin yang mendiami hunian dengan air minum dan sanitasi tidak layak

e. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Berbasis Data Belum Optimal

Tata kelola menjadi salah satu penyebab sulitnya upaya penanggulangan kemiskinan, akar permasalahannya yaitu:

- Masih ada *inclusion* dan *exclusion error* dalam pengelolaan data kemiskinan
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan belum berjalan efektif
- Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat belum berjalan sinergis

2) Kualitas Pendidikan Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim masih masuk dalam kategori sedang pada tahun 2025. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Muara Enim masih belum optimal. Belum optimalnya pembangunan manusia disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi pendidikan relatif masih rendah
 - Masih banyaknya anak usia sekolah menjadi tulang punggung keluarga
 - Mahalnya biaya operasional penunjang sekolah
- b. Pendidikan belum berfokus pada kualitas dan daya saing.

Pendidikan masih berfokus pada partisipasi dan akses, permasalahan rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan disebabkan oleh:

- Persentase sekolah terakreditasi minimal B relatif rendah
 - Persentase guru bersertifikat pendidik masih rendah pada jenjang tertentu
 - Masih ada *missmatch* antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja
 - Tingkat literasi dan numerasi rendah
- c. Akses terhadap fasilitas dan SDM pendidikan belum merata,
 - Masih belum optimalnya fasilitas penunjang pendidikan
 - Belum meratanya tenaga pendidik yang dibutuhkan di setiap tingkatan pendidikan

3) Tingkat Kesehatan Masyarakat Mengalami Penurunan

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar (*Primary Health Care*) belum optimal
 - Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal tercermin dari: Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk
 - Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak belum optimal tercermin dari: Meningkatnya angka kematian Neonatal, Bayi dan balita serta kematian ibu
 - Gizi Ibu dan Anak belum terpenuhi secara optimal, tercermin dari: Rendahnya pemberian ASI Eksklusif untuk bayi 6 bulan, Angka *Stunting*, malnutrisi masih cukup tinggi

b. Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal

- Belum meratanya tenaga kesehatan yang dibutuhkan di setiap tingkat fasilitas kesehatan
- Belum maksimalnya sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan
- Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan belum berjalan

4) Terjadinya Degradasi Kualitas Lingkungan dan Tingginya Risiko Bencana

Degradasi lingkungan merupakan ancaman nyata yang terus memburuk akibat aktivitas manusia yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan, terutama dalam sektor energi. Salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan terhadap *brown energy*, yakni sumber energi berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan *brown energy* tidak hanya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, tetapi juga mempercepat krisis iklim, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap kesehatan publik. Di banyak wilayah, termasuk daerah penghasil energi fosil, degradasi lingkungan telah menciptakan paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan ekologis yang sistemik. Konsep *brown energy* sejatinya mewakili model pembangunan lama yang berbasis ekstraksi dan konsumsi besar-besaran, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim yang sangat bergantung pada sektor *brown energy* berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Berikut ini masalah yang dihadapi:

a. Kerentanan terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim

- Menurunnya kualitas air akibat kegiatan pertambangan dan penggalian
- Menurunnya kualitas tutupan lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan
- Indeks Risiko Bencana masuk dalam kategori kerentanan tinggi
- Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana
- Masih terdapatnya daerah dengan kerentanan pangan

- Belum meratanya ketersediaan dan distribusi pangan antar waktu dan wilayah

b. Tata Kelola Lingkungan yang Lemah

- Penegakan regulasi lingkungan yang kurang efektif
- Masih kurangnya instrumen perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

Selain itu Indeks Risiko Bencana Kabupaten Muara Enim meskipun menunjukkan trend positif namun masih masuk dalam kategori tinggi, sehingga masih menjadi perhatian seiring menurunnya kualitas lingkungan.

5) Pengarusutamaan Gender Belum Optimal

Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan mencerminkan ketimpangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun agenda pengarusutamaan gender telah lama diaruskan dalam kebijakan nasional dan daerah. Di banyak sektor strategis, keterlibatan perempuan masih terbatas, baik dalam pengambilan keputusan politik, kepemimpinan birokrasi, hingga akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat potensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan ini kerap diperparah oleh norma budaya patriarkal, lemahnya kebijakan afirmatif, serta minimnya indikator kinerja yang sensitif gender dalam perencanaan pembangunan.

a. Rendahnya peran serta perempuan dalam ekonomi dan politik

Perempuan tidak memiliki keterampilan teknis yang mumpuni dan pendidikan yang cukup untuk dapat bersaing di dunia kerja dan politik, tercemin dari cukup rendahnya Indek Pemberdayaan Gender, Timbangnya TPAK perempuan terhadap laki-laki.

b. Cukup tingginya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

- Kesenjangan Partisipasi Ekonomi dan Kesempatan Kerja karena Stereotip gender yang menganggap perempuan bertanggung jawab pada pekerjaan domestik
- Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

- Tingginya Angka Kematian Ibu dan Kesehatan Reproduksi yang buruk
- Belum optimalnya pemenuhan hak anak
- Perempuan banyak yang menjadi korban dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya.

6) Belum Optimalnya Penyediaan Fasilitas Publik yang Berkualitas

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, peningkatan kualitas layanan publik harus diposisikan sebagai agenda prioritas. Ini mencakup reformasi birokrasi yang berbasis merit, digitalisasi pelayanan untuk efisiensi dan transparansi, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan. Pembangunan tidak akan inklusif dan berkelanjutan jika masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas layanan publik bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi merupakan fondasi dari kepercayaan publik terhadap pemerintah dan legitimasi kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

a. Konektivitas dan Aksesibilitas yang belum Merata

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan transportasi sampai ke perdesaan
- Belum adanya jalur khusus pengangkutan hasil penambangan batubara
- Masih kurangnya fasilitas prasarana perhubungan
- Jaringan telekomunikasi yang kuat belum seluruhnya menyentuh daerah

b. Belum terciptanya kawasan hunian yang berkualitas

- Terbatasnya cakupan layanan persampahan
- Belum optimalnya penanganan banjir
- Masih adanya kawasan kumuh
- Masih kurangnya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- Masih tingginya *backlog* perumahan

7) Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Maksimal

Belum optimalnya reformasi birokrasi menjadi salah satu hambatan mendasar dalam akselerasi pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Meski berbagai kebijakan reformasi telah digulirkan, seperti penerapan sistem merit, digitalisasi layanan, dan penilaian kinerja melalui SAKIP maupun RB, namun pada praktiknya banyak daerah masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Birokrasi masih cenderung terjebak dalam pola kerja yang administratif, kaku, dan hierarkis, serta belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*result-based*). Fenomena inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, rendahnya inovasi layanan, hingga budaya kerja yang resistif terhadap perubahan menjadi indikator nyata bahwa reformasi belum berjalan secara sistemik dan mendalam.

a. Tata Laksana belum berjalan optimal

- Indeks SPBE masih stagnan
- Masih rendahnya pengelolaan arsip baku di perangkat daerah
- Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah

b. Masih Rendahnya Profesionalisme Aparatur (IP ASN)

- Masih optimalnya upaya daam meningkatkan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan baik melalui pendidikan maupun pelatihan
- Pengukuran kinerja dan penegakan disiplin belum berjalan optimal
- Masih kurangnya ketersediaan SDM pada bagian-bagian tertentu

c. Pengawasan dan Akuntabilitas Belum Berjalan Optimal

- Tingkat kapabilitas APIP belum mencapai level 3
- Penerapan manajemen resiko pada perangkat daerah belum memadai
- Indeks efektivitas pengendalian korupsi yang masih rendah
- Nilai SAKIP menunjukan stagnasi dan masih berada pada kategori BB

d. Tingkat Ketergantungan Keuangan Kepada Pemerintah Pusat Masih Tinggi

- Belum optimalnya pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan daerah masih bergantung dari dana transfer pusat (Bagi Hasil - bersumber dari SDA yang memiliki keterbatasan)

8) Kondusivitas Daerah Belum Terjaga Optimal

a. Tingginya angka kriminalitas

- Belum terbinanya Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dengan baik
- Masih kurangnya pemahaman politik di masyarakat

b. Masih Rendahnya Min Investor untuk berinvestasi

- Kurangnya event/Promosi Daerah
- Belum optimalnya kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP)

9) Kondusivitas Daerah Belum Terjaga Optimal

Ketergantungan pemerintah pada sektor *brown energy*—seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam—mengandung berbagai risiko strategis yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan membebani generasi mendatang. Pertama, secara ekonomi, ketergantungan ini menjadikan pendapatan daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga energi fosil turun drastis, pendapatan daerah dari royalti dan pajak menurun tajam, yang berdampak langsung pada anggaran pembangunan dan stabilitas fiskal. Kedua, dari sisi lingkungan, eksploitasi *brown energy* berkontribusi besar terhadap kerusakan ekosistem, degradasi lahan, pencemaran udara dan air, serta emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Hal ini tidak hanya merusak daya dukung lingkungan, tetapi juga meningkatkan biaya adaptasi dan mitigasi bencana di masa depan.

Ketiga, secara sosial-politik, ketergantungan pada energi fosil cenderung menciptakan ketimpangan wilayah dan ketidakadilan antargenerasi. Wilayah penghasil energi sering kali mengalami paradox pembangunan—kaya sumber daya tapi miskin kualitas hidup, akibat model ekstraktif yang tidak inklusif. Selain itu, ketergantungan ini memperlambat transisi menuju ekonomi hijau dan energi bersih, yang justru menjadi arah global dan komitmen nasional dalam agenda dekarbonisasi.

a. Kontribusi Industri Kerakyatan dan Industri Kecil Masih Rendah

- Masih rendahnya persentase koperasi sehat
- Belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk UMK
- Belum optimalnya pengelolaan BUMDesa
- Belum optimalnya akses permodalan UMK dan koperasi

b. Rendahnya Produktivitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan

- Pengelolaan masih menggunakan pendekatan tradisional
- Produk olahan belum bernilai tambah sehingga sulit bersaing
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi adalah pernyataan umum mengenai kondisi ideal yang diharapkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga berfungsi sebagai panduan arah pembangunan atau proyeksi kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (kejelasan arah), yang secara spesifik menanggapi permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu-isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029, yaitu:

“MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Penjelasan visi tersebut adalah:

- **Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera atau MEMBARA** adalah seluruh pemangku kepentingan yang satu tekad secara bersama mengejar ketertinggalan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.
- **BANGKIT** adalah ajakan untuk seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Muara Enim mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor.
- **SEJAHTERA** adalah masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara berimbang jasmani dan rohani, meningkat perlindungan sosial, kualitas hidup dan lingkungannya, juga mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, serta meningkatkan kemandirian fiskal untuk percepatan pembangunan daerah.
- **MAJU** adalah terus mengalami kemajuan pembangunannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, mengandalkan hilirisasi dan nilai tambah pertanian, pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata, memiliki keunggulan dan mampu berkompetisi dengan daerah lain, ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, pengembangan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya daerah.
- **BERKELANJUTAN** adalah berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjaga kelestarian lingkungan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2025-2029, akan dicapai melalui Misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing;
- b) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif;
- c) Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata;
- d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum;
- e) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan serangkaian program sesuai dengan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia		
				Usia Harapan Hidup (UHH)		
				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		
				Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		
				Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Dasar		
				Skor Kemampuan Literasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama		
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4		
				Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar		
				Skor Kemampuan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama		
				Angka Partisipasi Sekolah 5-6		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12		
				Iklim Inklusivitas Jenjang Sekolah Dasar		
				Iklim Inklusivitas Jenjang Sekolah Menengah Pertama		
				Iklim Keamanan Jenjang Sekolah Dasar		
				Iklim Keamanan Jenjang Sekolah Menengah Pertama		
				Iklim Kebhinekaan Jenjang Sekolah Menengah Pertama		
				Iklim Kebhinekaan SD		
			Meningkatnya Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) < 183 per 100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja		
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Tangguh dan Inklusif	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				Produk Domestik Regional Bruto per Kapita		
			Meningkatnya Kuantitas dan Kapasitas Wirausaha Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Kemitraan dan Akses Pasar UKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terwujudnya perikanan tangkap yang berkelanjutan, tertib, dan produktif guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya ikan	Persentase perairan umum daratan yang terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				Persentase pelaku utama/pelaku usaha perikanan tangkap yang meningkat usahanya		
			Terwujudnya usaha budi daya perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan	Persentase kawasan perikanan budidaya yang terkelola	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
				Persentase pelaku utama/pelaku usaha		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			pembudidaya, dan mendukung ketahanan pangan daerah	pembudidaya ikan yang meningkat usahanya		
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Produksi Pertanian, Peningkatan Pendapatan Petani, dan Peningkatan Kualitas Hidup Petani di Kabupaten Muara Enim	Persentase Prasarana Perkebunan Yang Sesuai Standar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian (Irigasi)		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian (Jalan Usaha Tani)		
				Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian (Embung)		
				Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian (Rumah Potong Hewan)		
			Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, serta meningkatkan pendapatan	Persentase Sarana Perkebunan Yang Sesuai Standar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			petani melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas budidaya perkebunan			
			Meningkatnya realisasi investasi sektor dan kawasan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase Informasi Industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya fasilitasi penerbitan izin usaha perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya peningkatan nilai ekspor barang	Nilai Ekspor Barang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Meningkatnya izin usaha industri yang diterbitkan	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif		Indeks Gini		
				Persentase Penduduk Miskin		
			Meningkatnya Pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		
			Tercapainya Jumlah Desa yang ditata	Persentase Fasilitas Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya peserta pelatihan yang dimagangkan di dunia usaha/kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus dan Dimagangkan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya kepatuhan perusahaan atas pemenuhan Sarana Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memiliki sarana Hubungan Industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		
Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar Yang Unggul dan Merata	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat		Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
			Tersedianya Dokumen Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase ketersediaan tanah objek landreform (TOL) yang direistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
			Meningkatnya Permukiman yang Layak	Persentase Permukiman yang Layak	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
			Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, Konektivitas, dan Kualitas Hidup di Wilayah yang Dilayani	Persentase Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang Murah, Mudah, dan Selamat	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
		Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan		Penurunan Emisi GRK Kumulatif		
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)		
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah			Indeks Risiko Bencana (IRB)		
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
				Indeks Kota Toleran		
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional,	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel			Indeks Reformasi Birokrasi		
				Nilai SAKIP		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Transparan dan Responsif	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya capaian kinerja program pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
				Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Kapabilitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
		Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		
				Indeks Pelayanan Publik		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Meningkatnya Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
			Tersedianya Tingkat Ketersediaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tahapan Pembangunan yang Tepat Waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Semende Darat Ulu

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Proses penentuan prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, yang dimana dalam penentuan prioritas pembangunan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan mencapai sasaran pembangunan, Kabupaten Muara Enim telah menentukan arah kebijakan pada tahun 2025, yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat, guna mendukung pengurangan angka kemiskinan;
2. Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar, guna mendukung konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan dasar;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya dibidang ketahanan pangan dan pertanian, serta pemerataan layanan infrastruktur dasar, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat;
2. Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;

Dari keempat Prioritas Pembangunan, dijabarkan menjadi 15 Program prioritas yang sudah dikelompokkan ke masing-masing urusan, sebagaimana tertuang didalam tabel Program Prioritas Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 berikut:

Tabel 1.6
Program Prioritas Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
1.	Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat	a) Peningkatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pengembangan hilirisasi produk; b) Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM), pariwisata dan industri kreatif; c) Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal melalui kelembagaan ekonomi desa; dan d) Pengembangan dan peningkatan investasi di daerah dengan	• Urusan Pertanian • Urusan Pangan • Urusan Kelautan dan Perikanan • Urusan Koperasi UKM • Urusan Perdagangan • Urusan Penanaman Modal • Urusan Industri • Urusan Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan

		meningkatkan pelayanan perizinan.	Desa • Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan • Dunia Usaha (CSR)
2.	Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar	a) Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, penyediaan akses layanan pendidikan, serta peningkatan mutu/kualitas pendidik dan tenaga pendidik; b) Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, penyediaan akses layanan kesehatan mencakup seluruh masyarakat serta peningkatan mutu/kualitas tenaga kesehatan; dan c) Penyediaan dan pemerataan infrastruktur publik, antara lain jaringan jalan, konektivitas perhubungan antar wilayah, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi yang layak, dan jaringan telekomunikasi.	• Urusan Pendidikan • Urusan Kesehatan • Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Perhubungan • Urusan Komunikasi dan Informatika • Dunia Usaha (CSR) • Lembaga Non Pemerintah (BAZNAS)
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	a) Pengendalian pertumbuhan penduduk; b) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat; c) Peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat; d) Peningkatan kinerja akuntabilitas dan reformasi birokrasi; dan e) Peningkatan kinerja pelayanan	• Urusan Kepemudaan dan Olahraga • Urusan Sosial • Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan • Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan • Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

		publik.	• Urusan Perpustakaan • Urusan Kearsipan • Unsur Pemerintahan Umum • Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	a) Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan; b) Peningkatan keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan c) Peningkatan efektivitas penanganan, pencegahan dan mitigasi bencana.	• Urusan Lingkungan Hidup • Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatnya secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yng diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, dalam menyusun Laporan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Peraturan Perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12); dan
15. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 52/KPTS/I/2025 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro dapat dilihat dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,10	73,77	0,92
2	Persentase Penduduk Miskin	9,79	9,45	-3,47
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,09	4,13	0,98
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,89	5,42	-7,98
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	182.110.000	197.850.000	8,64
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,309	0,258	-16,50

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data atau informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.	Pendidikan	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{9.027}{23.066} \times 100\% = 39,14\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$\frac{96.937}{111.126} \times 100\% = 87,23\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$\frac{1.163}{2.919} \times 100\% = 39,84\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	$\frac{903}{1.960} \times 100\% = 46,07\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	$\frac{1.999}{4.074} \times 100\% = 49,07\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kesehatan	Persentase Kematian Ibu	$\frac{10}{9.086} \times 100\% = 0,11\%$	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	$\frac{512}{44.949} \times 100\% = 1,14\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	$\frac{9.487}{9.917} \times 100\% = 95,66\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	$\frac{9.086}{9.917} \times 100\% = 91,62\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	$\frac{8.963}{9.815} \times 100\% = 91,32\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	$\frac{44.758}{47.083} \times 100\% = 95,06\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	$\frac{23.310}{23.320} \times 100\% = 99,96\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	$\frac{392.649}{418.999} \times 100\% = 93,71\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{54.051}{54.388} \times 100\% = 99,38\%$	Dinas Kesehatan	

		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	$\frac{119.889}{120.865} \times 100\% = 99,19\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	$\frac{7.659}{7.735} \times 100\% = 99,02\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	$\frac{1.261}{1.291} \times 100\% = 97,68\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	$\frac{11.971}{11.971} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Sesuai Standar	$\frac{15.983}{15.983} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{0}{6.171} \times 100\% = 0\%$	Dinas PUPR	
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{901.994}{1.032,237} \times 100\% = 87,38\%$	Dinas PUPR	
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	$\frac{651.069}{667.083} \times 100\% = 97,60\%$	Dinas PUPR	
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	$\frac{103.357}{150.045} \times 100\% = 68,88\%$	Dinas PUPR	

		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas PUPR	
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas PUPR	
		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota	$\frac{77}{77} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas PUPR	
		Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas PUPR	
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/ Kota	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Perkimtan	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	$\frac{6,79}{6,79} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perkimtan	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	$\frac{1.463}{10.553} \times 100\% = 13,86\%$	Dinas Perkimtan	
		Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perkimtan	

5.	Trantibumlinmas	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	$\frac{395}{480} \times 100\% = 82,29\%$	BPBD	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{3.097}{3.097} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{42}{46} \times 100\% = 91,30\%$	DPKP	
6.	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	

		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	$\frac{168}{168} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	$\frac{42.021}{49.932} \times 100\% = 84,16\%$	Dinas Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	Disnakertrans	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	$\frac{127}{248} \times 100\% = 51,21\%$	Disnakertrans	
		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	$\frac{26.778}{26.778} \times 100\% = 100\%$	Disnakertrans	
2.	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$	DPPPA	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	DPPPA	
3.	Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{213,695}{59,08} \times 100\% = 361,70\%$	Dinas Ketahanan Pangan	

4.	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	$\frac{3.070.093,3}{10.765.074,34} \times 100\% = 28,52\%$	Dinas Perkimtan	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	$\frac{5.514.827.642}{7.022.163.641} \times 100\% = 78,53\%$	Dinas Perkimtan	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	$\frac{11.000}{11.000} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perkimtan	
5.	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{4}{15} \times 100\% = 26,67\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	$\frac{86.715,97}{86.715,97} \times 100\% = 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	$\frac{198.397}{203.709} \times 100\% = 97,39\%$	Dinas Dukcapil	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{117.539}{191.681} \times 100\% = 61,32\%$	Dinas Dukcapil	
		Persentase Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	

		Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	$\frac{466.495}{475.426} \times 100\% = 98,12\%$	Dinas Dukcapil	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	$\frac{3.620}{3.620} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	$\frac{196.438}{196.438} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	$\frac{4.674}{4.674} \times 100\% = 100\%$	Dinas Dukcapil	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ (Tuntas Hasil 100%)	DPMD	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{32}{111} \times 100\% = 28,83\%$	DPMD	
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	$\frac{246}{246} \times 100\% = 100\%$	DPMD	
8.	Pengendalian Penduduk dan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	$\frac{2,2}{2,17} \times 100\% = 101,38\%$	DPPKB	
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)	$\frac{75.211}{106.232} \times 100\% = 70,80\%$	DPPKB	
		Persentase Kebutuhan ber-Keluarga Bencana yang Tidak Terpenuhi (<i>unmet need</i>)	$\frac{8,5}{10,4} \times 100\% = 81,73\%$	DPPKB	

9.	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,482	Dishub	
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,07	Dishub	
		Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	3 — x 100% = 100% 3	Dishub	
10.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	58 — x 100% = 100% 58	Diskominfo	
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	17 — x 100% = 70,83% 24	Diskominfo	
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	444.180 ———— x 100% = 100% 444.180	Diskominfo	
11.	Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	9.488.215.957 ———— x 100% 35.210.711.424 = 26,95%	Dinkop UKM	
		Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	13.853 ———— x 100% = 64,51% 21.474	Dinkop UKM	
12.	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	-4.046.099.409.675 ———— x 100% 17.166.671.763.710 = -23,57%	DPMPTSP	
		Realisasi Total Terhadap Target Investasi	8.846.268.316.867 ———— x 100% 12.000.000.000.000 = 73,72%	DPMPTSP	

13.	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	$\frac{72}{132} \times 100\% = 54,55\%$	Dispora	
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$\frac{140.523}{155.543} \times 100\% = 90,34\%$	Dispora	
		Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Pelatihan Daerah Provinsi	$\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	Dispora	
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	$\frac{34}{42} \times 100\% = 80,95\%$	Dispora	
14.	Statistik	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	$\frac{4.944}{4.961} \times 100\% = 99,66\%$	Diskominfo	
15.	Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	$\frac{565}{918} \times 100\% = 61,55\%$	Diskominfo	
16.	Kebudayaan	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Disdikbud	
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Disdikbud	
17.	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	62,36	Dinas Perpustakaan & Arsip	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	9,64	Dinas Perpustakaan & Arsip	

18.	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	76%	Dinas Perpus & Arsip	
-----	------------------	---	-----	----------------------	--

Urusan Pilihan					
1.	Kelautan dan Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	$\frac{13.142,58}{12.738,30} \times 100\% = 103,17\%$	Dinas Perikanan	
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/tahun)	28,3 Kg / Kap / Tahun	Dinas Perikanan	
2.	Pariwisata	Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	$\frac{318.763.720.184}{588.140.137.154} \times 100\% = 54,20\%$	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	$\frac{30}{10} \times 100\% = 300\%$	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{74.164}{150.155} \times 100\% = 49,39\%$	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3.	Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	$\frac{12.048,88}{228.698,24} \times 100\% = 5,27\%$	DTPHP	
		Peningkatan Produksi Hortikultura	$\frac{1.626,7}{26.225,8} \times 100\% = 6,20\%$	DTPHP	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	$\frac{593,92}{19.142,41} \times 100\% = 3,10\%$	DTPHP	

		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari <i>Surveillance</i> Penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	$\frac{220,57}{220,57} \times 100\% = 100\%$	DTPHP	
4.	Perdagangan	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	$\frac{3.395}{51.790} \times 100\% = 6,56\%$	Dinas PerindagESDM	
5.	Perindustrian	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	44,18%	Dinas PerindagESDM	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	$\frac{11}{80} \times 100\% = 13,75\%$	Dinas PerindagESDM	
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{170}{2.415} \times 100\% = 7,04\%$	Dinas PerindagESDM	
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	$\frac{333.931.442.052}{8.850.268.296.268} \times 100\% = 3,77\%$	Dinas PerindagESDM	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	BAPPEDA	

2.	Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	$\frac{1.229.323.814.944,69}{4.781.820.110.969,03} \times 100\%$ = 25,71%	BPKAD	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{449.379.608.599,66}{3.956.201.820.618,42} \times 100\%$ = 11,36%	BPKAD	
		Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun N	$\frac{2.639.810.311.131,3}{4.281.720.011.452} \times 100\%$ = 61,65%	BPKAD	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	$\frac{2.196.444.926.985,03}{4.215.795.709.799,03} \times 100\%$ = 52,10%	BPKAD	
3.	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	$\frac{2.744}{6.182} \times 100\% = 44,39\%$	BPKSDM	
4.	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	$\frac{154}{154} \times 100\% = 100\%$	BRIDA	
5.	Pengawasan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 5	Inspektorat	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 4	Inspektorat	
		Manajemen Risiko Indeks	Nilai 5	Inspektorat	

		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran N-1	$\frac{1.144}{1.144} \times 100 \% = 100\%$	Inspektorat	
6.	Pengadaan	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35,56 Poin	Bagian PBJ	
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	20,38 Poin	Bagian PBJ	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	19,41 Poin	Bagian PBJ	
7.	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun N	Tepat Waktu	BPKAD	
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	$\frac{10}{13} \times 100\% = 76,92\%$	Bagian Hukum	
8.	Pelayanan Publik	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai 81,17	Bagian Organisasi	

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Pengukuran kinerja ini merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari pelaporan masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim dan secara eksternal yang berasal dari luar instansi atau lintas sektoral yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Analisa Data

Data yang didapat kemudian dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 2.1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya tingkat kinerja, atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- 2.2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya tingkat kinerja, atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, maka penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan digunakan skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yaitu:

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN KINERJA
1.	$\geq 100\%$	Sangat Baik
2.	$76\% \geq 100\%$	Baik
3.	$56\% \geq 75\%$	Cukup
4.	$\leq 55\%$	Kurang

Sesuai dengan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/37/AA.01/2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025 bahwa apabila terdapat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja 2025 dengan dasar RPJMD dan Rencana Strategis periode terbaru, maka Laporan Kinerja tahun 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan. Dalam hal ini Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan dasar RPJMD 2025 - 2029 maka dilakukan analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2025.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SESUAI PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN RPD KABUPATEN MUARA ENIM 2024 - 2026

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025 - 2029 ditetapkan mengacu kepada RPD Kabupaten Muara Enim 2024 - 2026 sebagai berikut :



BUPATI MUARA ENIM

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison
Jabatan : Bupati Muara Enim

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Muara Enim, 14 Februari 2025

BUPATI MUARA ENIM,

EDISON

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	Padapa (71-80)
2.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	6,7
3.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	5,18
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,94
5.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5,82
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	7,61
7.	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,318
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,15
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,88
10.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,01
		Rata-Rata Lama Sekolah	6,06
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,597
12.	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	8
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	8
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,10
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	4,54
17.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	10,29
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	78,69
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,88
20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,00
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	95,88

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	86,85
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,39
24.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0,09
25.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2,87
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya
27.	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	10,20

PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	244.542.071.009
2	Program Pengembangan Kurikulum	645.197.300
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.696.952.025
4	Program Pengembangan Kebutuhan	1.479.251.800
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	934.798.672
6	Program Pembinaan Sejarah	150.707.831
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	298.631.347.044
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.215.656.183
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	323.745.694
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.722.061.464
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.237.171.000
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	56.074.834.888
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.767.282.674
14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.061.996.000
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.498.396.321
16	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	26.491.280.512
17	Program Penataan Bangunan Gedung	27.744.639.790
18	Program Penyelenggaraan Jalan	173.400.557.265
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	55.640.400
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.125.744.162
21	Program Pengembangan Perumahan	3.178.743.000
22	Program Kawasan Pemukiman	36.279.751.500
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	45.469.901.435
24	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	181.268.911
25	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	53.207.878.829
26	Program Pengelolaan Tanah Kosong	598.137.454
27	Program Penatagunaan Tanah	315.387.184
28	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.397.951.360
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.734.430.054
30	Program Penanggulangan Bencana	2.720.710.453
31	Program Pemberdayaan Sosial	12.291.351.140
32	Program Rehabilitasi Sosial	923.710.200
33	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	798.560.800
34	Program Penanganan Bencana	935.222.600
35	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	368.903.265

No	Program	Anggaran
43	Program Perencanaan Tenaga Kerja	275.204.119
45	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.051.389.370
46	Program Penempatan Tenaga Kerja	482.980.400
48	Program Hubungan Industrial	535.092.300
49	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	504.197.392
50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	623.457.079
51	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.565.049.650
52	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	329.265.200
53	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	123.657.115
54	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	225.496.700
55	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	56.322.615
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	211.778.265
57	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	175.608.800
58	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	116.490.100
59	Program Pengelolaan Sampah	13.740.398.640
60	Program Pendaftaran Penduduk	1.665.779.213
61	Program Pencatatan Sipil	419.757.016
62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	739.323.485
63	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	142.362.600
64	Program Penataan Desa	17.204.574.110
65	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	521.883.000
66	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.297.495.500
67	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	6.039.373.710
68	Program Pengendalian Penduduk	785.683.504
69	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.963.841.734
70	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.413.302.054
71	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.286.114.015
72	Program Pengelolaan Pelayaran	405.571.000
73	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.754.464.000
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.592.790.050
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	461.838.400
76	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	411.657.200
77	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	316.837.600
78	Program Penilaian Kesehatan KSP/USPN Koperasi	376.311.500
79	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	466.050.585
80	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.251.891.395

No	Program	Anggaran
81	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.128.595.925
82	Program Pengembangan UMKM	2.006.905.150
83	Program Pengembangan Ilmu Penanaman Modal	1.299.052.744
84	Program Promosi Penanaman Modal	757.007.900
85	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.192.824.742
86	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.068.274.600
87	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	140.429.288
88	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.342.043.160
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	37.899.140.950
90	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	599.999.940
91	Program Pembinaan Perpustakaan	3.346.831.851
92	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	84.548.788
93	Program Pengelolaan Arsip	611.371.235
94	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	129.508.700
95	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.029.674.246
96	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.655.419.277
97	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.915.368.705
98	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.141.898.542
99	Program Pemasaran Pariwisata	1.939.691.335
100	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	494.999.100
101	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	550.000.000
102	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.902.513.608
103	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	33.106.308.179
104	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.348.196.000
105	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.703.517.200
106	Program Penyuluhan Pertanian	2.785.467.800
107	Program Perizinan Usaha Pertanian	1.017.757.400
108	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	404.742.770
109	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	27.850.404.700
110	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	815.037.382
111	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	384.307.876
112	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99.998.300
113	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	962.619.900
114	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	287.501.875
115	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.254.097.862
116	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.793.081.380
117	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41.515.610.860

No	Program	Anggaran
118	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.392.540.461
119	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.611.200.300
120	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	509.306.943.016
121	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.292.331.155
122	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.432.151.521
123	Program Kepegawaian Daerah	7.766.408.541
124	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.409.910.281
125	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.672.077.660
126	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.205.569.500
127	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.109.350.940
128	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.705.803.794
129	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.472.702.445
130	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.135.572.498
131	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.062.307.443
132	Program Koordinasi Konferensi dan Keterlibatan Umum	2.164.335.544
133	Program Pengujian Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.224.259.595
134	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.403.994.150
135	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	887.857.259
136	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	703.561.010
137	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	15.411.664
TOTAL		2.018.082.873.698

Jumlah program sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) program dengan anggaran sebesar Rp. 2.018.082.873.698,- (dua triliun delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Muara Enim, 14 Februari 2025
BUPATI MUARA ENIM,

EDISON

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian capaian kabupaten sehat	Kategori	Padapa (71-80)	Wiwerda** (81,92)	102,4	Sangat Baik
2.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Indeks	0,7	0,63	90	Baik
3.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,18	5,42	104,63	Sangat Baik
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,90	73,06	118,03	Sangat Baik
5.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Indeks	5,62	5,54	98,57	Baik
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	7,01	5,42	77,31	Baik
7.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,318	0,258	123,26	Sangat Baik
8.	Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,15	73,77	105,16	Sangat Baik
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,88	74,82	107,07	Sangat Baik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka harapan lama Sekolah	Tahun	12,01	12,03	100,17	Sangat Baik
		Rata - rata Lama Sekolah	Tahun	8,06	8,45	104,84	Sangat Baik
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Rp. Juta	11,597	12,65	109,08	Sangat Baik
12.	Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B***	100	Baik
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	B*	100	Baik
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,75	120,97	Sangat Baik
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	100	Baik
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	4,54	4,66	102,64	Sangat Baik
17.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	10,29	9,45	108,88	Sangat Baik
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	%	78,69	84,16	93,50	Baik
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,88	4,13	93,95	Baik

20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,00	94,80	105,33	Sangat Baik
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,01	1,18***	85,60	Baik
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,88	86,01	89,70	Baik
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	Indeks	89,85	90,14*	100,32	Sangat Baik
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,39	69,55*	89,87	Baik
24.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	%	0,09	0,36	400	Sangat Baik
25.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	%	2,87	-0,16	NA	NA
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya*	100	Baik
27.	Meningkatnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	%	10,20	8,20	80,39	Baik

*) Nilai tahun sebelumnya

**) Hasil evaluasi mandiri

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 tujuan dan 20 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 29 indikator sasaran, diketahui bahwa 15 indikator sasaran berada pada kategori Sangat Baik, 13 indikator pada kategori Baik, dan 1 indikator belum dapat diukur.

Secara umum, mayoritas indikator sasaran telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan demikian, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara keseluruhan pada kategori Baik, yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang cukup optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2024	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian pencapaian Kabupaten Sehat	Kategori	NA	Wiwerda (81-90)	Padapa** (72)	Wiwerda** (81,92)
2.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Indeks	0,6	0,8	0,59	0,63
3.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks kota toleran	Indeks	4,98	5,28	5,387	5,42
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61,70	70	64,35	73,06
5.	Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif	Indeks	5,46	5,70	5,54**	5,54*
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	8,39	7,44	5,89	5,42
7.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks gini	Indeks	0,320	0,317	0,319**	0,258
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,43	70,51	73,1	73,77
9.	Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,38	70,05	74,49	74,82

10.	Meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	12,02	12,02	12,03
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,9	9,00	8,27	8,45
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	11,304	11,744	12,291	12,65
12.	Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	B	B	B***
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B	B	B*	B*
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,91	3,20	3,29	3,75
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai kualitas pelayanan publik	Indeks	3,90	4,86	4,56	4,66
17.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat	Persentase penduduk miskin	%	11,12	9,88	9,79	9,45
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	%	85,55	75,76	78,83	84,16
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,12	3,76	4,09	4,13
20.	Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	85,00	92,00	94,53	94,80

21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,03	1,00	1,2	1,18***
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian Masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	91,88	97,88	96,44	86,01
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan Masyarakat dalam Pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,67	89,93	89,82**	90,14*
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,65	80,25	69,66**	69,55*
24.	Meningkatkan peran serta Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IPG	%	0,09	0,09	0***	0,36
25.	Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IDG	%	2,87	2,87	0***	-0,16
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Utama	Nindya*	Nindya*
27.	Meningkatkan desa ramah Perempuan dan peduli anak	Persentase desa ramah perempuan dan peduli anak	%	3,25	12,20	4,07	8,20

*) Nilai tahun sebelumnya

**) Hasil evaluasi mandiri

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 27 indikator sasaran strategis, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung pencapaian target akhir RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024–2026.

Sebagian indikator telah melampaui target akhir RPD, antara lain Indeks Kota Toleran, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Usia Harapan Hidup, Pengeluaran per Kapita, Indeks SPBE, Persentase Penduduk Miskin, Skor Pola Pangan Harapan serta, Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Beberapa indikator telah mendekati target akhir RPD, seperti Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Nilai Kualitas Pelayanan Publik, Persentase Penanganan PPKS, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Persentase Rumah Layak Huni. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan percepatan pencapaian, antara lain pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada jalur pencapaian target RPD 2024–2026, meskipun masih diperlukan penguatan upaya pada beberapa indikator yang belum optimal.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Laporan keuangan merupakan instrumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Salah satu komponen laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang memuat gambaran mengenai sumber pendapatan, alokasi belanja, serta penggunaan sumber daya keuangan selama satu periode anggaran, disertai perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Secara ringkas, Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33	3.914.103.838.058,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31	382.437.801.698,52
Pajak Daerah	195.567.613.344,00	194.665.442.709,58	99,53	127.905.669.439,00
Retribusi Daerah	186.323.243.953,00	173.275.335.331,76	92,99	113.062.672.451,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.552.719.027,07	26.552.719.027,07	100,00	31.147.873.242,38
Lain-lain PAD yang Sah	30.745.227.322,96	54.876.102.665,65	178,48	110.321.586.565,75
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31	382.437.801.698,52
PENDAPATAN TRANSFER	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.524.646.144.599,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.384.409.910.660,00	3.178.794.712.284,00	93,92	3.198.030.938.052,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56	326.615.206.547,22
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56	326.615.206.547,22
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.524.646.144.599,22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97	7.019.891.760,42
Pendapatan Hibah	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02	727.192.879,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.146.225.344,00	6.766.237.573,08	163,19	6.292.698.881,42
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97	7.019.891.760,42
JUMLAH PENDAPATAN	4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33	3.914.103.838.058,16

Tabel 2.5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54	3.917.575.460.242,96
BELANJA OPERASI	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23	2.236.645.214.872,58
Belanja Pegawai	1.413.990.292.944,69	1.228.547.741.022,42	86,88	1.059.547.345.085,03
Belanja Barang dan Jasa	1.170.205.111.116,48	1.047.806.287.421,44	89,54	997.240.572.419,55
Belanja Bunga	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,92	7.485.321.723,00
Belanja Subsidi	1.206.750.000,00	449.328.000,00	37,23	0,00
Belanja Hibah	79.919.408.400,00	75.397.682.999,00	94,34	172.371.975.645,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23	2.236.645.214.872,58
BELANJA MODAL	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69	1.173.510.368.320,38
Belanja Modal Tanah	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28	10.194.664.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.352.258.207,17	312.210.171.967,00	93,37	160.953.164.905,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.727.427.152,00	298.572.404.158,98	86,61	202.931.222.921,64
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	782.372.452.613,69	721.758.065.918,32	92,25	786.229.627.683,74
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.997.009.365,00	12.982.234.349,00	99,88	11.788.479.750,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.050.000.000,00	1.461.855.900,00	71,31	1.413.209.060,00
JUMLAH BELANJA MODAL	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69	1.173.510.368.320,38
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
BELANJA TRANSFER	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72	506.699.877.050,00
Belanja Bagi Hasil	38.193.085.729,00	38.181.085.729,00	99,96	22.333.351.461,00
Belanja Bantuan Keuangan	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,63	484.366.525.589,00
JUMLAH BELANJA	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72	506.699.877.050,00

Tabel 2.5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
TRANSFER				
JUMLAH BELANJA	4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54	3.917.575.460.242,96
SURPLUS/DEFISIT	(632.081.631.766,00)	(325.516.147.209,10)	51,49	(3.471.622.184,80)
PEMBIAYAAN DAERAH	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34	654.021.770.083,21
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	560.300.286.213,21
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.130,00
Penyertaan Modal Daerah	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	99,99	6.278.516.130,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.130,00
PEMBIAYAAN NETTO	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34	654.021.770.083,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	308.755.484.560,27	0,00	650.550.147.898,41

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat			90
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	(1.255.104.269,23)	
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama			104,63
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	(66.980.000,00)	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	(354.865.160,00)	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(192.775.048,00)	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	(81.196.000,00)	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	(178.720.880,00)	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	(251.673.148,00)	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	(119.108.450,00)	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			118,03
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampah	(38.829.900,00)	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	(591.526.362,00)	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	(168.041.200,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	(342.276.200,00)	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	(67.142.700,00)	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	(51.663.685,00)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	(85.597.200,00)	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	(27.278.100,00)	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	(66.497.600,00)	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	(45.321.500,00)	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	(50.679.800,00)	
	Program Pengelolaan Persampahan	(181.006.700,00)	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi			77,31
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	(229.412.379,50)	
	Program Pemasaran Pariwisata	(277.778.025,00)	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	(200.648.800,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(68.089.550,00)	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	(132.265.100,00)	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	(70.948.800,00)	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	(120.413.520,00)	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	(350.861.850,00)	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	(127.855.125,00)	
	Program Pengembangan UMKM	(155.487.000,00)	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	(417.627.444,00)	
	Program Promosi Penanaman Modal	(165.372.100,00)	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	(419.916.606,00)	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	(398.520.500,00)	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	(59.887.527,00)	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	(295.399.200,00)	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	(142.300.937,00)	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	(3.445.300,00)	
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			123,26
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	(1.115.032.775,00)	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(873.986.562,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	(245.541.100,00)	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	(517.180.950,00)	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	(1.115.032.775,00)	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(873.986.562,00)	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	(63.625.400,00)	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	(146.772.388,00)	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	(53.219.686,00)	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	(46.512.204,00)	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	(17.060.800,00)	
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	(67.299.700,00)	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	(2.315.511.012,00)	
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			107,07
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	(6.167.417.264,00)	
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat			102,50
	Program Pengembangan Kurikulum	(300.644.400,00)	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	(1.915.750.062,00)	
	Program Pengembangan Kebudayaan	(823.285.000,00)	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	(45.230.000,00)	
	Program Pembinaan Sejarah	(4.095.544,00)	
Meningkatkan daya beli masyarakat			109,08
	Program Hubungan	(275.109.300,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Industrial		
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	(1.552.206.901,00)	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	(1.552.206.901,00)	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah			100
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	(4.836.365.194,00)	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	(4.836.365.194,00)	
Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik			120,97
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	(478.954.450,00)	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	(474.559.300,00)	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	(99.632.900,00)	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	(153.217.400,00)	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah			100
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	(2.128.129.673,00)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(2.863.749.900,00)	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.373.031.150,00)	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	(590.200.068,00)	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	(2.609.645.467,00)	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	(2.914.765.000,00)	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(495.808.675,15)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik			102,64
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	(19.978.189.000,00)	
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	(319.093.245,00)	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	(312.332.000,00)	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	(241.114.286,16)	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	(532.191.752,00)	
	Program Penanggulangan Bencana	(570.549.986,00)	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	(73.621.575,00)	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	(27.592.311,00)	
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	(124.298.700,00)	
	Program Penatagunaan Tanah	(10.570.615,00)	
	Program Pendaftaran Penduduk	(147.905.734,00)	
	Program Pencatatan Sipil	(129.606.464,00)	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(393.132.640,00)	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	(71.440.000,00)	
	Program Penataan Desa	(393.560.750,00)	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	(1.733.251.500,00)	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	(516.752.433,00)	
	Program Pengelolaan Pelayaran	(2.919.900,00)	
	Program Pembinaan Perpustakaan	(452.505.314,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	(30.587.700,00)	
	Program Pengelolaan Arsip	(381.611.095,00)	
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	(58.997.600,00)	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	(236.617.878,85)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	(966.720.744,00)	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	(120.763.440,00)	
MeNingkatkan penanganan PPKS			93,50
	Program Pemberdayaan Sosial	(917.410.603,25)	
	Program Rehabilitasi Sosial	(126.487.275,00)	
	Program Penanganan Bencana	(37.521.200,00)	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	(295.517.425,00)	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	(694.392.699,00)	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	(78.895.130,00)	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	(477.793.820,00)	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	(170.183.000,00)	
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat			105,33
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	(97.978.700,00)	
	Program Pengawasan Keamanan pangan	(108.234.300,00)	
Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk			85,60
	Program Pengendalian Penduduk	(181.148.998,00)	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	(329.682.828,06)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	(131.919.570,00)	
Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat			89,70
	Program Pengembangan Perumahan	(377.218.900,00)	
Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan			400
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	(179.560.314,00)	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan			NA
Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak			80,39
	Program Perlindungan Perempuan	(81.024.000,00)	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	(121.218.728,00)	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	(158.346.480,55)	
	Program Perlindungan Khusus Anak	(175.851.400,00)	
Total		84.359.957.356,75	

Total efisiensi anggaran dari 117 program sebesar Rp. 84.359.957.356,75 dialihkan ke program lain yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pengembangan penyediaan sistem air minum, sistem drainase, peningkatan PSU, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Analisis Capaian Tujuan 1 Meningkatnya kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani masyarakat

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Tujuan 1
Meningkatnya kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Penilaian capaian Kabupaten sehat	Kategori	Padapa* (72)	Padapa (71-80)	Wiwerda (81,92)*	102,4	Wiwerda (81-90)	Wiwerda (81,92)*	91,02
Rata – rata capaian kinerja					102.4			91,02

*Hasil penilaian mandiri

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan mewujudkan daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni. Implementasi KKS dilaksanakan melalui penerapan sembilan tatanan yang terintegrasi dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini menekankan pada perubahan perilaku, perbaikan lingkungan, serta penguatan kelembagaan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis wilayah.

Penilaian Kabupaten/Kota Sehat terdiri atas tiga kategori penghargaan, yaitu Swasti Saba Padapa, Swasti Saba Wiwerda, dan Swasti Saba Wistara, yang diberikan berdasarkan capaian terhadap sembilan tatanan yang dipersyaratkan. Kesembilan tatanan tersebut meliputi: (1) kehidupan masyarakat sehat mandiri, (2) kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat, (3) satuan pendidikan sehat, (4) pasar sehat, (5) kawasan pariwisata sehat, (6) sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi sehat, (7) kawasan perindustrian dan perkantoran sehat, (8) kehidupan sosial yang sehat, dan (9) penanggulangan bencana. Adapun capaian penilaian mandiri KKS tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian penilaian KKS Tahun 2025 Kabupaten Muara Enim

Indikator Penilaian KKS		Target (%)	Capaian (%)
Persentase nilai capaian per tatanan (Indikator pokok dan indikator)	T1 Sehat Mandiri	71	77,59
	T2 Perkim	71	79,55
	T3 Pendidikan	71	90,91
	T4 Pasar	71	88,46

pendukung)	T5 Pariwisata	71	77,27
	T6 Transportasi	71	81,25
	T7 Perindustrian	71	97,73
	T8 Sosial	71	73,08
	T9 Bencana	71	71,43
Rata-rata		71	81,92

Target penilaian capaian Kabupaten Sehat tahun 2025 ditetapkan pada kategori Swasti Saba Padapa dengan rentang nilai 71–80. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2025, Kabupaten Muara Enim memperoleh nilai sebesar 81,92 sehingga telah melampaui target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori Swasti Saba Wiwerda. Dengan capaian tersebut, realisasi kinerja dinilai mencapai 100 persen karena target kinerja telah terlampaui.



Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang memperoleh nilai 67,7 dan belum mencapai kategori Padapa, maka terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan koordinasi lintas sektor, perbaikan pemenuhan indikator pada masing-masing tatanan, serta peningkatan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Sehat. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026, capaian penilaian Kabupaten Sehat telah mencapai 91,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa progres pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung

sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, peningkatan nilai capaian Kabupaten Sehat tahun 2025 mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam memperkuat implementasi kebijakan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan berbasis lingkungan dan masyarakat. Namun pada saat penilaian Kabupaten Sehat masih terdapat indikator dengan capaian yang belum optimal pada tatanan 9, yang disebabkan belum tersusunnya Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Kepala Daerah terkait penetapan rencana kontingensi penanggulangan bencana sebagai dokumen pendukung penilaian. Capaian kategori Wiwerda ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pemenuhan indikator pada seluruh tatanan, sehingga pada periode selanjutnya dapat ditingkatkan menuju kategori penghargaan yang lebih tinggi.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka meningkatkan capaian penilaian Kabupaten/Kota Sehat antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang difokuskan pada penerapan lima pilar STBM guna mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
2. Melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, melalui kegiatan deteksi dini, skrining kesehatan, kampanye pencegahan, penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta pengendalian faktor risiko penyakit.
3. Mengimplementasikan program kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA, melalui pendekatan promotif, preventif, dan rehabilitatif untuk mendukung terciptanya kehidupan sosial yang sehat dan produktif.
4. Melaksanakan program surveilans epidemiologi dan imunisasi, meliputi pemantauan tren penyakit, pelaporan kasus secara berkala, serta pelaksanaan imunisasi rutin dan tambahan guna meningkatkan cakupan dan kekebalan kelompok (*herd immunity*).
5. Menggerakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara lintas sektor untuk mendorong peningkatan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan berkala, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

6. Memperkuat pemberdayaan Posyandu dan program perbaikan gizi, melalui peningkatan kapasitas kader, pemantauan tumbuh kembang balita, pencegahan stunting, serta edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga.
7. Mengembangkan program peningkatan kapasitas dan daya saing keolahragaan, melalui pembinaan atlet, peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga.
8. Menyelenggarakan pemasalan olahraga dan festival olahraga rekreasi secara berjenjang dan berkelanjutan, baik di tingkat daerah maupun partisipasi pada tingkat nasional dan internasional, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik.
9. Melaksanakan kegiatan senam bersama masyarakat secara rutin setiap bulan, melalui penyampaian surat edaran dan penyediaan instruktur sebagai upaya pembiasaan pola hidup aktif dan sehat.
10. Melaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 45 unit, sehingga hingga akhir tahun 2025 tercatat 105.350 rumah tangga atau 76,06% dari total 138.503 rumah tangga di 22 kecamatan telah menggunakan sumber air minum yang layak.
11. Melaksanakan pembangunan jamban dan tangki septik di Kecamatan Muara Enim, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Gunung Megang, Gelumbang, Kelekar, Muara Belida, Rambang, dan Sungai Rotan guna meningkatkan akses sanitasi layak dan kualitas kesehatan lingkungan.

Berbagai program dan kegiatan tersebut menjadi faktor pendukung meningkatnya capaian nilai penilaian mandiri Kabupaten Sehat dari 67,7 pada tahun 2023 menjadi 81,92 pada tahun 2025, sehingga berhasil melampaui target kategori Padapa dan mencapai kategori Wiwerda. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen, koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Muara Enim yang sehat.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator penilaian Kabupaten Sehat diarahkan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan dasar, serta perluasan partisipasi masyarakat secara terukur dan berkelanjutan, antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi rutin dan berbasis data terhadap capaian setiap tatanan, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan intervensi perbaikan.

2. Mengoptimalkan dan mengembangkan kegiatan pendukung Kabupaten Sehat, dengan memastikan keterkaitan langsung antara program yang dilaksanakan dan indikator penilaian, sehingga output kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai capaian.
3. Memperkuat sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak, sehingga pelaksanaan sembilan tatanan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah.
4. Meningkatkan komitmen dan dukungan Kepala Daerah, khususnya dalam penguatan kebijakan, koordinasi, serta keberlanjutan pendanaan, sebagai faktor penentu konsistensi dan keberhasilan program Kabupaten Sehat.
5. Mengembangkan kapasitas dan daya saing keolahragaan masyarakat, melalui pembinaan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta perluasan partisipasi olahraga sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat.
6. Mendorong pemasaran olahraga, festival olahraga rekreasi, dan pelaksanaan senam masyarakat secara rutin dan terstruktur, sehingga terbentuk budaya hidup aktif yang berkontribusi terhadap indikator tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri.
7. Meningkatkan akses penyediaan air bersih bagi masyarakat, melalui perluasan cakupan layanan air minum layak serta penguatan sarana dan prasarana pendukung, guna mendukung pemenuhan indikator tatanan permukiman dan sarana prasarana sehat.
8. Menyediakan pembangunan jamban dan tangki septik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya peningkatan akses sanitasi layak, pencegahan pencemaran lingkungan, serta penguatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan serta penetapan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah terkait rencana kontingensi penanggulangan bencana guna mendukung pemenuhan indikator tatanan 9 pada penilaian Kabupaten Sehat.

Melalui pendekatan yang terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan capaian indikator

Kabupaten Sehat, sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja untuk peningkatan kategori penghargaan pada periode selanjutnya.

Program yang mendukung pencapaian tujuan ini antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum/pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (PSAL) dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (PSALD) dalam daerah kabupaten/kota.

2. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat

Tabel 2.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,59	0,7	0,63	90	0,8	0,63	78,75
Rata – rata capaian kinerja					90			78,75

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan pemerintah untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga. IKS menilai kondisi kesehatan secara komprehensif yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, serta lingkungan tempat tinggal.

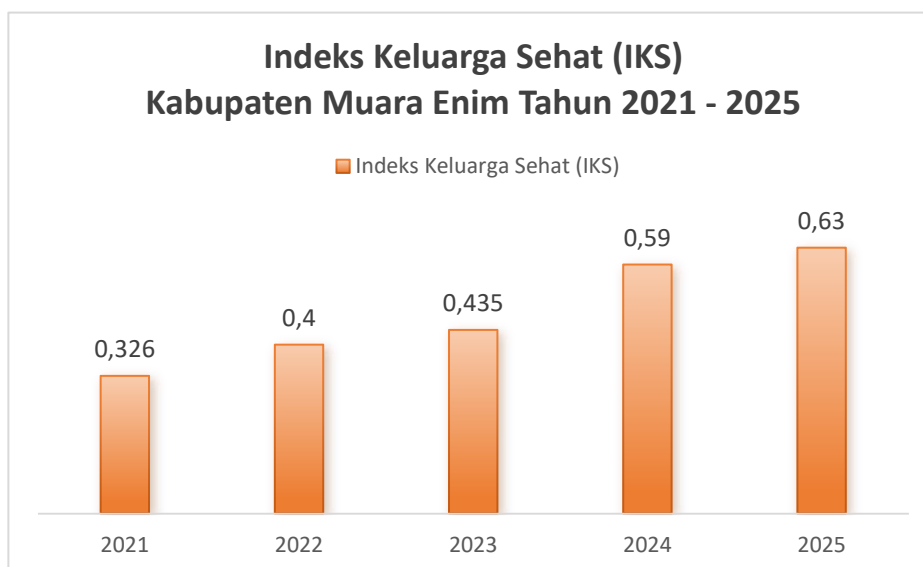
Dari target IKS tahun 2025 sebesar 0,7 tercapai sebesar 0,63 sehingga capaian kinerja tahun 2025 sebesar 90 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka realisasi tahun 2025 telah tercapai sebesar 78,75 persen. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan,

selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan keluarga secara bertahap serta efektivitas berbagai intervensi program kesehatan berbasis keluarga yang telah dilaksanakan.

Belum tercapainya target Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Muara Enim tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari aspek sistem pelaporan maupun capaian indikator perilaku masyarakat. Dari sisi pengelolaan data, sejak Desember 2024 *dashboard* pelaporan PIS-PK pada Aplikasi Keluarga Sehat milik Kementerian Kesehatan tidak dapat diakses, sehingga proses pemutakhiran, verifikasi, serta pelaporan data keluarga sehat menjadi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pengukuran capaian indeks belum dapat menggambarkan perkembangan kondisi kesehatan keluarga secara optimal.

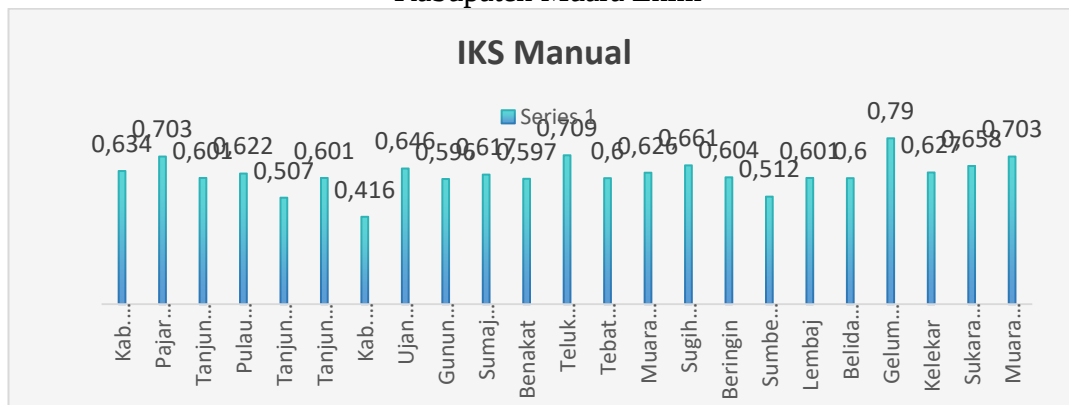
Di sisi lain, berdasarkan hasil capaian masing-masing indikator penyusun Indeks Keluarga Sehat, sebagian besar indikator telah menunjukkan kinerja yang baik, khususnya pada akses sanitasi, air bersih, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta kepesertaan program kesehatan. Namun demikian, masih terdapat indikator dengan capaian relatif rendah yaitu anggota keluarga tidak ada yang merokok yang hanya mencapai 47,82%. Rendahnya capaian indikator perilaku hidup sehat tersebut menjadi faktor dominan yang menahan peningkatan nilai Indeks Keluarga Sehat secara keseluruhan.

Untuk Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



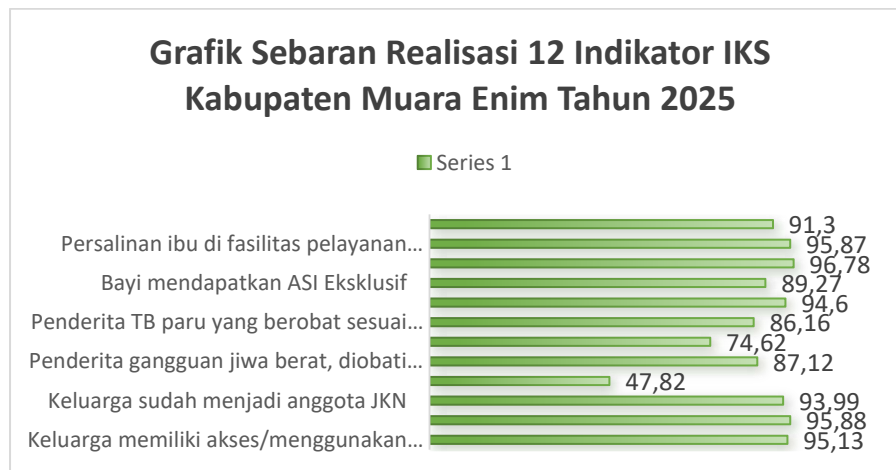
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Grafik capaian indikator IKS tahun 2025
Kabupaten Muara Enim



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Pada grafik diatas dapat dilihat capaian tertinggi Indeks Keluarga Sehat ada di Puskesmas Gelumbang dengan angka capaian 0,79 dan terendah ada di Puskesmas Muara Enim dengan angka capaian 0,41. Adapun sebaran realisasi 12 indikator IKS dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan capaian tersebut, sebagian besar indikator telah menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, masih terdapat indikator dengan capaian relatif rendah yaitu anggota keluarga tidak ada yang merokok yang hanya mencapai 47,82%, sehingga menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Muara Enim tahun 2025.

Berbagai langkah strategis telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan cakupan Indeks Keluarga Sehat (IKS), antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan bagi pengelola program puskesmas.

2. Monitoring dan evaluasi dari tim kabupaten.
3. Mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
4. Melakukan kunjungan rumah dan intervensi terhadap keluarga yang belum sehat.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas data, khususnya terhadap proses penginputan dan pemutakhiran data keluarga sehat, guna memastikan validitas, akurasi, dan konsistensi data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana program, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis terkait pengelolaan dan analisis data, serta penguatan pemahaman terhadap intervensi berbasis keluarga. Upaya ini juga diarahkan pada pemberian prioritas intervensi kepada keluarga dengan kategori tidak sehat agar terjadi perbaikan status kesehatan secara lebih terfokus dan terukur.
3. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas program serta lintas sektor, dalam rangka sinkronisasi dan integrasi data capaian indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), sehingga intervensi yang dilakukan lebih komprehensif dan saling mendukung antar program.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

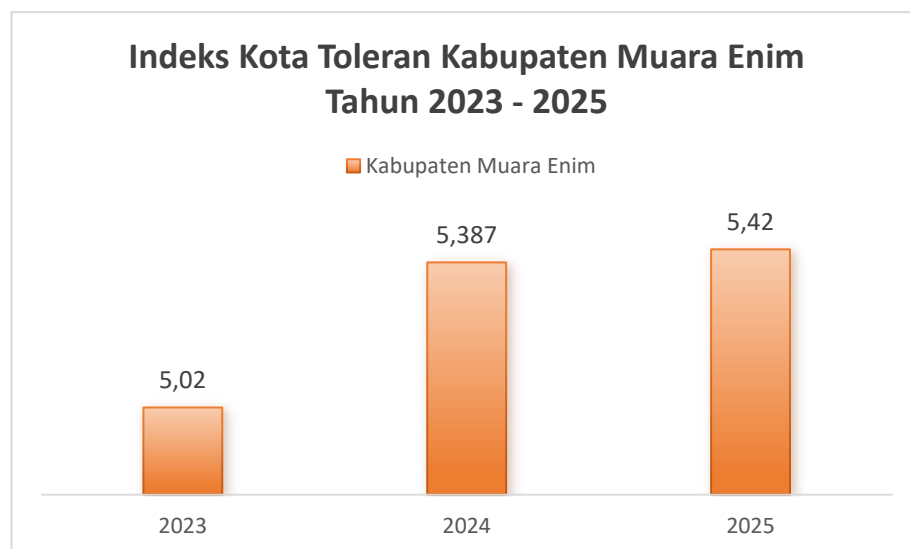
Tabel 2.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Kota Toleran	Indeks	5,387	5,18	5,42	104,63	5,28	5,42	102,65

Rata – rata capaian kinerja			104,63			102,65
------------------------------------	--	--	---------------	--	--	---------------

Indeks Kota Toleran merupakan pengukuran kinerja kota meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Indeks ini menilai kepemimpinan pemerintah, produk hukum, dan tindakan sosial yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta merawat harmoni sosial di tingkat kota.

Target Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 5,08 terealisasi sebesar 5,42 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,63 berada pada kategori sangat baik. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian di tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian kinerja 102,65 persen.



Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim diukur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan SETARA Institute Jakarta. Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim meningkat dari 5,02 di tahun 2023 menjadi 5,387 di tahun 2024 dan di tahun 2025 sebesar 5,42. Hal ini menunjukkan tren positif dalam implementasi komitmen pemajuan toleransi dan inklusi sosial di Kabupaten Muara Enim terutama dalam konteks peran Pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kota Toleran di Kabupaten Muara Enim antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa/Kampung Sadar Kerukunan (Kampung Toleran). Telah dibentuk Desa Sadar Kerukunan di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang,

berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 925 Tahun 2024 tentang Desa Sadar Kerukunan dan Susunan Pengurus. Pemilihan Desa Sigam didasarkan pada hasil survei Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim. Selain itu, pembentukan Kampung Toleran juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan nasional penguatan moderasi beragama.

2. Integrasi nilai moderasi beragama di satuan pendidikan. MTSN 2 Muara Enim mengintegrasikan materi moderasi beragama dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna memperkuat pemahaman tenaga pendidik terhadap pentingnya sikap beragama yang seimbang, inklusif, dan toleran.
3. Fasilitasi perayaan hari besar keagamaan. Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan hari besar seluruh agama sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kebebasan beragama dan menciptakan rasa aman serta nyaman bagi seluruh umat beragama.
4. Pembinaan kerukunan umat beragama melalui FKUB. Pembinaan dan penguatan kerukunan dilaksanakan secara rutin bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui kegiatan dialog, koordinasi, serta konsolidasi antarperwakilan organisasi keagamaan.
5. Fasilitasi dan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah dilakukan melalui mekanisme Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna memastikan terpenuhinya aspek administrasi dan sosial kemasyarakatan secara tertib dan kondusif.
6. Pemberian bantuan pembangunan rumah ibadah. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pembangunan rumah ibadah, termasuk pembangunan gereja di Kecamatan Gelumbang, sebagai bentuk dukungan terhadap sarana peribadatan yang layak bagi seluruh umat beragama.
7. Dialog lintas agama dan penanganan permasalahan secara cepat. Dialog lintas agama dilaksanakan secara berkala melalui FKUB dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas sosial. Setiap potensi permasalahan atau gesekan sosial yang muncul segera ditindaklanjuti melalui pendekatan persuasif dan musyawarah.
8. Dilaksanakan rapat dan koordinasi antar organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, termasuk karang taruna dan organisasi lainnya, dalam rangka

memperkuat kolaborasi sosial serta mendorong kegiatan produktif seperti pengembangan kewirausahaan sebagai bagian dari penguatan kohesi sosial.

9. Pemberian bantuan operasional bagi organisasi keagamaan. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi bantuan operasional kepada organisasi keagamaan guna mendukung kegiatan pembinaan umat dan menjaga harmoni sosial.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Mendorong integrasi nilai toleransi dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten akan mengarahkan kecamatan dan desa untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama ke dalam program kerja lokal, melalui pelatihan aparatur, dialog masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan sosial berbasis keberagaman.
2. Memperkuat kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil. Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan meningkatkan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta kelompok minoritas dalam kegiatan-kegiatan rutin yang partisipatif guna menjaring aspirasi, memfasilitasi agenda keagamaan, dan memperluas ruang inklusi sosial.
3. Peningkatan peran generasi muda dalam penguatan toleransi. Memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan lintas keagamaan, serta terlibat dalam forum-forum dialog dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Penguatan pendekatan berbasis dialog lintas agama. Memperluas forum pertemuan dan dialog lintas keagamaan secara berkelanjutan guna mendorong interaksi sosial yang positif serta membangun kohesi dan inklusi sosial di tengah masyarakat.
5. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama melalui pembinaan, edukasi, serta kegiatan sosial bersama.
6. Peningkatan layanan perizinan rumah ibadah. Penyederhanaan prosedur perizinan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan sesuai ketentuan yang berlaku, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik sosial.
7. Pemberian dukungan operasional kepada organisasi keagamaan. Memfasilitasi bantuan operasional bagi organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Kristiani, Parisada Hindu Dharma, dan

WALUBI, guna mendukung kegiatan pembinaan umat dan penguatan harmoni sosial.

8. Penguatan peran FKUB dan kegiatan kolaboratif sosial. Melaksanakan pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta memfasilitasi kegiatan bersama seperti kerja bakti, bakti sosial, dan forum kebersamaan lintas agama sebagai wujud nyata praktik toleransi di masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengembangan kapasitas kepramukaan, program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

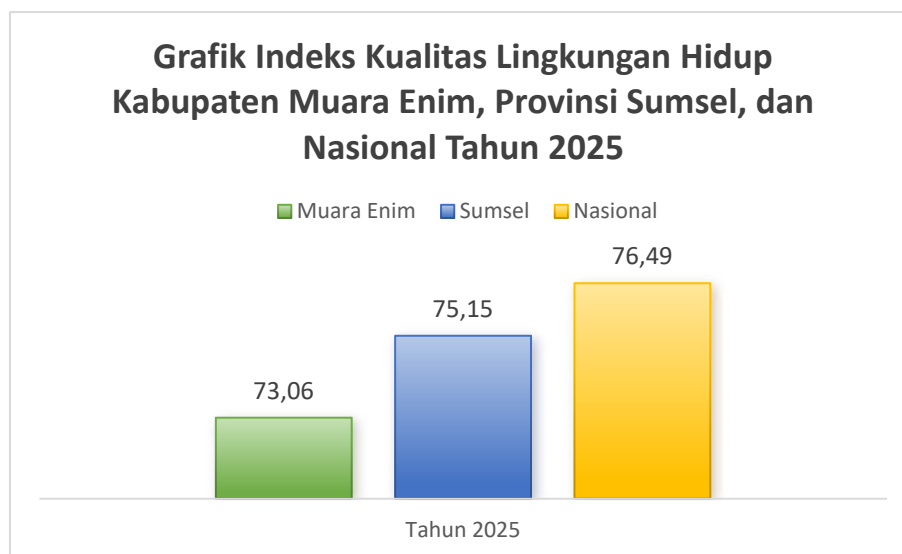
4. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 2.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,35	61,90	73,06	118,03	70,00	73,06	104,37
Rata – rata capaian kinerja					118,03			104,37

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 61,90 dengan realisasi sebesar 73,06 sehingga capaian kinerja tahun 2025

sebesar 118,03 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 maka capaian kinerjanya sebesar 104,37 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 masih berada di bawah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebesar 75,15 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional sebesar 76,49.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit/gabungan yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu, berdasarkan indikator air, udara, dan tutupan lahan. IKLH digunakan sebagai alat ukur kinerja pemerintah dalam perlindungan/pengelolaan lingkungan, dengan nilai lebih tinggi menandakan kondisi lingkungan yang lebih baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar 64,35. Faktor serta upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim antara lain:

1. Melaksanakan penanaman pohon secara berkelanjutan guna meningkatkan tutupan lahan dan memperkuat fungsi ekologis wilayah.
2. Melakukan pemantauan dan identifikasi potensi kerusakan lahan sebagai langkah preventif terhadap degradasi lingkungan.
3. Melaksanakan pengujian Indeks Kualitas Air (IKA) melalui pihak ketiga sebanyak 2 (dua) kali periode pemantauan manual guna menjamin objektivitas hasil pengukuran.

4. Mengoptimalkan pemantauan kualitas air dan udara secara daring melalui perangkat Onlimo KLH 108, Onlimo KLH 234, Onlimo KLH 204, serta SPKUA–Air Quality Monitoring System (AQMS).
5. Melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor berbahan bakar diesel dan non-diesel sebagai upaya pengendalian pencemaran udara.
6. Melakukan pengawasan rutin dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan lingkungan.
7. Menggerakkan aksi bersih sampah di bantaran sungai bersama masyarakat dan komunitas peduli lingkungan guna meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.
8. Menetapkan dan mengoptimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai instrumen pengendalian pembangunan berbasis daya dukung lingkungan.
9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah guna memastikan keselarasan antara pembangunan dan prinsip keberlanjutan.
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.
11. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.
12. Membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kecamatan Muara Enim, Rambang, Lembak, Kelekar, Semende Darat Tengah, dan Belida Darat.
13. Melaksanakan pembangunan dan/atau lanjutan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gelumbang tahun 2025 guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah daerah.

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk menunjang peningkatan kinerja, tak dipungkiri terdapat kendala dan hambatan didalamnya seperti terbatasnya kompetensi SDM dalam menginventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga dibantu oleh tenaga ahli, masih ada perusahaan yang belum menyampaikan data rehabilitasi lahan, selain itu juga tidak adanya analis di laboratorium yang menyebabkan terhambatnya analisa parameter pengujian Indeks Kualitas Air (IKA) dan belum maksimalnya pengujian parameter Indeks Kualitas Air (IKA).

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Muara Enim yaitu:

1. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan guna meningkatkan tutupan vegetasi dan memperbaiki kualitas lingkungan.
2. Memperkuat upaya pengendalian pencemaran air melalui koordinasi lintas sektor serta peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar.
3. Meningkatkan kinerja dan optimalisasi pemantauan kualitas lingkungan melalui perangkat Onlimo KLH 108, Onlimo KLH 234, Onlimo KLH 204, serta SPKUA–Air Quality Monitoring System (AQMS).
4. Melaksanakan pembangunan jaringan air bersih, jaringan listrik, serta fasilitas bangunan kompos di TPA Gelumbang guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan DLH, DLHP, dan perangkat daerah terkait dalam rangka penambahan pembangunan TPS 3R di kecamatan dan desa lainnya di Kabupaten Muara Enim.

Program yang mendukung ketercapaian kinerja yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota, Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota. Program penyelenggaraan penataan ruang, program perencanaan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati), program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan.

5. **Analisis Capaian Tujuan 2**
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.11
Analisis Pencapaian Tujuan 2
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks pembangunan ekonomi inklusif	Indeks	5,54	5,62	5,54*	98,57	5,70	5,54*	97,19
Rata – rata capaian kinerja					98,57			97,19

*) Nilai tahun sebelumnya

Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tahun 2025 belum dirilis sehingga menggunakan nilai tahun sebelumnya yaitu 5,54 sehingga capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,57 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 - 2026 capaian kinerjanya sudah tercapai sebesar 97,19 persen.

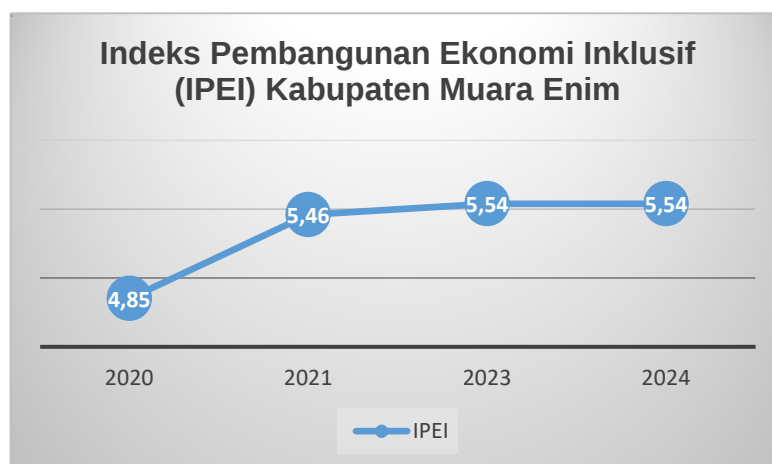
Pembangunan ekonomi inklusif merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada terciptanya pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang inklusif ditandai dengan terbukanya akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi, peningkatan partisipasi dalam aktivitas produktif, serta berkurangnya kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah.

Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan proses pertumbuhan yang mampu memperluas kesempatan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, pasar, lapangan kerja, serta layanan dasar sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang mendorong pemerataan kesempatan, mengurangi ketimpangan sosial dan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi pada tingkat nasional maupun daerah. Pengukuran IPEI disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan ekonomi yang didukung oleh delapan subpilar dan dua puluh satu indikator.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Muara Enim beberapa tahun terakhir sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses usaha, memperkuat sektor riil daerah, serta mendorong pemerataan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan wilayah. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan melalui :

- a) Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata secara optimal guna meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Muara Enim.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif bagi tenaga kerja bidang pariwisata melalui berbagai pelatihan, promosi wisata, serta penyelenggaraan event daerah sebagai sarana peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

- c) Pemerintah daerah juga melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.
 - d) Dukungan lainnya dilakukan melalui keikutsertaan dalam gelar pameran kepariwisataan, pelaksanaan pendidikan ekonomi kreatif, festival ekonomi kreatif, fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata, serta pembinaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
2. Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Penguatan UMKM dilaksanakan melalui berbagai intervensi kebijakan yang mencakup :
- a) Fasilitasi akses permodalan UMKM, melalui pelaksanaan pendataan UMKM sebagai dasar pemberian bantuan permodalan.
 - b) Fasilitasi pelatihan UMKM, antara lain pelatihan penggunaan *Platform E-commerce* Shopee untuk penjualan serta pendampingan penyusunan legalitas perizinan UMKM.
 - c) Pemberian sarana produksi UMKM, berupa mesin jahit, alat perbengkelan, alat prasmanan, alat pertukangan, mesin kopi, alat pembuat keripik, dan peralatan produksi lainnya.
3. Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha
- a) Untuk memperluas kesempatan usaha dan penciptaan lapangan kerja, dilakukan peningkatan pelayanan perizinan berusaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahun 2025 jumlah izin yang diterbitkan melalui sistem OSS sebanyak 5.119 NIB.
 - b) Pendampingan dilakukan melalui inovasi "Terus Jempol Membara" (Penerbitan Izin Usaha melalui Jemput Bola) di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Empat Petulai Dangku sebanyak 19 NIB, Kecamatan Gunung Megang sebanyak 40 NIB, Kecamatan Rambang sebanyak 18 NIB, Kecamatan Semende Darat Tengah sebanyak 12 NIB, Kecamatan Semende Darat Ulu sebanyak 2 NIB.
 - c) Fasilitasi kemitraan pelaku usaha dengan UMKM.
4. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

- a) Memberikan pelatihan bagi Industri Kecil dan Menengah meliputi pelatihan pangan olahan.
- b) Sosialisasi mutu produk kopi, serta sosialisasi industri hijau.

Kegiatan ini meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar kualitas produk, pengemasan, keamanan pangan, efisiensi produksi, serta penerapan proses produksi ramah lingkungan. Pembinaan tersebut mendorong peningkatan kreativitas pemanfaatan bahan baku lokal, memperluas peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif antara lain sebagai berikut :

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata
Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata dilakukan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan objek wisata daerah sehingga tetap layak, aman, dan nyaman bagi wisatawan. Kondisi destinasi yang terawat diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata, mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar destinasi melalui peningkatan aktivitas usaha lokal.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dan masyarakat lokal agar mampu berperan aktif dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di sektor pariwisata.
3. Keikutsertaan dalam gelar pameran kepariwisataan serta pelaksanaan pendidikan ekonomi kreatif
Kabupaten Muara Enim akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran kepariwisataan sebagai sarana promosi potensi wisata daerah sekaligus memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, pelaksanaan pendidikan ekonomi kreatif dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif dalam mengembangkan produk berbasis potensi lokal yang memiliki nilai tambah ekonomi.
4. Pelaksanaan festival ekonomi kreatif
Festival ekonomi kreatif dilaksanakan sebagai media promosi produk lokal

sekaligus mendorong kreativitas pelaku ekonomi kreatif daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha kreatif masyarakat.

5. Fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata
Fasilitasi sertifikasi kompetensi dilakukan guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja sektor pariwisata sehingga mampu memenuhi standar pelayanan industri pariwisata. Peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah.
6. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata
Pembinaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan usaha pendukung pariwisata, seperti kuliner, kerajinan, homestay, dan jasa wisata lainnya sehingga manfaat pertumbuhan sektor pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
7. Pemutakhiran data UMKM secara berkala
Pemutakhiran data UMKM dilakukan guna menyediakan basis data yang akurat dan terkini sebagai dasar perumusan kebijakan serta pemberian bantuan dan fasilitasi usaha secara tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.
8. Pelaksanaan pendampingan pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pendampingan pelayanan NIB pada tahun 2026 dilakukan untuk mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga proses legalitas usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau serta mampu mendorong formalitas usaha masyarakat.
9. Partisipasi dalam kegiatan promosi investasi
Pemerintah daerah akan mengikuti kegiatan promosi investasi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional guna memperkenalkan potensi unggulan daerah serta menarik minat investor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pelaksanaan berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan inklusif.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di dukung oleh program dari dua sasaran strategis yaitu meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

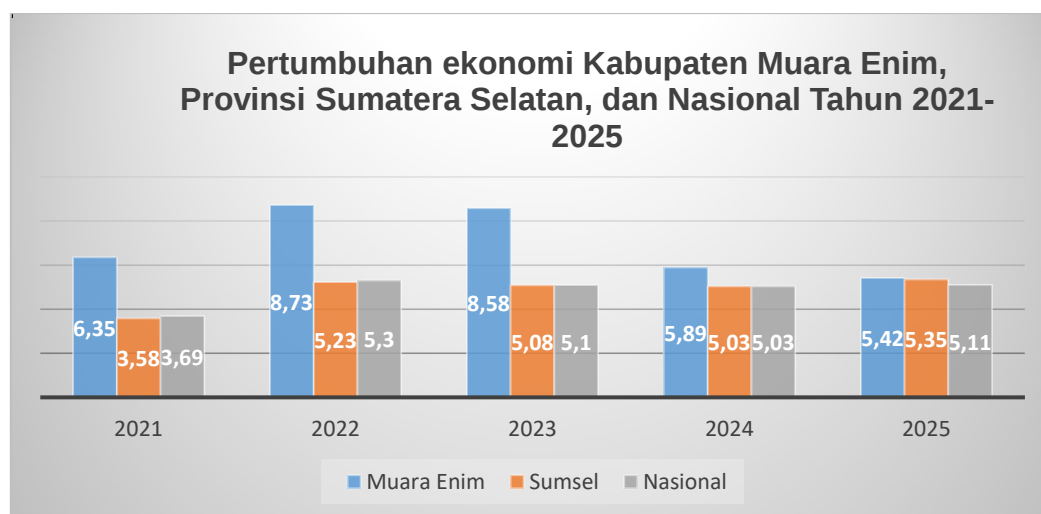
6. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal

Tabel 2.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,89	7,01	5,42	77,31	7,44	5,42	72,85
Rata – rata capaian kinerja					77,31			72,85

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 5,42 persen dengan capaian kinerja 77,31 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 72,85 persen.

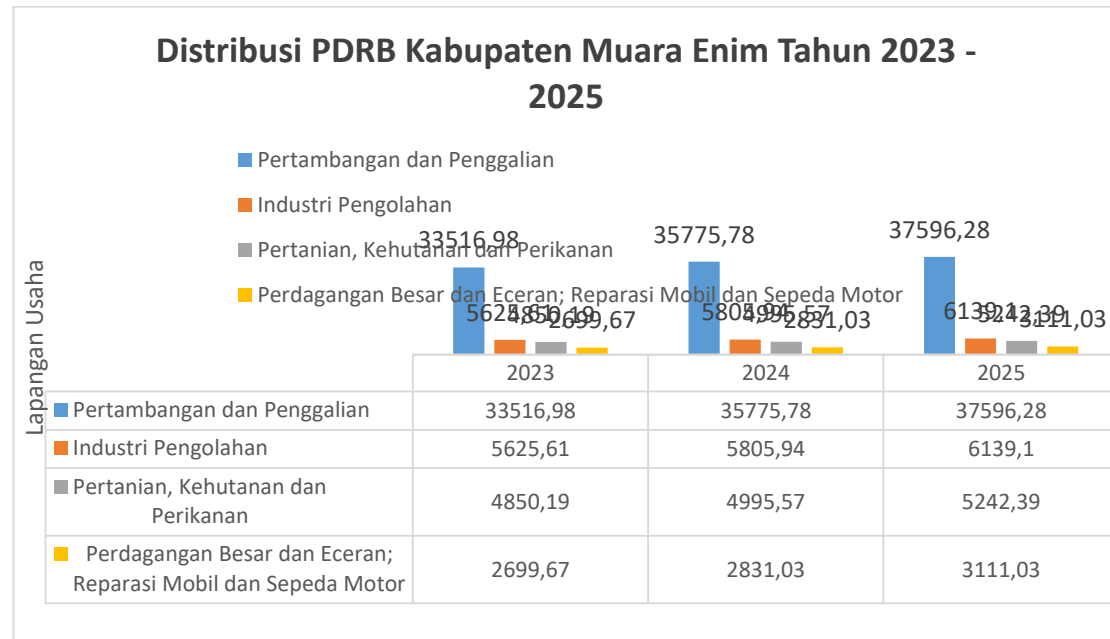
Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,35 persen dan Nasional sebesar 5,11 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di daerah dihitung dengan mengukur persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) antara dua periode biasanya tahunan.

Berdasarkan harga konstan terdapat empat sektor yang dominan memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB yaitu :



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan sektor pariwisata, UMKM, investasi, serta industri kecil dan menengah, antara lain:

1. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata serta pelaksanaan promosi wisata dan penyelenggaraan berbagai event daerah guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Pendataan UMKM sebagai dasar pemberian bantuan permodalan agar program lebih tepat sasaran
3. Pelatihan penggunaan *platform digital* seperti Shopee untuk pemasaran produk.
4. Pendampingan penyusunan legalitas usaha dan perizinan UMKM

5. Pemberian sarana produksi bagi pelaku UMKM berupa mesin jahit, peralatan bengkel, alat prasmanan, peralatan pertukangan, mesin kopi, alat produksi keripik, dan peralatan usaha lainnya
6. Promosi dan pemasaran produk UMKM melalui *e-commerce* lokal Ambung E-Mac serta melalui kegiatan Expo, Bazar UMKM, Gebyar UMKM, APKASI, dan Dekranasda.
7. Pelaksanaan inovasi Terus Jempol Membara (Jemput Bola Pelayanan Perizinan) di beberapa kecamatan.
8. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pelatihan pangan olahan, pelatihan sandang (mencukit songket), sosialisasi mutu produk kopi, serta penerapan industri hijau guna meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing usaha.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, pelaku usaha memperoleh peningkatan kapasitas produksi, inovasi usaha, serta akses pasar yang lebih luas sehingga turut membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah yaitu belum tersedianya data UMKM yang lengkap dan mutakhir, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan dan bantuan usaha belum sepenuhnya optimal dan tepat sasaran.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Partisipasi dalam gelar pameran kepariwisataan.
3. Pelaksanaan festival ekonomi kreatif sebagai sarana promosi dan peningkatan kreativitas pelaku ekonomi kreatif.
4. Fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata.
5. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam pengembangan serta pengelolaan destinasi pariwisata.
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata.
7. Pemutakhiran data UMKM secara berkala.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pelaku usaha.
9. Pendampingan pelayanan penerbitan NIB pada tahun 2026 guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.

10. Peningkatan investasi daerah.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan promosi investasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
12. Melanjutkan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025–2045.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program peningkatan daya tarik pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif, program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program pengembangan ekspor, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

7. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

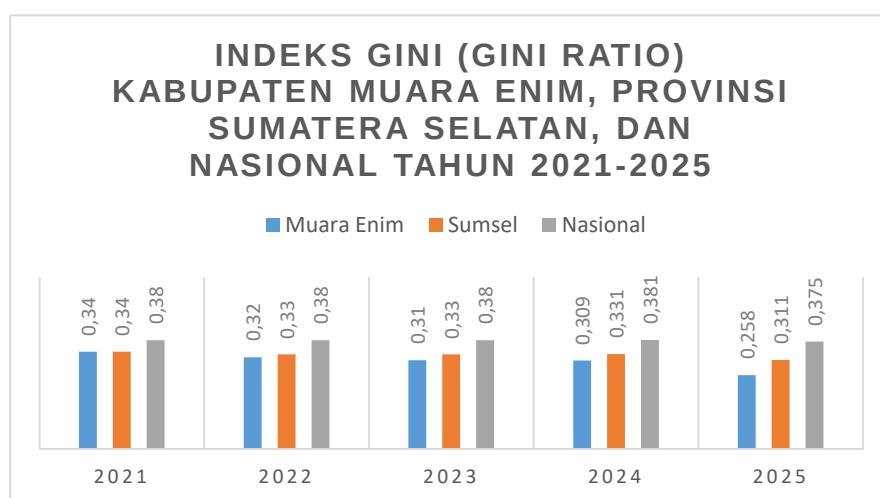
Tabel 2.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024- 2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks gini	Indeks	0,309	0,318	0,258	123,26	0,317	0,258	122,87

Rata – rata capaian kinerja			123,26			122,87
------------------------------------	--	--	---------------	--	--	---------------

Indeks Gini Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 0,258 dengan capaian kinerja sebesar 123,26 persen dan berada pada kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026, capaian kinerja indikator ini mencapai 122,87 persen, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat relatif rendah serta distribusi pendapatan yang semakin merata.

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menggambarkan distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat. Nilai indeks gini Kabupaten Muara Enim lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Perubahan nilai Indeks Gini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, kualitas pembangunan manusia, serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan kesenjangan pendapatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pemerataan pendapatan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan

Pada tahun 2025 luas panen tanaman padi di Kabupaten Muara Enim mencapai 35.617 hektar, dengan luas tanam 35.212 Ha dan produktivitas sebesar 58,00 kw/ha, sehingga diperoleh produksi padi sebesar 206.611,43 ton Gabah Kering Panen. Pencapaian tersebut didukung melalui berbagai program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, antara lain:

- 1) Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija seluas 2.234 Ha
- 2) Optimalisasi peningkatan indeks pertanaman seluas 2.000 Ha melalui bantuan benih padi.
- 3) Pengawasan mutu benih dan bantuan benih padi pokok, pupuk urea, pupuk NPK serta kantong benih untuk penangkaran seluas 50 Ha.
- 4) Pengendalian organisme pengganggu tanaman melalui penyediaan fungisida sebanyak 200 botol, rodentisida 400 kg, molustisida 800 bungkus, dan bio-insektisida 1.000 sachet.
- 5) Penanganan dampak perubahan iklim melalui bantuan benih kacang tanah sebanyak 5.000 kg.
- 6) Bantuan pasca bencana berupa terpal jemur 17 lembar dan power thresher 2 unit.
- 7) Pembangunan dan pemeliharaan embung pertanian sebanyak 6 unit.
- 8) Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 114 unit.
- 9) Pembangunan irigasi usaha tani sebanyak 27 unit.
- 10) Pengadaan alat dan mesin pertanian dalam pengelolaan LP2B dan KP2B.

2. Pengembangan Produksi Sayuran Unggulan

Upaya peningkatan produksi sayuran dilakukan melalui :

- 1) Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian berkualitas serta pelaksanaan gerakan tanam bawang merah, kentang, dan cabai di Balai Benih Aur Duri Desa Tenam Bungkok. Bantuan yang diberikan meliputi benih cabai 1500 gram kepada 9 kelompok tani, benih kentang 2400 gram kepada 3 kelompok tani, benih tomat 600 gram kepada 4 kelompok tani, Benih bawang merah 4800 gram kepada 5 kelompok tani, Pupuk NPK 2.900 kg, pupuk organik 38 liter, mulsa 112 roll, dan pupuk kandang 10.000 kg, bantuan bibit cabai 10.000 batang, bantuan pengendalian inflasi berupa benih

cabai 1250 gram, benih bawang merah 2500 kg, pupuk NPK 1400 kg, dan mulsa 63 roll.

- 2) Pengembangan tanaman pekarangan melalui bantuan berbagai benih sayuran, herbisida, insektisida, pupuk NPK dan pupuk organik
- 3) Program prioritas Pupuk Membara sebanyak 142857 kg.
3. Pengembangan buah-buahan unggulan

Peningkatan produksi buah dilakukan melalui pemberian bibit alpukat, durian, mangga, dan sawo kepada kelompok tani serta bantuan pupuk NPK dan pupuk organik. Selain itu diberikan bantuan bibit buah untuk Kecamatan Lubai berupa alpukat 400 batang, durian 400 batang, mangga 400 batang, lengkeng 400 batang
4. Peningkatan Produksi Peternakan

Upaya peningkatan produksi peternakan dilakukan melalui :

 - 1) Pengadaan ternak sapi dan kambing pada kelompok tani.
 - 2) Penerapan teknologi inseminasi buatan.
 - 3) Penyediaan obat-obatan, vitamin, hormon dan vaksin ternak.
 - 4) Pengadaan ayam buras dan itik guna peningkatan produksi telur.
 - 5) Pengembangan agribisnis peternakan serta penguatan database peternakan.
5. Penguatan sarana pascapanen perkebunan
 - 1) Dilakukan pemberian sarana pasca panen karet sebanyak 5 UPPB berupa bak pembeku 500 unit, timbangan digital 20 unit, dan zat pembeku karet 5.000 kg.
 - 2) Sarana pasca panen kopi kepada 9 kelompok tani berupa solar dryer 2 unit, huller 8 unit, dan terpal jemur kopi 200 lembar.
6. Pengembangan Sektor Perikanan
 - 1) Penyaluran bantuan sarana perikanan kepada 104 kelompok perikanan.
 - 2) Bantuan alat pengolahan hasil perikanan kepada 110 penerima (UPI).
 - 3) Pelatihan budidaya perikanan kepada 30 kelompok.
 - 4) Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan bagi 14 kelompok.
7. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
 - 1) Pembangunan tembok penahan tanah/bronjong di berbagai kecamatan.
 - 2) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
 - 3) Pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase lingkungan dan perkotaan.
 - 4) Pembangunan jalan baru, peningkatan kondisi jalan, pelebaran jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan di berbagai kecamatan.

5) Penetapan RTRW dan RRTR serta koordinasi pemanfaatan ruang daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat antara lain :

1. Pemanfaatan lahan yang belum optimal akan ditingkatkan melalui pembinaan berkelanjutan kepada kelompok tani, kelompok alsintan, dan P3A guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani melalui diversifikasi usaha tani dan penerapan teknologi tepat guna.
2. Penguatan program pemanfaatan pekarangan melalui OPAL. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman serta pembangunan *green house* dan *screen house* akan terus dikembangkan guna meningkatkan produksi pangan rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
3. Adaptasi perubahan iklim pada produksi padi. Dilakukan melalui penyusunan peta kerentanan wilayah, *roadmap* adaptasi perubahan iklim, penggunaan varietas unggul serta teknologi pengelolaan lahan dan air.
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dilanjutkan melalui penyusunan Peraturan Daerah LP2B guna memperkuat perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan.
5. Peningkatan daya saing produk pertanian. Dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kualitas produksi, serta perluasan akses pasar produk pertanian.
6. Pengendalian Inflasi sektor pertanian. Dilakukan melalui penyediaan benih padi, pupuk NPK, serta bantuan bibit cabai dan bawang merah guna menjaga stabilitas produksi dan harga pangan.
7. Penguatan subsektor peternakan melalui pengawasan peredaran bibit ternak, bantuan ternak kepada kelompok tani, serta pembangunan Rumah Potong Hewan secara bertahap pada tahun 2026.
8. Peningkatan akses pemasaran produk pertanian dan peternakan. Dilaksanakan melalui penyelenggaraan pasar tani guna memperluas akses pemasaran dan meningkatkan pendapatan petani dan peternak.
9. Program padat karya yang melibatkan masyarakat di desa / kelurahan.
10. Memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
11. Pendampingan usaha kecil secara intensif baik dari sisi produksi, kemasan maupun digital marketing.

12. Pengembangan sentra produk unggulan desa.
13. Fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan.
14. Pembangunan infrastruktur yang menunjang akses produksi dan distribusi.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian, program perizinan usaha pertanian, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan permukiman, program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi, program peningkatan kerjasama desa.

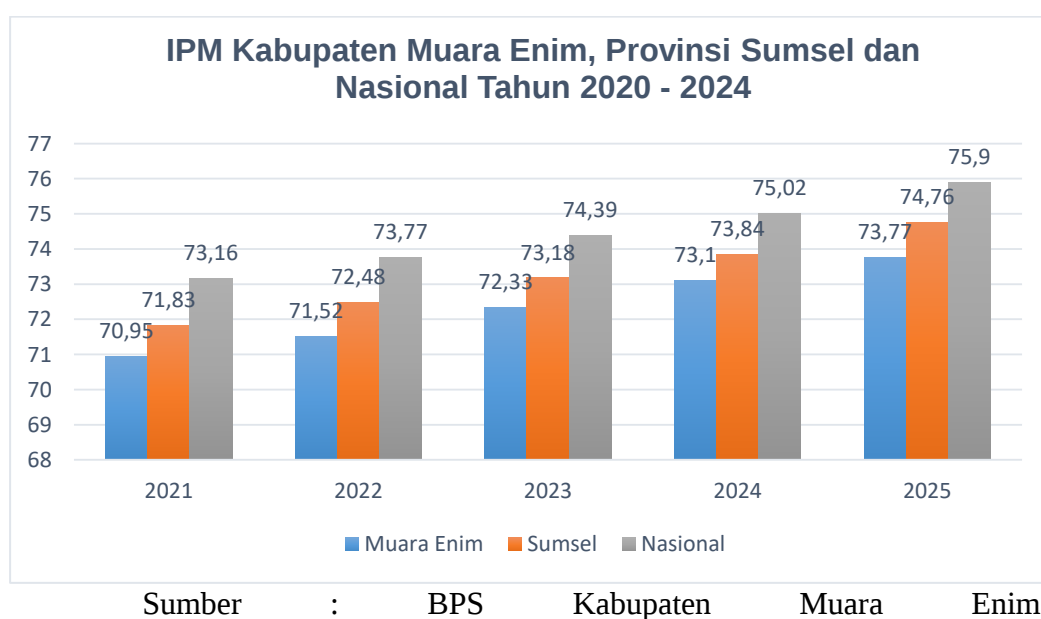
8. Analisis Capaian Tujuan 3 Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia

Tabel 2.14
Analisis Pencapaian Tujuan 3
Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,1	70,15	73,77	105,16	70,51	73,77	104,62
Rata – rata capaian kinerja					105,16			104,62

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2025 dari target IPM sebesar 70,15 terealisasi sebesar 73,77 dengan capaian kinerja sebesar 105,16 persen berada dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 - 2026 capaian kinerjanya sebesar 104,62 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan sehat yang tercermin dari angka harapan hidup, pengetahuan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang dicerminkan oleh pengeluaran per kapita riil. IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2025 masih berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74.76 dan IPM Nasional sebesar 75.90.



Kabupaten Muara Enim telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya sebagai berikut:

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

1. Gerakan perbaikan gizi dan edukasi gizi keluarga.
2. Pelayanan imunisasi dan deteksi dini penyakit.
3. Optimalisasi Posyandu dan Puskesmas untuk memperluas akses layanan kesehatan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan cek kesehatan keliling (cekling).
5. Penerapan pendekatan pelayanan kesehatan berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui pengembangan puskesmas serta rehabilitasi puskesmas sesuai standar pelayanan.
6. Peningkatan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan.

7. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, media edukasi kesehatan, serta kampanye perilaku hidup sehat di masyarakat.
8. Selain itu, indikator pendukung kesehatan keluarga menunjukkan capaian yang relatif baik, khususnya pada akses air bersih, sanitasi layak, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap, serta kepesertaan jaminan kesehatan.

B. Dimensi Pengetahuan

1. Pelatihan kompetensi guru.
2. Pelatihan wirausaha produktif.
3. Pengembangan UMKM berbasis komoditas unggulan.
4. Melaksanakan program penanganan kemiskinan ekstrem.
5. Optimalisasi layanan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
6. Peningkatan akses infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan.
8. Optimalisasi pelaksanaan program wajib belajar.
9. Melaksanakan program wajib belajar melalui peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.
10. Menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pendidikan nonformal dan kesetaraan guna mendukung operasional satuan pendidikan.
11. Memberikan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, atribut sekolah, dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
12. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan guna menekan angka putus sekolah.
13. Mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan kegiatan pembelajaran masyarakat.
14. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan;
15. Sinergi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan masyarakat.

C. Dimensi Standar Hidup Layak

1. Pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Pemerintah Provinsi sebagai upaya perlindungan pendapatan pekerja.
2. Pembangunan dan perbaikan sarana perdagangan guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Pelaksanaan operasi pasar murah di 44 lokasi pada 22 Kecamatan.
4. Pelaksanaan Program Sembako Murah Membara di 22 Desa.
5. Kerja sama dengan BULOG dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.
6. Pengawasan harga kebutuhan pokok secara rutin untuk menjaga stabilitas harga.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus memperkuat pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan upaya sebagai berikut :

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP).
2. Memperkuat pelayanan promotif dan preventif melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat serta pengendalian penyakit tidak menular.
4. Mendorong perubahan perilaku hidup sehat, khususnya pengurangan kebiasaan merokok di lingkungan keluarga.
5. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

B. Dimensi Pengetahuan :

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan pada seluruh wilayah.
2. Menekan angka putus sekolah melalui penguatan program wajib belajar.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan sarana prasarana sekolah.
4. Memperluas dukungan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

5. Memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam peningkatan partisipasi pendidikan. Menyusun program bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
6. Mengoptimalkan penerapan sistem zonasi pendidikan untuk pemerataan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah.
7. Mengembangkan sekolah terbuka dan pendidikan jarak jauh sebagai alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil maupun peserta didik yang memiliki keterbatasan akses.
8. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses pembelajaran yang berkualitas.
9. Memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan.

C. Dimensi Standar Hidup Layak :

1. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja melalui kebijakan pengupahan daerah.
2. Memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
3. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi barang.
4. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan guna mendukung aktivitas ekonomi lokal.
5. Memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
6. Rangkaian intervensi tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal sehingga mendukung peningkatan pengeluaran per kapita riil masyarakat.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia di dukung oleh program dari dua sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat.

9. Capaian Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

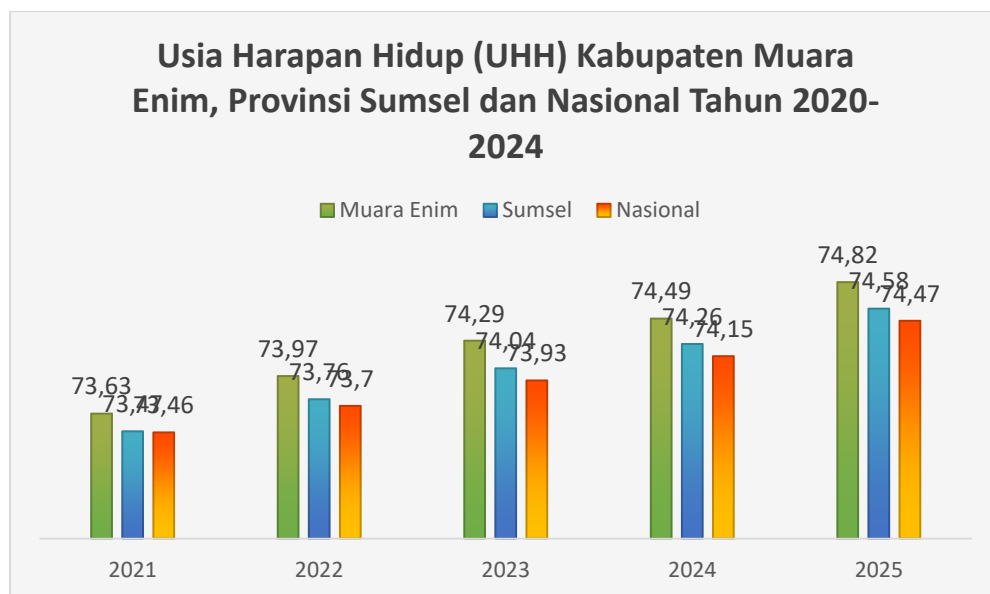
Tabel 2.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Usia Harapan Hidup (UHH)	Indeks	74,49	69,88	74,82	107,07	70,05	74,82	106,81
Rata – rata capaian kinerja					107,07			106,81

Usia Harapan Hidup (UHH) atau *life expectancy* adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola kematian di wilayah tersebut tidak berubah. Ini adalah indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk di suatu wilayah. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan UHH menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan, akses layanan kesehatan, serta keberhasilan pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan.

Pada Tahun 2025, target UHH Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebesar 69,88 tahun. Realisasi yang dicapai sebesar 74,82 tahun atau 107,07 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 dengan capaian kinerja sebesar 106,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Muara Enim berada pada jalur yang sangat baik.

Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat yang lebih luas, UHH Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 (74,82 tahun) lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,58 tahun serta UHH Nasional sebesar 74,47 tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim didukung oleh beberapa upaya yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan cek kesehatan keliling (cekling).
2. Penerapan pendekatan pelayanan kesehatan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Puskesmas dan jajarannya.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui pengembangan Puskesmas serta rehabilitasi Puskesmas pembantu (Pustu) sesuai standar Integrasi Layanan Primer (ILP).
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan kader Posyandu melalui pelatihan kader secara berkelanjutan.
5. Penguatan pelayanan promotif dan preventif di masyarakat melalui penyuluhan kesehatan, media edukasi kesehatan, serta kampanye perilaku hidup sehat.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian Usia Harapan Hidup pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
3. Memperkuat implementasi Integrasi Layanan Primer di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan edukasi kesehatan secara berkelanjutan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

10. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat

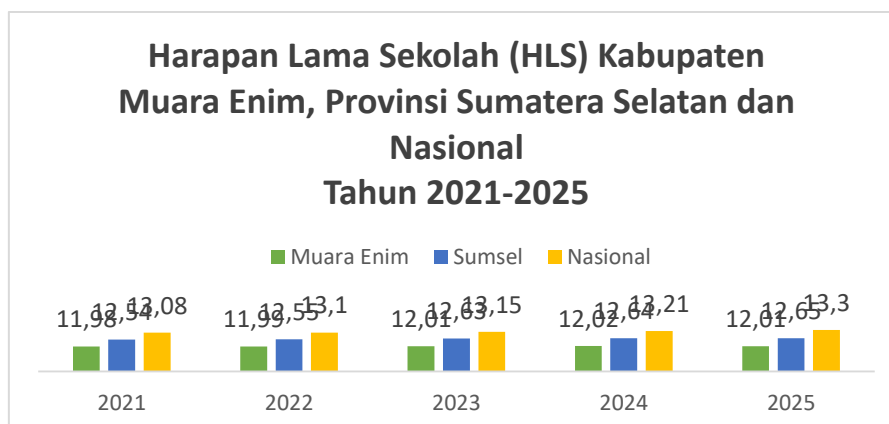
Tabel 2.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Angka Harapan Lama Sekolah (AHH)	Angka	12,02	12,01	12,03	100,17	12,02	12,03	100,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	8,27	8,06	8,45	104,84	9,00	8,45	93,88
Rata – rata capaian kinerja					102,51			96,98

Sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat terdiri dari dua indikator sasaran yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tahun 2025 dari target AHH sebesar 12,01 terealisasi sebesar 12,03 dengan capaian kinerja 100,17 persen berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya telah tercapai sebesar 100 persen.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim sebesar 12,03 tahun menunjukkan bahwa rata-rata anak usia sekolah di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat menempuh pendidikan formal hingga 12,03 tahun atau setara

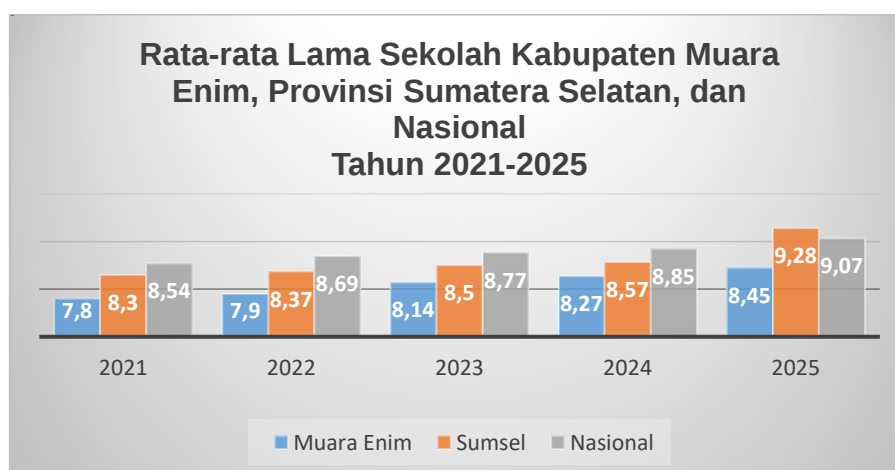
dengan penyelesaian pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Harapan Lama Sekolah tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 8,45 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 8,06 tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 104,84 persen dan berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026, capaian kinerja indikator RLS telah mencapai 93,88 persen.

Nilai Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,45 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Muara Enim telah menempuh pendidikan formal selama 8,45 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,03 tahun, masih terdapat kesenjangan sekitar 3,58 tahun antara harapan lama sekolah dan capaian rata-rata lama sekolah penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk, khususnya kelompok usia dewasa dan lanjut usia, belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas karena mayoritas memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Sementara itu, generasi usia muda umumnya telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat. Perbedaan tingkat pendidikan antar kelompok usia tersebut menyebabkan rata-rata lama sekolah secara keseluruhan masih berada pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin melalui indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai upaya antara lain:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui penyelenggaraan program wajib belajar pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
2. Memberikan dukungan bantuan pendidikan melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta pendidikan nonformal dan kesetaraan.
3. Menyediakan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, atribut sekolah, dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP guna mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan melalui penguatan peran satuan pendidikan formal dan nonformal.
5. Melakukan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pendidikan sehingga capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian masih bekerja di sektor informal dan pertambangan sehingga mendorong peserta didik untuk memasuki dunia kerja lebih awal, keterbatasan akses pendidikan

menengah di wilayah tertentu, serta belum optimalnya partisipasi pendidikan nonformal dan kesetaraan.

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pendidikan dan memperkecil kesenjangan antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun program bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.
2. Mengoptimalkan penerapan sistem zonasi pendidikan untuk meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan.
3. Mengembangkan sekolah terbuka dan pendidikan jarak jauh sebagai alternatif layanan pendidikan bagi wilayah dengan keterbatasan akses.
4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang kualitas proses pembelajaran.
5. Memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
6. Meningkatkan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan partisipasi sekolah serta menekan angka putus sekolah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum dan program pendidik dan tenaga kependidikan

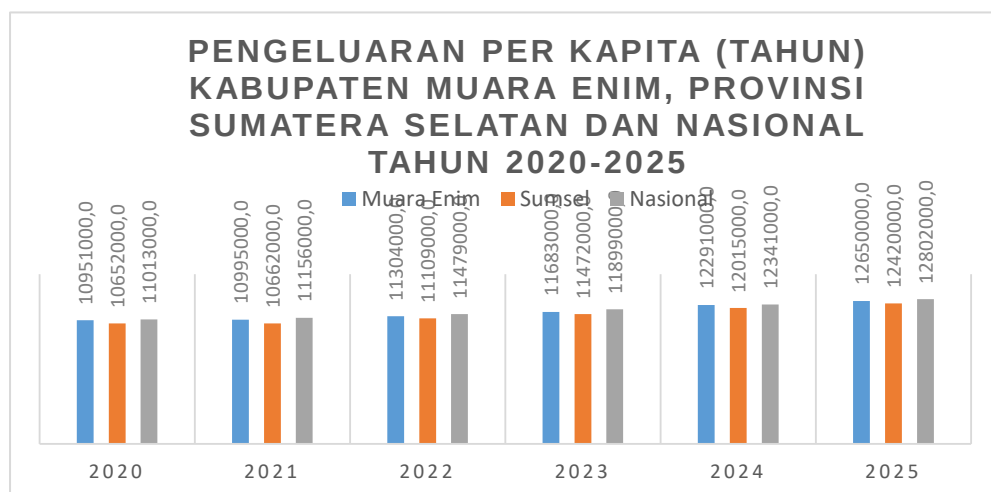
11. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan daya beli masyarakat

Tabel 2.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta	12.291	11.597	12.65	109,08	11.744	12.65	107,71
Rata – rata capaian kinerja					109,08			107,71

Realisasi indikator sasaran meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar Rp. 12.650.000 dari target Rp. 11.597.000 sehingga capaian kinerjanya sebesar 109,08 persen berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 107,71 persen. Angka pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 (menggunakan metode baru) adalah sebesar Rp. 12.650.000 juta rupiah per orang/tahun. Angka ini menempatkan Muara Enim sebagai salah satu wilayah dengan pengeluaran per kapita yang cukup tinggi di Sumatera Selatan.

Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Muara Enim tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di Provinsi Sumatera Selatan namun lebih rendah daripada pengeluaran per kapita Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang dimiliki. Daya beli akan berkaitan dengan tingkat konsumsi, harga, dan pendapatan. Masyarakat dengan daya beli yang rendah atau memiliki pendapatan yang relatif kecil akan mengkonsumsi produk dengan harga yang relatif lebih murah dan jumlah yang lebih sedikit. Keadaan tersebut terjadi agar masyarakat dalam ekonomi tertentu mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya terutama kebutuhan primer. Berbagai faktor dapat mempengaruhi daya beli masyarakat seperti inflasi, nilai dari PDRB, dan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Penurunan daya beli masyarakat akan berdampak langsung pada konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat antara lain :

1. Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dengan standar kurikulum pelatihan, antara lain pelatihan menjahit, tata boga, servis AC, pengoperasian alat berat, pengelasan, serta komputer dasar guna meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja masyarakat.
2. Pemberian bantuan peralatan usaha kepada peserta pelatihan, khususnya pelatihan tata boga, sebagai bentuk dukungan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan penciptaan usaha baru.
3. Pembangunan dan perbaikan sarana perdagangan berupa pasar rakyat guna meningkatkan kelancaran distribusi barang serta kenyamanan aktivitas perdagangan masyarakat.
4. Pelaksanaan operasi pasar murah di 44 lokasi pada 22 kecamatan serta program Sembako Murah Membara di 22 desa untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bahan pokok.
5. Kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Perum Bulog, dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok guna memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat.
6. Pelaksanaan pengawasan harga bahan pokok secara rutin untuk mengendalikan potensi gejolak harga di pasaran.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat antara lain:

1. Pelaksanaan program pemagangan bagi peserta pelatihan keterampilan guna meningkatkan pengalaman kerja serta memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja.
2. Pelaksanaan pelatihan Bahasa Jepang bagi peserta yang lulus seleksi program pemagangan ke luar negeri sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peluang kerja internasional.
3. Peningkatan pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
4. Penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkelanjutan.
5. Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar dan intervensi harga pada periode rawan inflasi seperti hari besar keagamaan nasional.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain program hubungan industrial, program perekonomian dan pembangunan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

12. Analisis Capaian Tujuan 4 Meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan

Tabel 2.18
Analisis Pencapaian Tujuan 4
Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B*	B	B*	100	B	B*	100
Rata – rata capaian kinerja					100			100

*Nilai sementara dari Portal RB per Januari 2026

Target capaian tujuan meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan dengan indikator sasaran indeks reformasi birokrasi saat ini hasilnya belum dirilis oleh Kementerian PAN RB sehingga masih menggunakan data capaian sementara pada portal RB per Januari 2026 dengan capaian kinerja 100 persen berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya telah tercapai 100 persen.

Adapun indeks reformasi Kabupaten Muara Enim tahun 2021 – 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.19
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim 2021 - 2025

No	Keterangan	Tahun				2025
		2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks reformasi birokrasi	CC (59,42)	B (60,78)	B (63,28)	A- (80,71)	B* (74,94)

*Nilai sementara dari Portal RB per Januari 2026

Sumber: Data diolah

Di tahun 2025 selain menyusun rencana aksi reformasi birokrasi general, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga menyusun rencana aksi reformasi tematik yaitu pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, hilirisasi, ketahanan pangan nasional, kualitas dan akses layanan kesehatan dan peningkatan akses, kualitas dan mutu layanan pendidikan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain :

1. Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP :
 - a) Pendampingan dan asistensi atas tingkat maturitas SPIP pada Perangkat Daerah oleh APIP.
 - b) Pendampingan dan asistensi atas tingkat maturitas SPIP pada Perangkat Daerah oleh BPKP.
 - c) Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d) Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim bagi Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - e) Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah.
 - f) Melakukan pendampingan dengan BPKP untuk penyusunan dokumen risk resiko tingkat PD dan Kabupaten.
2. Pada kegiatan pembangunan ZI dilakukan pendampingan, asistensi dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan.
3. Menetapkan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Pejabat Fungsional Statistisi serta Pejabat Fungsional Pranata Komputer, menyusun SOP/Petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata, interoperabilitas dan kode referensi serta mengusulkan permintaan pegawai Pejabat Fungsional Statistisi ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim dan ke BPS RI dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan statistik.
4. Pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI Versi 3 baik yang dilaksanakan di Depo Arsip maupun ke Perangkat Daerah.
5. Melakukan audit kearsipan di Perangkat Daerah dan kecamatan sekaligus pembinaan dan sosialisasi aplikasi SRIKANDI.
6. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.

7. Menyusun dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Sosialisasi capaian IPAK dan penyampaian program pencegahan korupsi daerah.
10. Evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa dan pengoptimalan probity audit berkala pada pengadaan barang/jasa.
11. Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan SKM online ke Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
12. Penyusunan pemutakhiran data talent pool ASN berbasis kompetensi dan potensi.
13. Telah dilakukan penguatan regulasi internal untuk mendukung penempatan pegawai berbasis sistem merit.
14. Optimalisasi pemanfaatan SIASN dalam pengelolaan kepegawaian berbasis digital.
15. Pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian daerah dengan platform nasional.
16. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kepegawaian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi layanan ASN.
17. Memberikan *reward* berupa piagam penghargaan, lencana kepada pegawai di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
18. Memberikan *punishment* berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada setiap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kehadiran.
19. APIP Inspektorat melakukan evaluasi internal Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah per triwulan.
20. Pada kegiatan pembangunan ZI dilakukan pendampingan, asistensi dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan.
21. Menetapkan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Pejabat Fungsional Statistisi serta Pejabat Fungsional Pranata Komputer, menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata, interoperabilitas dan kode referensi serta mengusulkan permintaan pegawai Pejabat Fungsional Statistisi ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim dan ke BPS RI dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan statistik.
22. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.

23. Menyusun Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan *launching* budaya kerja BerAKHLAK.
24. Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan SKM online ke Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
25. Melakukan pendampingan penggunaan e-Katalog tiap Perangkat Daerah.
26. Melakukan pendampingan & Reviu RUP di dalam aplikasi SIRUP (Stuktur Anggaran & strategi pengadaan).
27. Melakukan koordinasi dan konsolidasi aktif terkait pengadaan barang dan jasa dengan UKPBJ Pembina dan LKPP.
28. Membuka layanan pengadaan secara elektronik untuk penyedia dan non-penyedia di Mall Pelayanan Publik.
29. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKK untuk penggunaan toko DARING & e-katalog.
30. Melakukan pendampingan pemenuhan data e-kontrak.
31. Menginisiasi peningkatan kompetensi SDM PBJ dari personil lainnya.
32. Melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa kepada personil UKPBJ.
33. Pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang disajikan dalam variabel.
34. Mengikuti peluncuran SIA SPBE V2 secara daring.
35. Mengikuti pelatihan bimtek SIA SPBE V2 yang dilakukan oleh Kemenpan RB.
36. Menyusun Dokumen Kebijakan seperti, SK Tim Asessor, SK Bupati Tentang Tim koordinasi SPBE, SK Peta Rencana SPBE, dan SK Arsitektur SPBE TO-BE.
37. Evaluasi mandiri terhadap penerapan pelaksanaan SPBE dengan hasil 3,77.
38. Koordinasi terkait penggunaan indikator pemerintah digital yang akan menggantikan Indeks SPBE Nasional pada dokumen perencanaan pemerintah daerah.
39. Melaksanakan pembinaan statistik sektoral secara berkala setiap tahun dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola data dan mendukung implementasi SPBE.
40. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sektoral, termasuk pemenuhan standar metadata, interoperabilitas, dan kualitas data.
41. Mengikuti dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai bagian dari penguatan tata kelola data dan peningkatan indeks SPBE.

42. Melaksanakan koordinasi dengan pembina data, yaitu BPS Kabupaten, dalam rangka harmonisasi metodologi, standardisasi data, dan peningkatan kualitas statistik sektoral.
43. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta regulasi daerah terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan pelaksanaan penilaian EPSS.
44. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan produsen data di lingkungan Perangkat Daerah untuk memastikan konsistensi, validitas, dan integrasi data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Melakukan internalisasi dan monitoring budaya kerja ASN BerAKHLAK secara berkelanjutan.
2. Melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penilaian kematangan Perangkat Daerah.
3. Melakukan penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025 - 2029.
4. Melakukan evaluasi SOP yang berorientasi pada kecepatan dan kepastian layanan.
5. Menerapkan manajemen talenta ASN secara bertahap.
6. Memperkuat peran APIP dalam evaluasi SAKIP internal dan evaluasi RB.
7. Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai dengan level yang ditargetkan.
8. Mengembangkan zona integritas menuju WBK/ WBBM pada unit pelayanan.
9. Melakukan pendampingan terhadap unit pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
10. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan menindaklanjuti hasil SKM.
11. Menyusun rencana aksi RB Tematik yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025 - 2029.
12. Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam implementasi RB tematik.
13. Meningkatkan penerapan teknologi informasi terkait kepegawaian yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
14. Meningkatkan pendampingan, asistensi dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan sehingga target ZI dapat dicapai.

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan membuat surat edaran kepada Perangkat Daerah untuk mengaktifkan kembali penggunaan aplikasi SRIKANDI.
16. Pengembangan kompetensi SDM PBJ terkait pemenuhan PPK tipe B melalui BKPSDM.
17. Pengembangan dan peningkatan kompetensi fungsional PBJ menuju jenjang JF Ahli Muda & Madya.
18. Mengoptimalkan pemenuhan data e-kontrak.
19. Meningkatkan progress kepatuhan penginputan data ke aplikasi SIRUP.
20. Melaksanakan penelaahan serta inventarisasi kelengkapan dokumen pendukung produk hukum yang diunggah guna memastikan kesesuaian dan validitas data.
21. Konsultasi ke Kementerian PAN RB terkait transformasi Indeks SPBE ke Indeks Pemerintahan Digital, evaluasi mandiri Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital.
22. Melakukan koordinasi penyempurnaan proses bisnis yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD terbaru dengan Bagian Organisasi Setda.
23. Reviu arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menyesuaikan dokumen RPJMD terbaru.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan di dukung program pada empat sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

13. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Tabel 2.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Pengelolaan Keuangan	Indeks	B	B	B*	100	B	B	100

Daerah								
Rata – rata capaian kinerja					100			100

*Nilai Tahun Sebelumnya

Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga masih menggunakan nilai IPKD tahun 2024 yaitu B sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen berada dalam kategori baik. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya telah tercapai 100 persen. Nilai IPKD tahun 2024 merupakan hasil pengukuran IPKD tahun 2023.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah secara objektif, transparan, dan akuntabel. IPKD mengevaluasi efektifitas APBD, mulai dari perencanaan, penyerapan, hingga pertanggungjawaban untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah. IPKD Kabupaten Muara Enim tahun 2024 didapat dengan menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi yaitu :

Tabel 2.11
IPKD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

DIMENSI	TARGET NILAI	TAHUN 2023
Dimensi 1 – Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	11,3935
Dimensi 2 – Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20
Dimensi 3 – Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	13,9655
Dimensi 4 – Penyerapan anggaran	20	15
Dimensi 5 – Kondisi keuangan daerah	15	6,2016
Dimensi 6 – Opini BPK atas LKPD	15	15
TOTAL	100	81,5605
KATEGORI PERINGKAT	A	B

Sumber: <https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id>

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator indeks pengelolaan keuangan daerah antara lain:

A. Dalam pengelolaan keuangan

1. Mensinkronisasikan jumlah program dan kegiatan pada penyusunan KUA-PPAS, penyusunan APBD dengan RKPD
2. Penajaman Indikator *Output* dan *Outcome* di setiap program dan kegiatan
3. Melakukan pendampingan *tagging* sumber dana pada rekening belanja sub kegiatan setiap Perangkat Daerah

4. Mengalokasikan anggaran yang menjadi *mandatory spending* antara lain alokasi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemenuhan alokasi belanja untuk SPM (standar pelayanan minimal) sesuai peraturan perundang-undangan
5. Melakukan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) per triwulan

B. Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi dilakukan melalui :

1. Penyederhanaan Proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pelayanan perizinan satu atap
2. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merivisi kembali peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, pemberian penghargaan.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti melakukan uji petik terhadap objek-objek retribusi daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak dan retribusi.
6. Optimalisasi penagihan piutang pajak dengan melaksanakan penagihan pintu ke pintu dan pelaksanaan pekan pelunasan PBB P2 di Kecamatan dan Desa-desa.

C. Upaya Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah :

1. Menerbitkan Peraturan Daerah Kab. Muara Enim No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selaras dengan UU HKPD.
2. Pengkajian Jenis Retribusi yang tidak layak dan perlu disempurnakan.
3. Melakukan Pendataan terhadap objek pajak daerah yang baru untuk target penerimaan.
4. Mengupayakan peningkatan bagi hasil pajak melalui koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Badan Usaha dalam pembangunan daerah.

Nilai beberapa dimensi pada IPKD yang masih dapat ditingkatkan lagi antara lain dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi penyerapan anggaran serta dimensi kondisi keuangan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IPKD Kabupaten Muara Enim antara lain:

1. Penguatan perencanaan keuangan berbasis kinerja.
2. Menindaklanjuti catatan rekomendasi dari BPK.
3. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola keuangan daerah.
4. Monitoring dan evaluasi berkala dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran.
5. Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan (*coaching clinic*) kepada Perangkat Daerah
6. Memastikan usulan musrenbang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah sehingga program kerja yang dilaksanakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan efisien.
7. Memastikan usulan musrenbang telah diinputkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan
8. Digitalisasi dan integrasi sistem pemungutan, melalui penerapan pembayaran pajak secara elektronik serta pemutakhiran basis data wajib pajak untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penerimaan.
9. Penguatan pengawasan dan pemeriksaan berbasis potensi dan risiko, termasuk pelaksanaan uji petik serta pemanfaatan data pembanding guna meminimalkan kebocoran penerimaan.
10. Optimalisasi penagihan piutang pajak, melalui penagihan aktif, kegiatan pekan pelunasan, serta pemberian stimulus dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan administrasi, dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi SDM, serta penyediaan layanan konsultasi pajak daerah.

12. Evaluasi dan penyempurnaan regulasi daerah, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan serta mendukung optimalisasi penerimaan tanpa menghambat iklim usaha.
13. Pendataan dan validasi objek pajak baru secara berkala, termasuk penertiban objek yang belum terdaftar untuk memperluas basis pajak daerah.
14. Pengembangan dan penyempurnaan jenis retribusi yang potensial, berdasarkan kajian ekonomi agar tidak kontraproduktif terhadap pertumbuhan daerah.
15. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta verifikasi data potensi yang menjadi dasar perhitungan.
16. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha, melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja antara lain program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan pendapatan daerah, program pengelolaan barang milik daerah.

14 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 2.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks SPBE	Indeks	3,29	3,10	3,75	120,97	3,20	3,75	117,19
Rata – rata capaian kinerja					120,97			117,19

Capaian indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Muara Enim dari target 3,10 terealisasi sebesar 3,75 sehingga capaian kinerja tahun 2025 sebesar 129,97 persen. Jika

dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 realisasi indikator kinerja telah melampaui target dengan capaian kinerjanya sebesar 117,19 persen.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE tersebut.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan K/L/D dan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE. Proses penilaian dilakukan dengan metode tertentu oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE, dimana evaluator terdiri dari evaluator internal yakni evaluator yang ditetapkan melalui Kepala K/L/D/Pemkab/Kota dan evaluator eksternal yakni evaluator yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.13
Hasil Penilaian Mandiri
SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Domain	Indeks
	Indeks SPBE	3.75
1.	Domain Kebijakan SPBE	4.90
	- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4.90
2.	Domain Tata Kelola SPBE	3.70
	- Perencanaan Strategis SPBE	3.25
	- Teknologi Komunikasi dan Informasi	3.75
	- Penyelenggara SPBE	4.50
3.	Domain Manajemen SPBE	2.36
	- Penerapan Manajemen SPBE	2.25
	- Pelaksanaan Audit TIK	2.67
4.	Domain Layanan SPBE	3.94
	- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.90
	- Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.00

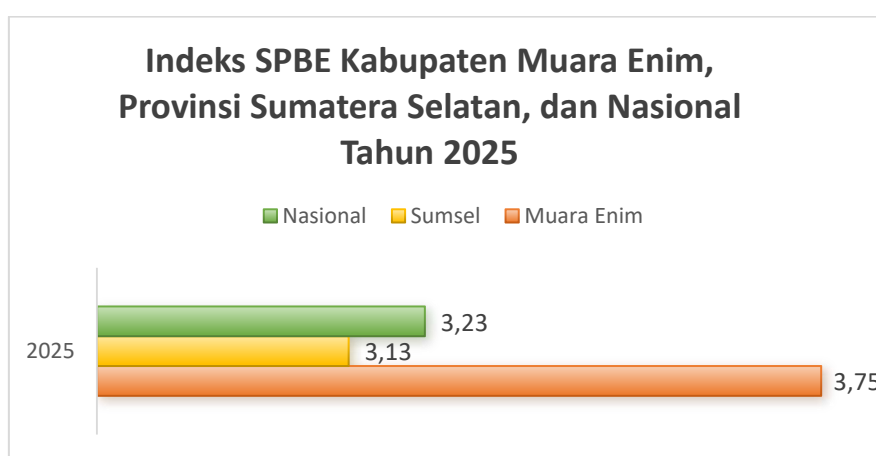
Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Tabel 2.14
Hasil Evaluasi Eksternal Penyelenggaraan SPBE
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Indeks SPBE	3.75
Domain	Indeks
Domain Kebijakan SPBE	4.90
Domain Tata Kelola SPBE	3,70
Domain Manajemen SPBE	2.36
Domain Layanan SPBE	3.94

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Indeks SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

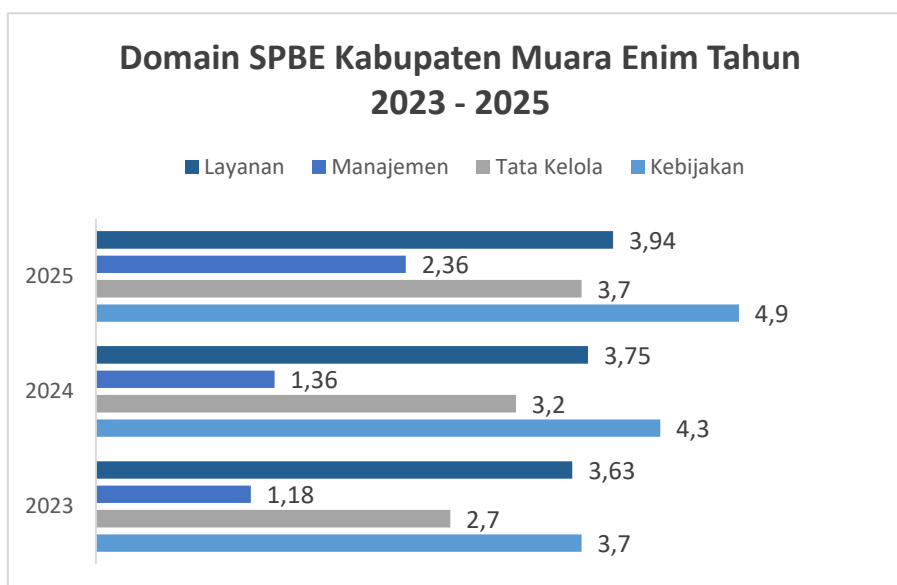
Untuk indeks SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2023 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Hasil Evaluasi Eksternal Penyelenggaraan SPBE
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025

	2023	2024	2025
Indeks SPBE	3,00	3,29	3,75
Domain	Indeks	Indeks	Indeks
Kebijakan	3,70	4,30	4,90
Tata Kelola	2,70	3,20	3,70
Manajemen	1,18	1,36	2,36
Layanan	3,63	3,75	3,94

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Domain SPBE Kabupaten Muara Enim setiap tahun cenderung meningkat.



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 43/KPTS/Diskominfo-SP/2025 tentang Asesor Internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025.

Program kerja yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Mengelar rapat koordinasi tim koordinator SPBE tahun 2025.
2. Mengikuti SPBE SUMMIT tahun 2024 secara daring.
3. Mengikuti peluncuran SIA SPBE v2 secara daring.
4. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SIA SPBE v2 yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB.
5. Menyusun surat keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE tahun 2024.
6. Menyusun surat keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE tahun 2024.

7. Melakukan koordinasi teknis bersama Kementerian PAN RB terkait pendampingan/narasumber kegiatan penyusunan arsitektur SPBE *to-be* dan peta rencana SPBE.
8. Menyusun dokumen arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Menyusun dokumen peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Melakukan sosialisasi penyusunan peta rencana dan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan tim narasumber Kementerian PAN RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
11. Melakukan *Final Meeting* penyusunan peta rencana dan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama tim narasumber Kementerian PAN RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
12. Melakukan koordinasi teknis bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait persiapan audit aplikasi dan infrastruktur TIK.
13. Mengikuti sosialisasi secara daring pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2024.
14. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2024.
15. Mengikuti penilaian interviu pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Peningkatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Muara Enim, didukung dengan adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

Saat ini organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah tengah melakukan manajemen dan pengelolaan instansi pemerintah untuk membangun budaya teknologi informasi yang baik, agar solusi teknologi menjadi maksimal. Menjadi solusi teknologi, kini pemerintah terus melakukan perbaikan sistem pelayanan publik salah satunya dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini sudah menjadi program penting yang bersifat mendesak, sehingga pelaksanaan penerapan SPBE merupakan alat utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan visi SPBE yaitu “Terwujudnya Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi”. Proses birokrasi berbasis digital yang elementer menjadi prioritas dilakukan demi terwujudnya hasil dan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis serta didukung oleh budaya birokrasi yang berintegritas yang tinggi. Dengan demikian, pembangunan dan penerapan SPBE instansi menjadi sangat penting, untuk menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.

Dalam mendukung program penyusunan arsitektur Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan kegiatan evaluasi mandiri SPBE dan penyusunan SPBE dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional.

2. Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah

Pusat kendali Pemerintah Daerah (*Command Center*) diselenggarakan untuk mengintegrasikan pengawasan dan pengambilan keputusan secara *realtime* dalam mendukung SPBE dan layanan publik yang cepat. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk membangun infrastruktur dan penyediaan layanan internet yang ada di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah untuk kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Adapun peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah yang dimaksud adalah perbaikan dan pemeliharaan CCTV.

3. Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

Dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan sistem informasi daerah/aplikasi merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan SPBE, penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi aktifitas organisasi pemerintahan yang menerapkan *e-Government*, sehingga apabila layanan tersebut terhenti maka efeknya timbulnya berbagai resiko operasional.

Desain grafis merupakan salah satu pekerjaan kreatif yang banyak dibutuhkan oleh berbagai instansi maupun perusahaan. Saat ini, berbagai informasi dikemas dengan tampilan visual yang menarik, baik informasi berupa edukasi hingga promosi produk. Selain itu, ilustrasi visual yang dibuat juga memudahkan masyarakat untuk memahami informasi di dalamnya.

Untuk tahun 2025 telah dikembangkan 3 *website/aplikasi* yaitu:

1. *Content Management System (CMS) Website* Membara
2. *Chatbot (Aruna AI)*
3. *Voice chat (Aruna AI)*

Dalam peningkatan pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengembangan *website* desa. Untuk menjalankan *website* desa telah ada program satu desa satu tenaga IT (Informasi Teknologi) pada tahun 2025 telah dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para Tenaga IT agar bisa mengoperasikan *website* desa dengan baik sebanyak 255 peserta dari desa dan kelurahan, kemudian para tenaga IT diberi *template website* serta didukung dengan *hosting* (tempat untuk menyimpan semua *file* dan data, sehingga bisa diakses oleh semua orang melalui internet).

4. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota cerdas

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menginisiasi gerakan menuju 100 kota cerdas (*Smart City*) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden untuk menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Selanjutnya, guna mengawal jalannya pembangunan kota cerdas (*Smart City*) dan juga mengidentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan kota cerdas (*Smart City*), maka sejak tahun 2018 telah dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi *Masterplan* kota cerdas (*Smart City*) yang telah disusun Pemerintah Kota dan Kabupaten. Secara umum penilaian kemajuan pembangunan kota cerdas (*Smart City*) berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan *masterplan* kota cerdas (*Smart City*), dan saran untuk perbaikan untuk Pemerintah Kota atau Kabupaten.

Pada tahun 2025 dalam penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memfasilitasi sewa *wifi* 33 titik dalam mendukung pembangunan Kabupaten Muara Enim menjadi kota cerdas (*Smart City*) terhadap birokrasi, pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan penerapan SPBE dan meningkatnya nilai indeks SPBE sangat didukung dengan Kabupaten Muara Enim merupakan satu dari 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia yang terpilih sebagai *pilot project* dalam program *smart city* atau *smart regency*, dan juga telah membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari :

- Layanan internet pemerintah terpusat
- Pusat data (*data center*) terintegrasi
- Pembangunan jaringan *FO* untuk keamanan data
- Muara Enim *Command Center* atau *MECC*

Untuk mendukung *smart city* telah dipasang akses *wifi* publik di lingkup Kabupaten Muara Enim.

5. Kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka upaya memperluas cakupan pembangunan infrastruktur digital yang dapat dinikmati secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Muara Enim, peran infrastruktur telekomunikasi dalam meningkatkan tingkat teledensitas sangatlah penting. Dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 telah menyiapkan jaringan internet dan pemeliharaan jaringan internet untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu :

- Sewa *Firewall*
- *Metro Ethernet* Dalam Kota 25 Mbps
- *Metro Ethernet* Kecamatan 25 Mbps
- *Metro Ethernet* Puskesmas 25 Mbps
- Sewa *Metro e-UPTD* Bappenda 25 Mbps.

Pemeliharaan jaringan internet 2025:

- Pemeliharaan infrastruktur Fiber Optik
- Pemeliharaan jaringan intra pemerintah

Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan mendukung implementasi SPBE saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber Optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien dengan menggunakan sewa *metro ethernet* untuk Kecamatan. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap Perangkat Daerah dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk Kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO nya dan sampai dengan tahun 2025 ini masih sewa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan sewa jaringan *Online/Internet/ Bandwidth* internet dengan kecepatan 600 Mbps.

6. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik

Kegiatan ini dilakukan dengan mengecek terhadap barang-barang yang berada di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan penyadapan / *surveillance* seperti *hidden camera*, *button camera*, *security camera*, *spy camera*, *stealth wireless headset*, *wireless pinhole camera*, *wireless tapping* dan perangkat sadap lainnya, melakukan analisis dan melokalisir alat sadap, sehingga ruangan menjadi steril dari alat penyadap. Dengan dilaksanakannya kegiatan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik/kontra penginderaan agar aset / fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menjadi

terlindungi dari upaya pencurian informasi yang menggunakan alat penyadap *Radio Frequency (RF)* yang mungkin dipasang permanen oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara ilegal.

Pada tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan lokasi/tempat sebagai berikut :

- Ruang Kerja Bupati Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Bupati Muara Enim
- Ruang Kerja Sekretaris Daerah
- Ruang Rapat Bupati Muara Enim
- Rumah Dinas Bupati Muara Enim
- Rumah Dinas Wakil Bupati Muara Enim
- Mobil Dinas Bupati Muara Enim
- Mobil Dinas Wakil Bupati Muara Enim
- Ruang Kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang kerja Perangkat Daerah dan sarana lainnya (jika ada permintaan dari Perangkat Daerah terkait).

7. Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk dalam penyediaan layanan publik, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan data di daerah. Namun, kemajuan tersebut diikuti dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi, seperti kebocoran data, serangan siber, serta potensi penyalahgunaan sistem informasi.

Ancaman ini dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan operasional pemerintahan, kerahasiaan data, serta kepercayaan publik terhadap layanan digital Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan *Information Technology Security Assessment (ITSA)* untuk menilai tingkat keamanan sistem dan infrastruktur TIK yang dimiliki, serta mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat mengancam keberlangsungan layanan digital pemerintah daerah. Layanan ITSA Kab. Muara Enim Tahun 2025 ini dilakukan pada 3 objek, yaitu :

No	Nama Target (URL Website)	Jenis Aplikasi	Environment
1	Aplikasi E Kinerja (https://ekinerja.muaraenimkab.go.id/)	Website	Production
2	Aplikasi E Presensi (https://e-presensi.muaraenimkab.go.id/)	Website	Production
3	Aplikasi Simpeg BKPSDM (http://simpeg.muaraenimkab.go.id/v2/)	Website	Production

8. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi/ webinar keamanan informasi mengingat pengamanan Informasi menjadi kebutuhan yang sangat vital khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang terintegrasi melalui jaringan dan komunikasi data menyebabkan banyak data dan informasi terdistribusi, kondisi inilah yang menjadi rentan terhadap akses bagi pihak yang tidak memiliki otoritas, insiden keamanan informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap sistem elektronik namun tidak terbatas pada virus, *malware*, maupun *deface* terhadap sebuah situs.

Sosialisasi / webinar keamanan informasi Kabupaten Muara Enim tahun 2025 dengan tema literasi digital untuk perlindungan data di era teknologi 4.0, ditujukan untuk semua pengelola IT / staf dan ASN yang memahami IT di Forkompimda, Perangkat Daerah, termasuk Bagian dan Kecamatan serta guru-guru lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

9. Monitoring opini aspirasi publik

Salah satu bentuk untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat dengan melalui pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pengelolaan sarana pengaduan publik melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan layanan pengaduan publik melalui SP4N LAPOR! harus dilaksanakan secara kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral. Oleh karena itu, penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan SP4N-LAPOR! Kabupaten Muara Enim merupakan

bentuk upaya yang dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

Pada tahun 2025 ini telah dilaksanakan kegiatan :

a. Kegiatan bimbingan teknis SP4N LAPOR

Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan SP4N-LAPOR! Kabupaten Muara Enim yang merupakan bentuk upaya yang dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Adapun peserta kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan SP4N LAPOR Kabupaten Muara Enim tahun 2025 adalah 60 orang pejabat penghubung SP4N LAPOR Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, BUMD dan instansi vertikal.

b. Kegiatan sosialisasi SP4N LAPOR

Penyelenggaraan sosialisasi SP4N-LAPOR! merupakan bentuk upaya yang dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, yang dilaksanakan dengan 176 orang peserta yang terdiri 1 orang perangkat Desa se-Kabupaten Muara Enim dan 60 pejabat penghubung SP4N LAPOR di setiap Perangkat Daerah.

10. Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK). PPID bertanggung jawab kepada atasan langsung PPID. Atasan PPID merupakan penentu pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak. Dalam melaksanakan wewenang, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari tim pertimbangan pelayanan informasi.

Pada tahun 2025 telah diadakan kegiatan bimbingan teknis PPID Kabupaten Muara Enim sebanyak 50 orang PPID pelaksana Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi dan kinerja PPID serta meningkatkan pelayanan PPID dalam memberikan informasi kepada publik di Kabupaten Muara Enim. Materi kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas PPID Kabupaten Muara Enim tahun 2025 meliputi:

- Pengelolaan informasi publik yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Fasilitasi sengketa informasi

11. Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat

Pada tahun 2025 telah terbentuk sebanyak 200 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Muara Enim yang berada di 18 Kecamatan. Pada tahun 2025 diadakan pembinaan KIM yang berada di 5 Kecamatan (Belimbing, Ujan Mas, Benakat, Lawang Kidul dan Empat Petulai Dangku) yang tersebar di 42 desa/ kelurahan untuk mendesiminasikan informasi. Kegiatan pelaksanaan pembinaan terhadap KIM tahun 2025 mencakup kegiatan koordinasi dan konsultasi dan pelaksanaan pembinaan terhadap KIM serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Camat yang Desa/KIM menjadi sasaran pelaksanaan pembinaan.
- Melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap KIM di Desa /Kelurahan dalam Kecamatan Muara Enim.
- Melakukan penyebaran informasi dari Pemerintah kepada masyarakat untuk disampaikan atau diinformasikan melalui komunitas informasi yang sudah ada pada masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran kinerja antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program penyelenggaraan statistik sektoral.

15. **Analisis Capaian Sasaran Strategis**
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

Tabel 2.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	100	BB	BB	100
Rata – rata capaian kinerja					100			100

Capaian kinerja Predikat SAKIP Kabupaten Muara Enim tahun 2025 tercapai sebesar 100 persen yaitu dari target predikat SAKIP BB dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerja sudah tercapai 100 persen. Adapun nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 – 2025

No	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai SAKIP	BB (74,54)	BB (74,83)	BB (75,41)	BB (76,51)	BB (76,69)

Sumber: Data diolah

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem terintegrasi yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan anggaran pemerintah digunakan secara efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. SAKIP memaksa instansi Pemerintah bergeser dari sekadar serapan anggaran menjadi berbasis hasil/kinerja. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target predikat SAKIP Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Telah dilakukan pelatihan penyusunan Renstra tahun 2025 – 2029 pada bulan Desember 2024, bekerjasama dengan UGM, untuk meningkatkan kompetensi perencana pada Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renstra.
2. Menerbitkan surat edaran Bupati tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029.

3. Melaksanakan evaluasi dan sinkronisasi *cascading* Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029.
4. Melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dengan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
5. Penyusunan perjanjian kinerja pegawai (individu) melalui dialog kinerja dengan atasan.
6. Melaksanakan kegiatan penguatan SAKIP terkait manajemen kinerja dengan narasumber dari Kementerian PAN RB
7. Melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait pelaporan kinerja.
8. Bagian Organisasi Setda menyediakan klinik konsultasi dalam penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.
9. Melakukan perubahan *timeline* evaluasi SAKIP internal untuk dilaksanakan sesuai dengan tahun berjalan.
10. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP dengan narasumber dari Kementerian PAN RB untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan evaluasi SAKIP internal yang dilakukan oleh Inspektorat.
11. APIP Inspektorat melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah satu kali per tahun
12. Inspektorat melakukan koordinasi ke Kementerian PAN RB terkait hasil evaluasi SAKIP internal
13. Perencanaan kinerja sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKA DPA dan DPPA) dan cukup menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai namun belum dipublikasikan tepat waktu.
14. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan namun belum memanfaatkan teknologi informasi.
15. Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sudah disusun secara berkala namun belum dipublikasikan tepat waktu.
16. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja.
17. Rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP pada tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran strategis kedepannya antara lain :

1. Menerapkan monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP berbasis analisis capaian kinerja.
3. Melakukan *review* program/ kegiatan yang tidak berkontribusi pada pencapaian target kinerja.
4. Melaksanakan pendampingan dan penguatan SAKIP secara berkelanjutan.
5. Tetap merumuskan perencanaan kinerja sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
6. Pengukuran kinerja akan dilakukan menggunakan aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim setelah aplikasi dimaksud sudah beroperasi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
7. Mematuhi jadwal penyampaian laporan.
8. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan melalui mekanisme dari PPTK, PPK sampai ke Kepala Badan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di akhir kegiatan untuk mengetahui kendala dan masalah serta faktor pendukung keberhasilan kegiatan.
9. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program pengembangan sumber daya manusia, program penelitian dan pengembangan daerah, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, program penyelenggaraan pemerintahan umum.

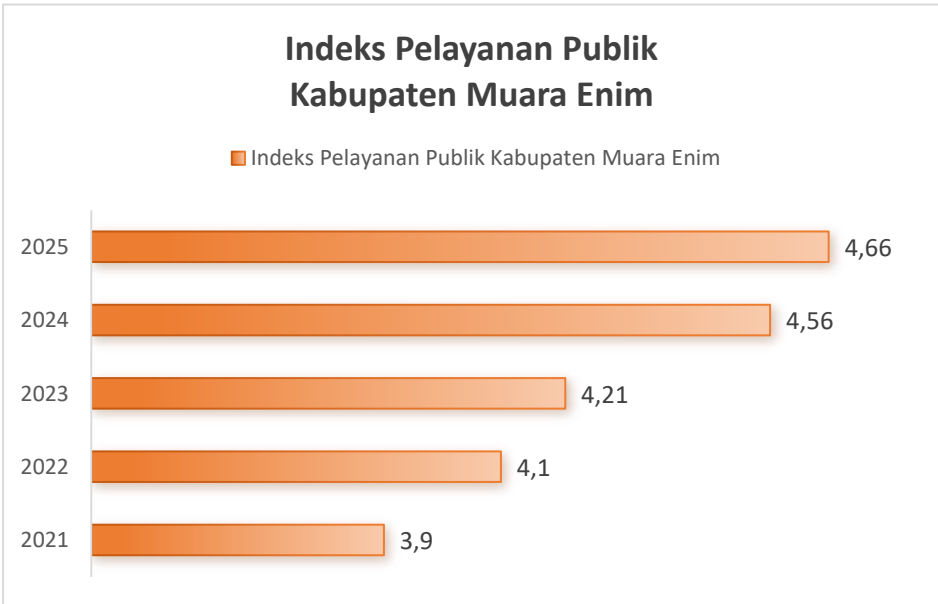
16. Analisis Capaian Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 2.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IPP)	Angka	4,56	4,54	4,66	102,64	4,86	4,66	95,88
Rata – rata capaian kinerja					102,64			95,88

Realisasi indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2025 yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai nilai 4,66 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 102,64 persen berada pada kategori sangat baik, serta telah mencapai 95,88 persen terhadap target akhir RPD Tahun 2024–2026.

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren yang positif dapat dilihat dari meningkatnya nilai IPP setiap tahun.



Sumber : Bagian Organisasi Setda

Nilai kualitas pelayanan publik tahun 2025 mencerminkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui penguatan tata kelola pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan inovasi pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bagi unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang difasilitasi Bagian Organisasi Setda dengan narasumber dari Kementerian PAN RB.
3. Asistensi penggunaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) *online* pada seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik.
4. Melakukan pendampingan pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah dan satuan pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
6. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
7. Pengembangan layanan kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
8. Pengembangan inovasi pelayanan publik, yang difasilitasi oleh Balitbangda melalui penguatan ekosistem inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Muara Enim tahun 2025 mencapai 79,45, merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir, didukung oleh pelaksanaan laboratorium inovasi sebagai inkubasi penciptaan dan implementasi inovasi. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong inovasi publik, implementasi Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2021 tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun, penyelenggaraan kompetisi inovasi tingkat Kabupaten serta partisipasi pada lomba inovasi tingkat Provinsi dan

Nasional (IGA Award), dukungan pembiayaan Perangkat Daerah serta modal non-finansial berupa penguasaan teknologi dan data, ketersediaan infrastruktur inovasi seperti laboratorium inovasi, jaringan internet, sistem *e-government* dan *platform knowledge management system (SINOME)*.

9. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, melalui pelayanan jemput bola di 22 Kecamatan sebanyak 30 kali kegiatan, kerja sama dengan 14 lembaga pemerintah dan non pemerintah (PT.BA, Pengadilan Agama, dan 12 praktik mandiri bidan) serta 9 Perangkat Daerah, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pelaminan (Pelayanan Administrasi Kependudukan Selesai Perkawinan), pengembangan 6 inovasi pelayanan administrasi kependudukan tahun 2025, peningkatan ketepatan waktu layanan, penyelesaian pengaduan, serta nilai SKM pelayanan.
10. Peningkatan pelayanan pendidikan, melalui pelaksanaan program wajib belajar, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan nonformal/kesetaraan, bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, atribut sekolah, dan buku LKS bagi peserta didik PAUD, SD dan SMP, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan pendidikan.
11. Peningkatan pelayanan sosial, melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sarana prasarana pelayanan, pengembangan pelayanan berbasis digital, penguatan sistem pengaduan masyarakat.
12. Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan jalan, oleh Dinas Perhubungan melalui pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 3.016 unit (106% dari target 2.838 unit), pemasangan 125 rambu lalu lintas dan 30 Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), penyediaan 1.390 titik lampu penerangan jalan umum, pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) pada 5 lokasi, yaitu Tanjung Jati Kabupaten Muara Enim, SD Negeri 10 Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas, MTs Negeri 1 Muara Enim Kecamatan Muara Enim, MIN 1 Muara Enim Kecamatan Muara Enim, Desa Beringin Kecamatan Lubai, penyediaan 1 unit halte di Kecamatan Ujan Mas Baru, pembangunan dermaga di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Enim dan Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
13. Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran, dengan capaian Jumlah kejadian kebakaran tahun 2025 sebanyak 46 kejadian, *response time* terpenuhi

pada 42 kejadian dengan tingkat waktu tanggap 91,03%, sosialisasi pencegahan kebakaran di 10 desa Kecamatan Lembak dengan 50 peserta tiap desa, pembentukan relawan pemadam kebakaran di 22 kecamatan (40 relawan/kecamatan), diklat *Medical First Responder* bagi 30 aparatur, kerjasama penanggulangan kebakaran pada 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Untuk semakin meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim akan dilakukan :

1. Evaluasi standar pelayanan dan penyederhanaan SOP layanan.
2. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik.
3. Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
5. Internalisasi dan monitoring budaya kerja ASN BerAKHLAK.
6. Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik.
7. Penguatan Forum Konsultasi Publik.
8. Pengembangan laboratorium inovasi dan pemberian *reward* inovator daerah.
9. Penambahan klaster inovasi meliputi BUMN, BUMD, swasta dan desa.
10. Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) serta peningkatan diklat aparatur dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.
11. Koordinasi penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan penguatan Desa Tangguh Bencana oleh BPBD.
12. Peningkatan penanganan RTLH melalui pendataan akurat, edukasi rumah layak huni, dan peningkatan bantuan stimulan.
13. Peningkatan pelayanan transportasi, keselamatan jalan dan pengujian kendaraan bermotor dengan cakupan yang lebih luas.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, program penanggulangan bencana, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan, program penataan desa, program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), program pengelolaan pelayaran, program penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

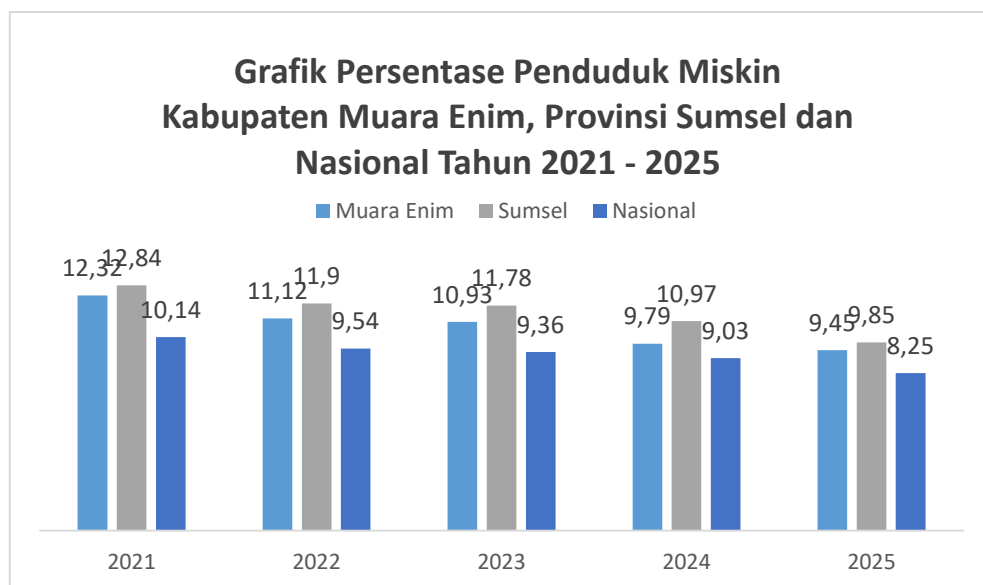
17. Analisis Capaian Tujuan 5
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Tabel 2.19
Analisis Pencapaian Tujuan 5
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Persentase penduduk miskin	Persen	9,79	10,29	9,45	108,88	9,88	9,45	104,55
Rata – rata capaian kinerja					108,88			104,55

Indikator sasaran persentase penduduk miskin tahun 2025 terealisasi sebesar 9,45 persen dari target sebesar 10,29 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,88 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026, realisasi tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 104,55 persen.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim lebih rendah dibandingkan dengan persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,85 persen namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rata-rata penduduk miskin tingkat nasional sebesar 8,25 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan papan yang diakibatkan rendahnya pendapatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan produktivitas, lemahnya nilai produksi, serta terbatasnya kesempatan bekerja.

Pengukuran angka kemiskinan di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui penetapan nilai standar kebutuhan minimum, baik kebutuhan pangan dan non pangan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batasan untuk membedakan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin atau penduduk mampu. Garis batas tersebut disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Dengan kata lain, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki jumlah pengeluaran rata-ratanya berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dilihat dari kondisi awalnya memang miskin. Kemiskinan pada golongan ini dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan, dan mereka hanya mendapatkan pendapatan yang sangat rendah. Kemiskinan ini juga dapat

disebabkan karena mengalami cacat, sakit, usia lanjut, dan bencana alam. Dengan begitu, seringkali kemiskinan natural ini terjadi secara turun temurun.

Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang terjadi pada individu miskin yang dikarenakan struktur sosial dalam masyarakat, seperti adanya batasan hak-hak mereka dalam mengakses sumber ekonomi yang telah tersedia. Biasanya golongan tersebut memiliki kesadaran terhadap kehidupan ekonominya yang berbeda dari masyarakat lain yang lebih dianggap mampu, sehingga kekuasaannya berada di bawah individu yang kaya. Contohnya, para petani yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan seseorang yang dapat memberikannya modal atau lahan untuk digarap. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) adalah kemiskinan yang dipandang melalui sudut pandang budaya, di mana disebabkan adanya pola perilaku, sikap mental, dan pikiran yang tidak mampu menghadapi dan mengikuti perubahan untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Biasanya budaya ini muncul karena adanya rasa minder, malas, boros dan tidak disiplin pada individu untuk meraih kesuksesan.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui alternatif kebijakan dan program untuk masyarakat miskin yaitu dengan meningkatkan pendapatan seperti dengan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin yang mempunyai kemampuan dalam memperoleh hasil di berbagai kegiatan serta dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti kepentingan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memudahkan kegiatan sosial ekonomi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengentasan kemiskinan meliputi:

1. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
2. Melaksanakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kabupaten/kota
3. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan fungsi sosial penerima manfaat.
4. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (di luar korban HIV/AIDS dan NAPZA) di luar panti sosial melalui penyediaan alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, serta pemberian layanan rujukan guna meningkatkan keberfungsian sosial dan

akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Melaksanakan pemeliharaan anak - anak terlantar sebagai bentuk perlindungan dan pengasuhan alternatif untuk menjamin terpenuhinya hak dasar serta tumbuh kembang anak secara optimal.

5. Melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten melalui proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data guna memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
6. Melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (UEP) guna meningkatkan ketepatan sasaran intervensi dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
7. Melaksanakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial di tingkat kabupaten/kota melalui penyediaan bantuan darurat, dukungan logistik, serta fasilitasi pemulihan sosial pasca bencana.
8. Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda usia 16–30 tahun dalam berbagai bidang usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas kewirausahaan pemuda agar memiliki keahlian produktif, mampu menciptakan usaha mandiri, serta memperluas peluang kerja.
9. Pemutakhiran basis data kemiskinan daerah.
10. Penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.
11. Penyaluran bantuan usaha produktif bagi keluarga miskin.
12. Pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja lokal.
13. Pelaksanaan program padat karya di desa/ kelurahan.
14. Memastikan kepesertaan JKN aktif bagi keluarga miskin.
15. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.
16. Program bedah rumah bagi keluarga miskin ekstrem.
17. Penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah kantong kemiskinan.
18. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
19. Memberikan pelatihan keterampilan pada pencari kerja berupa pelatihan dengan standar kurikulum seperti menjahit, tata boga, servis *air conditioner* (AC).
20. Memberi bantuan peralatan yang diserahkan kepada peserta pelatihan tata boga.
21. Memberikan pelatihan pengoperasian alat berat, las, komputer dasar bagi pencari kerja.

22. Pemberian bantuan bahan pangan pada daerah rawan pangan berupa beras, minyak, gula dan sarden kaleng.
23. Pemberian subsidi dalam rangka kegiatan Sembako Murah Membara
24. Selain intervensi ekonomi langsung, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan penguatan ketahanan keluarga melalui distribusi sarana prasarana pelayanan KB pada 31 fasilitas kesehatan, pembinaan Kampung KB di 22 kecamatan, serta edukasi kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan dan PIK-R. Program tersebut berkontribusi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan perencanaan kehidupan generasi muda, yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan dapat mencegah kemiskinan struktural.
25. Melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut :
- a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.356 unit di 17 kecamatan.
 - b) Program bedah rumah melalui dana CSR antara lain PT Bukit Asam sebanyak 25 unit, PT. PPA sebanyak 5 unit, PT. Medco sebanyak 8 unit, Bank Sumsel Babel sebanyak 1 unit.
 - c) Pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 103 unit di 15 kecamatan.
 - d) Perbaikan rumah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebanyak 4 unit di Kecamatan Muara Enim. Dengan demikian, total realisasi penanganan RTLH Tahun 2025 mencapai 1.463 unit dari target 1.479 unit. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui perbaikan kondisi hunian, khususnya pada komponen atap, lantai, dan dinding (aladin), sehingga meningkatkan kelayakan tempat tinggal, kesehatan lingkungan, serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran basis data kemiskinan daerah.
2. Penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.
3. Penyaluran bantuan usaha produktif bagi keluarga miskin.
4. Pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja lokal.
5. Pelaksanaan program padat karya di desa/ kelurahan.
6. Memastikan kepesertaan JKN aktif bagi keluarga miskin.
7. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.

8. Program bedah rumah bagi keluarga miskin ekstrem.
9. Penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah kantong kemiskinan.
10. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
11. Pemagangan peserta pelatihan keterampilan.
12. Memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi peserta yang lulus seleksi magang di Jepang.
13. Melaksanakan kembali pemberian bantuan bahan pangan pada daerah rawan pangan.
14. Mendukung program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan pemberian bantuan paket budikamber (budidaya ikan dalam ember) kepada rumah tangga miskin.
15. Pelaksanaan kegiatan Sembako Murah Membara.
16. Meningkatkan akurasi data penerima melalui survei dan pendataan ulang berbasis kondisi riil lapangan.
17. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai standar rumah layak huni agar perbaikan sesuai dengan ketentuan teknis.
18. Memfokuskan penanganan tidak hanya pada bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
19. Meningkatkan efektivitas bantuan stimulan, termasuk penguatan dukungan material dan upah perbaikan.
20. Melakukan evaluasi dampak program RTLH terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Pencapaian tujuan meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat didukung oleh sasaran strategis meningkatnya daya saing dan stabilitas ekonomi daerah, meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah, terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

18. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan penanganan PPKS

Tabel 2.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Penanganan PPKS

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Persentase penurunan penanganan PPKS	Persen	78,83	78,69	84,16	93,50	75,76	84,16	90,02
Rata – rata capaian kinerja					93,50			90,02

Realisasi indikator sasaran Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 sebesar 84,16 persen, dengan capaian kinerja mencapai 93,50 persen dan berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026, capaian kinerja indikator ini telah mencapai 90,02 persen.

Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012 terdapat 26 jenis PPKS yaitu :

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan kedisabilitasan
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok minoritas
15. Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan
16. Orang dengan HIV/Aids

17. Korban penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran bermasalah Sosial
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana Sosial
23. Perempuan rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Pada umumnya mereka mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Penanganan PPKS difokuskan pada pemulihan fungsi sosial individu atau kelompok yang mengalami hambatan, seperti anak jalanan, lansia terlantar, dan disabilitas, melalui pendampingan, pemberdayaan, serta pelayanan berbasis panti maupun komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upaya ini krusial untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Pada tahun 2025, jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial tercatat sebanyak 42.021 jiwa dari total 49.932 jiwa PPKS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21
Rincian PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

No.	Bantuan Sosial Sampai Tahun 2025	Keterangan
1	Jumlah penerima bantuan bencana	168 Jiwa
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga	20 Orang
3	Penyediaan layanan kedaruratan / reaksi cepat	63 Orang
4	Penyediaan permakan untuk PPKS	19 Orang
5	Penyediaan sandang untuk PPKS	18 Orang
6	Penyediaan alat bantu untuk PPKS	77 Orang

No.	Bantuan Sosial Sampai Tahun 2025	Keterangan
7	Jumlah penerima bantuan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)	120 Orang
8	Pelayanan penelusuran keluarga	4 Orang
9	Pelayanan reunifikasi keluarga	2 Orang
10	Layanan rujukan PPKS	19 Orang
11	UEB	80 Orang
12	Sunatan Massal	100 Orang
13	Bantuan Abiyoso	239 Orang
14	UEB Provinsi	90 Orang
15	Bantuan Pangan non Tunai	41.002 Orang
	Total	42.021 Orang

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran persentase penurunan penanganan PPKS diantaranya:

1. Terlaksananya program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran, termasuk penanganan fakir miskin, kelompok rentan, serta korban bencana alam dan sosial, sehingga mampu mengurangi risiko sosial dan meningkatkan ketahanan masyarakat.
2. Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, serta PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya melalui pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial yang berkelanjutan dan terukur.
3. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang mendorong peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Terselenggaranya pendataan dan pengelolaan data fakir miskin secara akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan dan penyaluran bantuan sosial, serta terlaksananya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat (UEP).
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok sasaran melalui pelayanan sosial yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika permasalahan sosial di daerah.

6. Terselenggaranya perlindungan dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial secara cepat dan terkoordinasi, mendukung pemulihan sosial pascabencana.

Kabupaten Muara Enim dalam penyaluran bantuan sosial masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya :

1. Belum tersalurnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena masih dalam proses penyusunan dan penetapan regulasi.
2. Perubahan kebijakan program BLT menjadi BLT PKH Membara yang membutuhkan penyesuaian administratif dan teknis pelaksanaan.
3. Validitas dan pemutakhiran data PPKS masih memerlukan pembaruan secara berkala agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama dalam menyesuaikan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Kapasitas dan distribusi sumber daya manusia belum sepenuhnya merata, khususnya untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung di lapangan.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya untuk lebih meningkatkan capaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Lebih meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan kesejahteraan sosial pada PPKS, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sosial.
2. Memperluas cakupan sosialisasi kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga realisasi penanganan PPKS akan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan sesuai dengan program strategis daerah terhadap kegiatan santunan kematian.
5. Melakukan pemutakhiran data PPKS secara berkala dan terintegrasi agar program bantuan lebih tepat sasaran.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta mitra terkait dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

8. Mendorong inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan partisipatif agar layanan bantuan sosial lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan responsif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program penanganan bencana, program perlindungan dan jaminan sosial.

19. Analisis Capaian Sasaran Strategis Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

Tabel 2.22
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,09	3,88	4,13	93,95	3,76	4,13	91,04
Rata – rata capaian kinerja					93,95			91,04

Capaian indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 dari target sebesar 3,88 persen terealisasi sebesar 4,13 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 93,95 persen berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026, capaian kinerja indikator ini telah mencapai sebesar 91,04 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah melakukan kegiatan atau membantu melakukan kegiatan untuk mendapat penghasilan atau keuntungan minimal seminggu sebelum dilakukan survei. Tenaga kerja adalah penduduk di usia produktif yaitu 15 tahun hingga 64 tahun dianggap penduduk yang mampu bekerja. Maka mereka digolongkan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang-orang yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dan juga orang-orang yang sedang berusaha untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Jadi angkatan kerja dibedakan menjadi 2 golongan yaitu :

1. Penduduk bekerja yaitu mereka yang melakukan produksi barang dan jasa.

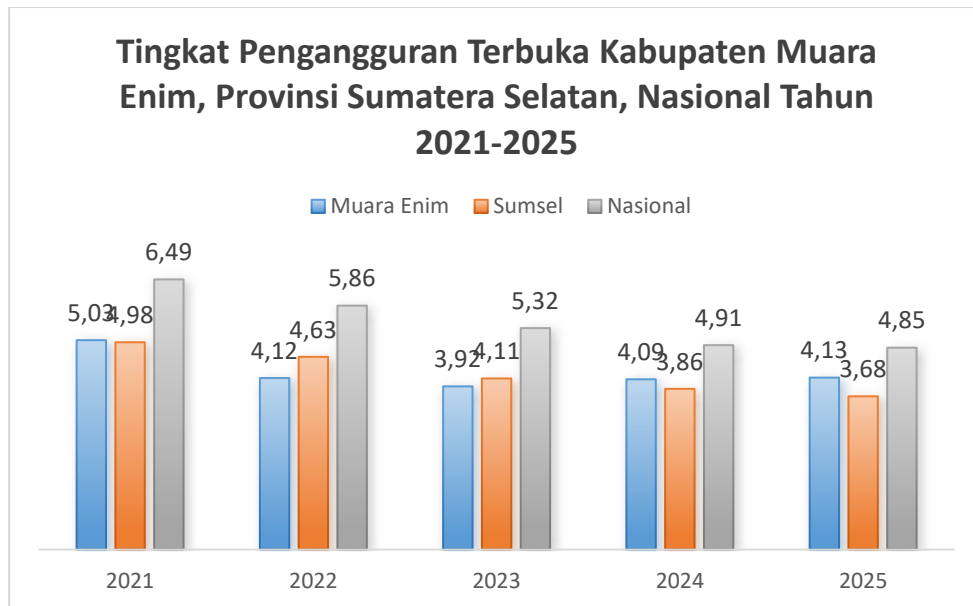
2. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan yaitu mereka yang sedang berusaha untuk dapat ikut serta memproduksi barang dan jasa.

Tenaga kerja tetapi bukan angkatan kerja, adalah mereka yang tidak bekerja ataupun tidak berusaha mencari pekerjaan. Mereka adalah bagian dari tenaga kerja, tetapi tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Mereka ini misalnya penduduk yang sedang bersekolah, ibu-ibu yang mengurus rumah tangga ataupun pensiunan.

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kondisi seperti ini dikenal dengan sebutan pengangguran terbuka dan sering diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selayaknya, pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berakibat ke tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk, khususnya bagi angkatan kerja. Walaupun mungkin tetap saja tidak semua angkatan kerja dapat terserap tetapi setidaknya dapat memperkecil tingkat pengangguran terbuka.

Secara komparatif, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,68 persen, namun lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional yang mencapai 4,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pengendalian pengangguran di Kabupaten Muara Enim relatif lebih baik dibandingkan capaian nasional, masih diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja guna menurunkan tingkat pengangguran agar sejalan dengan capaian tingkat provinsi.

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Tabel 2.23
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Angkatan Kerja (Jiwa)			Pengangguran Terbuka (Jiwa)	
Bekerja	Menganggur	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
321.846	13.868	335.714	7.201	6.667

Salah satu faktor yang menghambat pencapaian target kinerja adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan serta tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi tenaga kerja yang masa kontraknya telah berakhir. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pencari kerja dan berkurangnya daya serap tenaga kerja di sektor unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dengan standar kurikulum yang terstruktur, seperti pelatihan menjahit, tata boga, dan servis AC.
2. Memberikan bantuan peralatan usaha kepada peserta pelatihan, khususnya pada bidang tata boga, guna mendukung kemandirian dan pengembangan usaha mandiri.
3. Melaksanakan *jobfair* MEMBARA yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, penyandang disabilitas, serta memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja

antar daerah dengan melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya.

4. Melaksanakan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan pengoperasian alat berat, pengelasan, dan komputer dasar.
5. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja pada berbagai perusahaan di berbagai sektor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Upaya yang akan dilakukan agar lebih meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja lokal ke sektor-sektor di luar pertambangan melalui penguatan kerja sama dengan perusahaan pada sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa, dan sektor potensial lainnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi lapangan kerja guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan serta memperluas kesempatan kerja yang lebih berkelanjutan.
2. Meningkatkan fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar daerah maupun luar provinsi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah lain, perusahaan pengguna tenaga kerja, serta pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar kerja yang lebih luas bagi pencari kerja asal Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha.
3. Mengoptimalkan penyaluran dan penempatan alumni pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan memperkuat mekanisme *link and match* antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lulusan pelatihan guna memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja.

20. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

Tabel 2.24
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Skor Pola Pangan Harapan	Angka	94,53	90,00	94,80	105,33	92,00	94,80	103,04
Rata – rata capaian kinerja					105,33			103,04

Capaian indikator sasaran skor pola pangan harapan tahun 2025 sebesar 94,80 dari target sebesar 90,00 dengan capaian kinerja sebesar 105,33 persen berada pada kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya telah tercapai sebesar 103,04 persen. Skor pola pangan harapan tahun 2025 meningkat dibandingkan skor pola pangan harapan tahun 2024 sebesar 94,53.

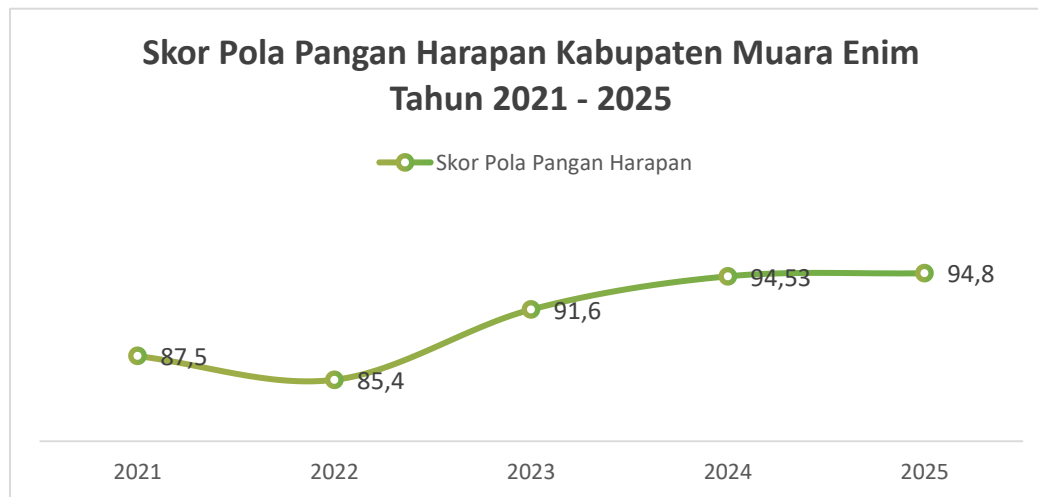
Pangan adalah bagian dari kebutuhan dasar dan hak asasi setiap manusia, Kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara dapat dilihat dari kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakatnya. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator untuk menilai kualitas gizi dan keragaman konsumsi pangan di masyarakat, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi dalam membangun ketahanan pangan. Keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga menjadi penentu kualitas konsumsi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Pola konsumsi pangan merupakan susunan makanan, mencakup jenis dan jumlah bahan makan yang dikonsumsi seseorang untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuhnya. Pola konsumsi pangan dapat dianalisis menggunakan 2 pendekatan, yaitu kuantitas dan kualitas. Pada aspek kuantitas, pola konsumsi seseorang dilihat berdasarkan jumlah dan proporsi energi yang dikonsumsi dan ditunjukkan dalam satuan persen maupun kalori. Sementara itu, penilaian kualitas pola konsumsi pangan

mencerminkan diversifikasi atau keragaman jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan melihat capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang memiliki nilai maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda satu sama lain antar masyarakat. Pendapatan rumah tangga, besar keluarga, umur dan tingkat pendidikan ibu rumah tangga menjadi pembeda dalam konsumsi antar keluarga.

Konsumsi pangan masyarakat adalah cerminan dari ketahanan pangan di wilayah setempat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan adalah dengan mewujudkan diversifikasi atau keanekaragaman pada konsumsi pangan lokal. Diversifikasi pangan diukur melalui skor pola pangan harapan, skor pola pangan harapan berbanding lurus dengan kondisi ketahanan pangan. Maksudnya bahwa untuk meningkatkan skor PPH di suatu wilayah, maka ketahanan pangan juga harus ditingkatkan.

Adapun skor pola pangan harapan Kabupaten Muara Enim tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Muara Enim sudah cukup beragam akan tetapi untuk pangan sumber karbohidrat masih didominasi oleh padi-padian yaitu beras sehingga masih perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pemenuhan kebutuhan karbohidrat dari jenis pangan yang lain seperti umbi-umbian. Untuk konsumsi pangan sumber protein mengalami peningkatan pada sumber protein hewani dan pada konsumsi pangan sumber vitamin dan mineral kelompok sayur-

sayuran memberikan kandungan gizi lebih besar dibandingkan kelompok pangan yang berasal dari buah-buahan sehingga diperlukan pula pemahaman kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan konsumsi buah-buahan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran skor pola pangan harapan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun yang menjadi dasar perencanaan pembangunan pangan daerah.
2. Pelaksanaan bantuan pemanfaatan pekarangan kepada 43 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok KTNA, khususnya pada lokasi prioritas penurunan stunting dan wilayah pendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang mendorong ketersediaan dan akses pangan rumah tangga.
3. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
4. Penguatan edukasi terhadap pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), diversifikasi pangan lokal, peningkatan akses pangan bergizi, serta sinergi lintas sektor.
5. Peningkatan konsumsi pangan sumber protein hewani dan sayur-sayuran dan konsumsi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat selain beras.
6. Peningkatan akses masyarakat memperoleh pangan yang terjangkau.
7. Bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Muara Enim menggalakkan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, seperti cabai dan sayuran, guna mendukung kemandirian ekonomi keluarga dan diversifikasi pangan.

Berdasarkan hasil kajian Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kecukupan energi penduduk Kabupaten Muara Enim mencapai 2.184,84 kkal/kapita/hari. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019.

Sementara itu, tingkat kecukupan protein tercatat sebesar 64,30 gram/kapita/hari. Nilai ini juga masih memenuhi standar kecukupan protein yang dianjurkan, walaupun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas konsumsi pangan masyarakat relatif telah mencukupi kebutuhan energi dan protein. Namun demikian, masih diperlukan upaya

untuk meningkatkan kualitas dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan agar pola konsumsi masyarakat lebih beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Sebagai tindak lanjut atas hasil kajian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat. Upaya ini diarahkan agar pemenuhan gizi tidak hanya berfokus pada konsumsi karbohidrat, tetapi juga memperhatikan kecukupan sayuran, buah-buahan, ikan, serta sumber protein hewani lainnya guna meningkatkan kualitas asupan gizi rumah tangga.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan prasarana Pemanfaatan Pekarangan yang telah diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai penerima manfaat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan rumah tangga serta mendukung penurunan angka keluarga berisiko stunting.
3. Bersama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Muara Enim melakukan pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam rangka pengelolaan pangan pekarangan berkelanjutan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan prasarana Pemanfaatan Pekarangan yang telah diberikan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai penerima manfaat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan rumah tangga serta mendukung penurunan angka keluarga berisiko stunting.
5. Memberikan bantuan benih sayuran dan buah-buahan guna mendorong pengembangan pangan lokal berbasis rumah tangga. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan sumber vitamin dan mineral secara mandiri serta memperkuat ketahanan pangan keluarga.
6. Memfasilitasi penyelenggaraan pasar tani sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan segar, sehat, dan terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil produksi petani lokal agar distribusi pangan lebih merata.
7. Melaksanakan edukasi dan promosi pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi konsumsi, sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu jenis

bahan pangan tertentu serta mampu mengoptimalkan potensi sumber daya pangan daerah.

Melalui rangkaian upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perbaikan skor Pola Pangan Harapan, serta kontribusi nyata terhadap penurunan prevalensi keluarga berisiko stunting di Kabupaten Muara Enim.

Program yang mendukung pencapaian target sasaran kinerja skor pola pangan harapan antara lain program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

21. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk

Tabel 2.25
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1,2	1,01	1,18*	85,6	1,00	1,18*	84,7
Rata – rata capaian kinerja					85,6			84,7

*Nilai dirilis BPS per Februari 2025

Realisasi indikator sasaran laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 sebesar 1,18 persen dari target 1,01 persen dengan capaian kinerja sebesar 85,6 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 84,7 persen.

Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan tingkat perubahan populasi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai hasil akumulasi kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Indikator ini menjadi parameter penting dalam menilai tekanan demografis terhadap kapasitas ekonomi dan pelayanan publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, laju pertumbuhan penduduk memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Pertumbuhan yang melampaui kapasitas ekonomi daerah dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran dan kerentanan sosial. Sebaliknya, pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas dapat menjadi modal demografi yang mendukung percepatan pembangunan.

Apabila pertumbuhan penduduk tidak disertai peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja, maka akan muncul konsekuensi sosial ekonomi berupa meningkatnya pengangguran, kemiskinan, serta beban pembangunan. Oleh sebab itu, pengendalian kuantitas penduduk harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Muara Enim terus mengalami dinamika kependudukan yang ditandai dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk seiring perkembangan aktivitas ekonomi daerah.

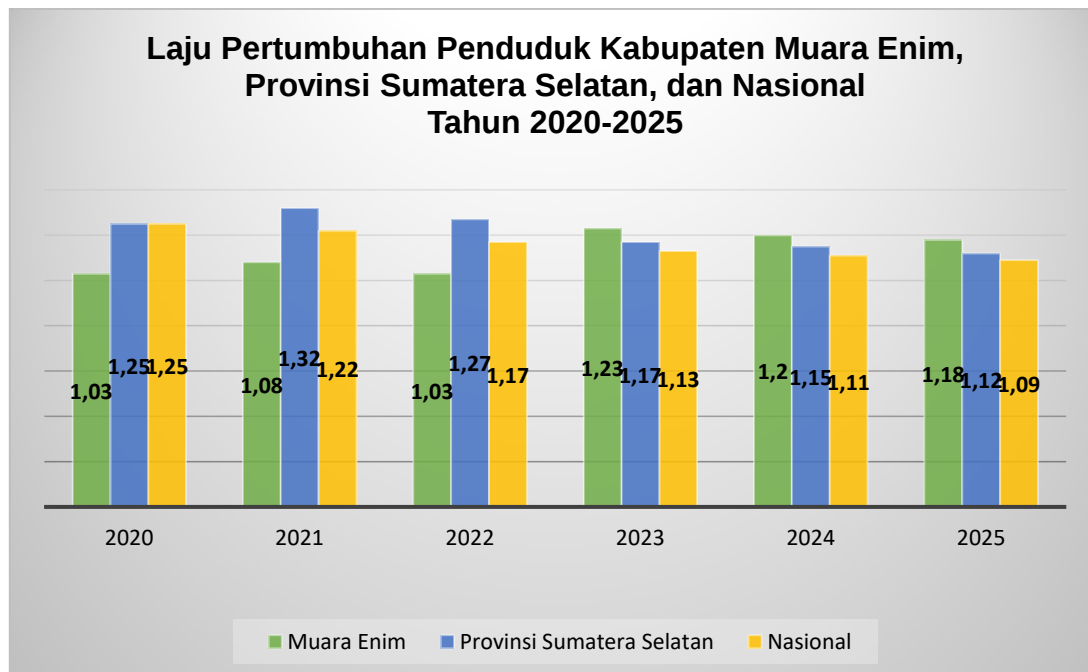
Belum tercapainya target sasaran strategis laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan beberapa program strategis, khususnya rendahnya kepesertaan kelompok Keluarga Berencana (KB) khusus pria serta pelayanan KB pasca salin. Rendahnya partisipasi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pengendalian fertilitas, terutama pada pasangan usia subur dengan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (*unmet need*). Meskipun laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali, peningkatan jumlah penduduk tetap memerlukan pengelolaan yang terencana agar sejalan dengan kapasitas pelayanan publik, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 – 2025

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2020	612.900	1,03	104,34
2021	617.846	1,08	104,21
2022	624.019	1,03	104,09
2023	633.779	1,23	104,11
2024	640.962	1,20	102,20

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2025	648.000	1,18	103,90

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim



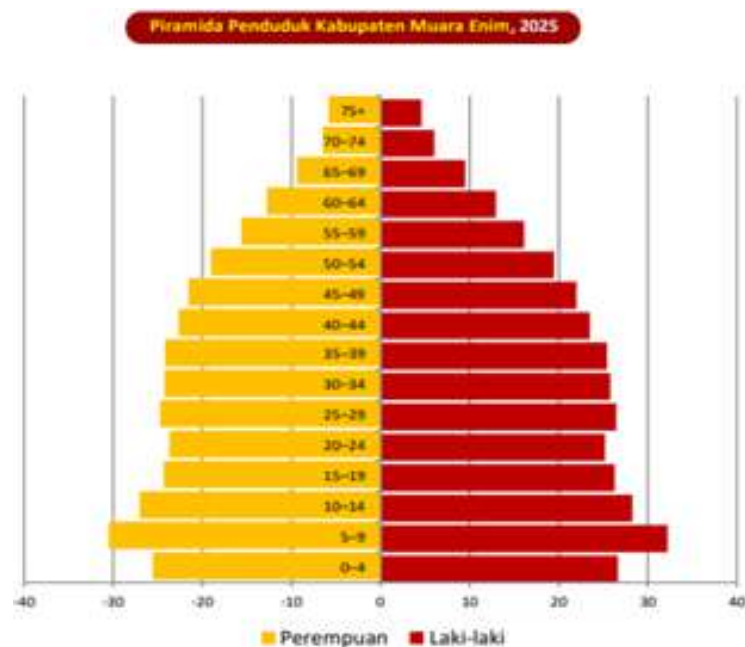
Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 1,20 persen, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,15 persen serta nasional sebesar 1,11 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 mencapai 640.962 jiwa, meningkat sebanyak 7.183 jiwa dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 633.779 jiwa.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim kembali mengalami peningkatan menjadi 648.000 jiwa, atau bertambah 7.038 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 1,18 persen, masih lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,12 persen dan nasional sebesar 1,09 persen. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Muara Enim tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi.

Selain itu, rasio jenis kelamin Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 sebesar 103,09, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif memberikan peluang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga menuntut peningkatan penyediaan lapangan kerja, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Secara umum, kondisi pertumbuhan penduduk tersebut mencerminkan adanya potensi bonus demografi yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muara Enim.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muara Enim

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	26,63	25,56	52,18
5-9	32,21	30,51	62,72
10-14	28,23	27,05	55,28
15-19	26,26	24,34	50,60
20-24	25,19	23,69	48,87
25-29	26,43	24,71	51,14
30-34	25,78	24,28	50,06
35-39	25,41	24,22	49,63
40-44	23,50	22,70	46,20
45-49	21,97	21,55	43,52
50-54	19,46	19,04	38,50
55-59	16,10	15,64	31,73
60-64	12,92	12,75	25,67
65-69	9,50	9,40	18,89
70-74	6,03	6,49	12,52
75+	4,59	5,83	10,42
Jumlah/Total	330,19	317,75	647,94

 Penduduk Usia Produktif = 67,3% total penduduk

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Muara Enim tahun terbaru, struktur penduduk masih menunjukkan pola piramida ekspansif, yang dicirikan oleh proporsi penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok usia tua. Bentuk piramida yang menyerupai kerucut atau limas tersebut menggambarkan bahwa angka kelahiran masih relatif tinggi, sementara proporsi penduduk lanjut usia lebih kecil. Struktur demografi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Muara Enim berada pada fase pertumbuhan penduduk yang masih cukup cepat.

Komposisi penduduk dengan dominasi usia muda dan usia produktif memberikan potensi bonus demografi apabila dikelola dengan baik melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan keterampilan tenaga kerja. Namun demikian, apabila tidak diimbangi dengan perencanaan pembangunan yang terarah, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap penyediaan kesempatan kerja, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Banyaknya penduduk usia produktif juga berimplikasi terhadap potensi peningkatan angka kelahiran di masa mendatang, yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas pembangunan daerah.

Secara umum, kondisi kependudukan Kabupaten Muara Enim menunjukkan dinamika pertumbuhan yang masih cukup tinggi dengan dominasi usia produktif. Apabila dikelola secara optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian pertumbuhan penduduk, maka kondisi ini dapat menjadi modal strategis dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, khususnya dari indikator kelahiran, adalah dengan meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) baru serta memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, mengatur jarak kelahiran, serta menjaga keseimbangan struktur penduduk agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Mendistribusikan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada 31 fasilitas kesehatan guna mendukung ketersediaan layanan kontrasepsi yang memadai.
2. Melaksanakan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan pada 15 SMP sebagai upaya edukasi dini terkait perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi.
3. Melakukan pembinaan Kampung KB di 22 kecamatan sebagai pusat integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
4. Melaksanakan orientasi kepada PIK-R dalam rangka meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan pengembangan life skill sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini.
5. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
6. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
7. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

Sebagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim kedepannya akan melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan KB pasca salin melalui penguatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
2. Melaksanakan pelatihan bagi kelompok KB Pria guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran peran pria dalam program KB.
3. Meningkatkan penjangkauan pelayanan KB, khususnya kepada pasangan usia subur dengan tingkat unmet need yang masih tinggi.
4. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah.
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengendalian penduduk, program pengendalian penduduk, program pembinaan Keluarga Berencana (KB), program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

22. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat

Tabel 2.27
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Layanan Hunian Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Persentase rumah layak huni	Persen	96,44	95,88	86,01	89,70	97,88	86,01	87,87
Rata – rata capaian kinerja					89,70			87,87

Indikator persentase rumah layak huni merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas hunian yang aman, sehat, dan bermartabat. Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 86,01 persen dengan capaian kinerja sebesar 89,70 persen dan berada pada

kategori baik. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih berada di bawah target tahunan sebesar 95,88 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026 sebesar 97,88 persen, maka capaian kinerja tahun berjalan baru mencapai 87,87 persen terhadap target akhir periode.

Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat, namun akselerasi masih diperlukan untuk mengejar kesenjangan terhadap target jangka menengah daerah. Kesenjangan tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan penanganan RTLH masih cukup tinggi dibandingkan kapasitas intervensi yang tersedia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum, serta menjamin kesehatan penghuninya dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup, produktivitas rumah tangga, serta pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka meningkatkan persentase rumah layak huni, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan program bedah rumah dengan perbaikan RTLH sebanyak 1.000 unit pada 40 lokasi. Selain itu, program bedah rumah dilakukan melalui kolaborasi dengan Baznas, TNI dan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim antara lain Baznas melakukan perbaikan 12 unit rumah, TNI dalam kegiatan TMMD ke-120 di Kecamatan Gunung Megang, melakukan perbaikan sebanyak 5 unit rumah. Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim ikut berkontribusi dalam program bedah rumah melalui dana CSR antara lain PT Bukit Asam sebanyak 25 unit, PT. PPA sebanyak 5 unit, PT. Medco sebanyak 8 unit, Bank Sumsel Babel sebanyak 1 unit. Secara kumulatif, jumlah RTLH yang telah tertangani hingga saat ini mencapai 11.739 unit.

Pada Tahun 2025 direncanakan penanganan RTLH sebanyak 1.479 unit, yang terdiri dari 1.370 unit perbaikan RTLH di 17 kecamatan, pembangunan baru 105 unit RLH di 15 kecamatan, serta program TMMD sebanyak 4 unit di Kecamatan Muara Enim. Dari rencana tersebut, realisasi yang dicapai adalah 1.463 unit, yang terdiri dari 1.356 unit perbaikan rumah, 103 unit pembangunan baru, dan 4 unit melalui TMMD.

Capaian ini menunjukkan tingkat realisasi fisik yang cukup tinggi, namun secara agregat belum mampu mendorong indikator hingga mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator antara lain :

1. Ketidakakuratan data penerima bantuan sehingga berpotensi menyebabkan belum tepatnya sasaran intervensi.
2. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai standar konstruksi rumah layak huni, sehingga prioritas perbaikan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.
3. Fokus intervensi yang masih dominan pada aspek fisik bangunan (atap, lantai, dinding/ALADIN) dan belum sepenuhnya berbasis pendekatan kawasan permukiman.
4. Masih terdapat rumah tangga dengan kondisi ekonomi dan hunian yang lebih membutuhkan namun belum tertangani akibat keterbatasan anggaran.
5. Bantuan yang bersifat stimulan belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan menyeluruh karena keterbatasan kemampuan swadaya penerima.
6. Belum optimalnya evaluasi dampak program terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian indikator pada tahun berikutnya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan validasi dan pemutakhiran basis data RTLH guna memastikan ketepatan sasaran.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait standar rumah layak huni melalui sosialisasi dan pendampingan teknis.
3. Membedakan spesifikasi sasaran penerima bantuan antara RTLH Swadaya dan RTLH Prioritas sesuai karakteristik rumah dan kondisi lingkungan.
4. Mengintegrasikan pendekatan berbasis kawasan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
5. Meningkatkan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memiliki kompetensi teknis dan pendampingan tersertifikasi.
6. Memperluas dukungan intervensi berupa bantuan sanitasi layak, fasilitasi sambungan listrik baru, dan perbaikan jalan lingkungan pada kawasan padat.
7. Meningkatkan besaran dan kualitas bantuan stimulan agar lebih berdampak signifikan terhadap peningkatan kelayakan hunian.

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas input, proses, output, hingga *outcome* program.
9. Memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program kawasan permukiman dengan sub kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

23. Analisis Capaian Tujuan 6 Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah

Tabel 2.28
Analisis Pencapaian Tujuan 6
Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Masyarakat
Dalam Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,82	89,85	90,14*	100,32	89,93	90,14*	100,23
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,66	77,39	69,55*	89,87	80,25	69,55*	86,67
Rata – rata capaian kinerja					95,10			93,45

*) Nilai tahun sebelumnya

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pengukuran kinerja masih menggunakan capaian tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 90,14 dengan capaian kinerja sebesar 100,32 persen dan berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024–2026, capaian kinerja IPG telah mencapai 100,23 persen.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terealisasi sebesar 69,55 dengan capaian kinerja sebesar 89,87 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir

RPD Tahun 2024–2026, capaian tersebut telah mencapai 86,67 persen. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pada tujuan meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah tahun 2025 mencapai 95,10 persen.

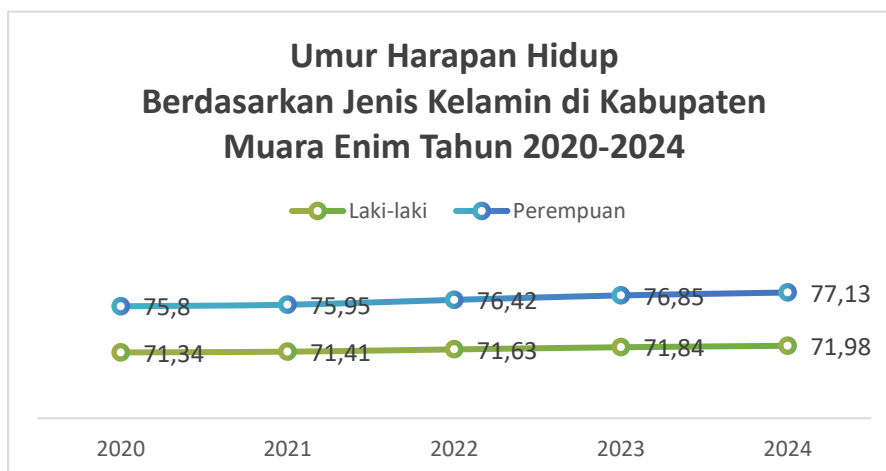
Pengukuran kesetaraan gender dalam pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut, digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator resmi pembangunan manusia berbasis kesetaraan gender. IPG digunakan untuk menggambarkan kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sedangkan IDG mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan strategis.

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

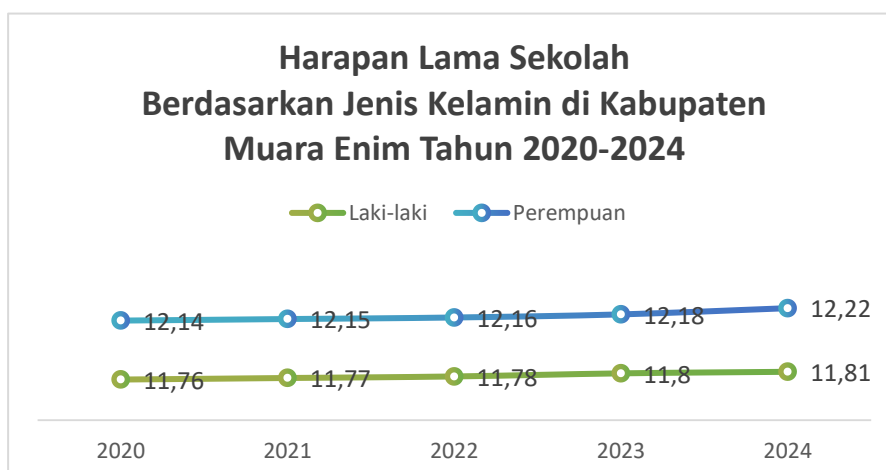
Komponen pembentuk IPG terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi. Dari keempat komponen pembentuk IPG tersebut, pada tahun 2024 Umur Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah didominasi oleh perempuan namun pengeluaran per kapita dan rata-rata lama sekolah didominasi oleh laki-laki.

Umur Harapan Hidup (UHH) berdasarkan jenis kelamin pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Secara umum, capaian UHH perempuan masih lebih tinggi dibandingkan dengan UHH laki-laki.

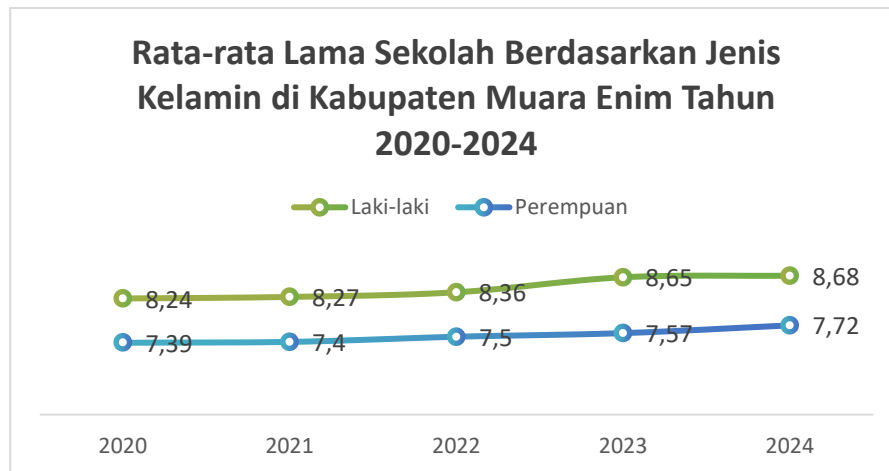
Pada tahun 2024, Umur Harapan Hidup perempuan tercatat sebesar 77,13 tahun, sedangkan Umur Harapan Hidup laki-laki sebesar 71,98 tahun. Informasi lebih rinci mengenai perkembangan UHH menurut jenis kelamin disajikan pada gambar berikut.



Harapan Lama Sekolah (HLS) berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, capaian HLS didominasi oleh penduduk perempuan sebesar 12,22 tahun, lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang mencapai 11,81 tahun. Kondisi ini menggambarkan adanya peluang pendidikan yang semakin baik bagi perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

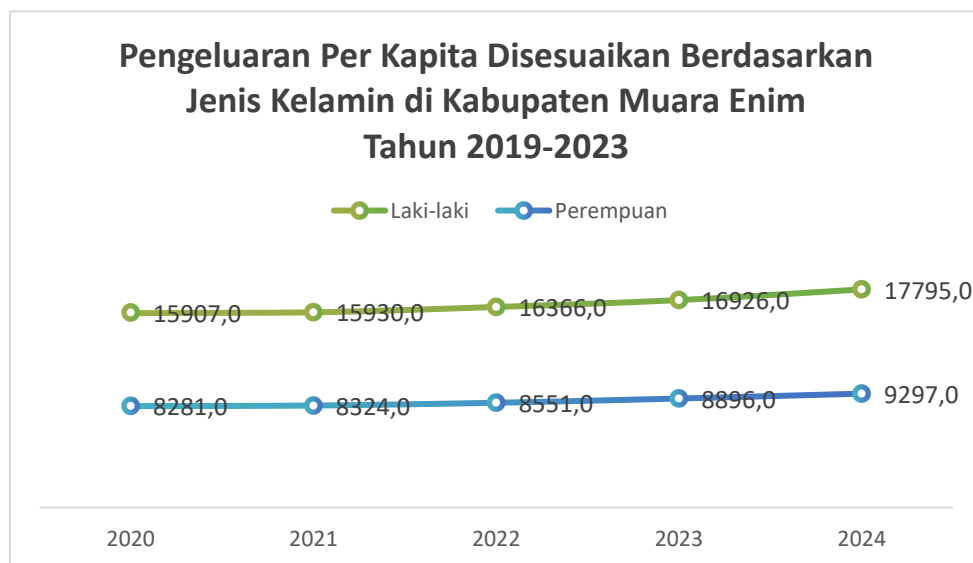


Pada tahun 2024, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan nilai sebesar 8,68 tahun, lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yang mencapai 7,72 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan laki-laki masih relatif lebih baik dibandingkan perempuan. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



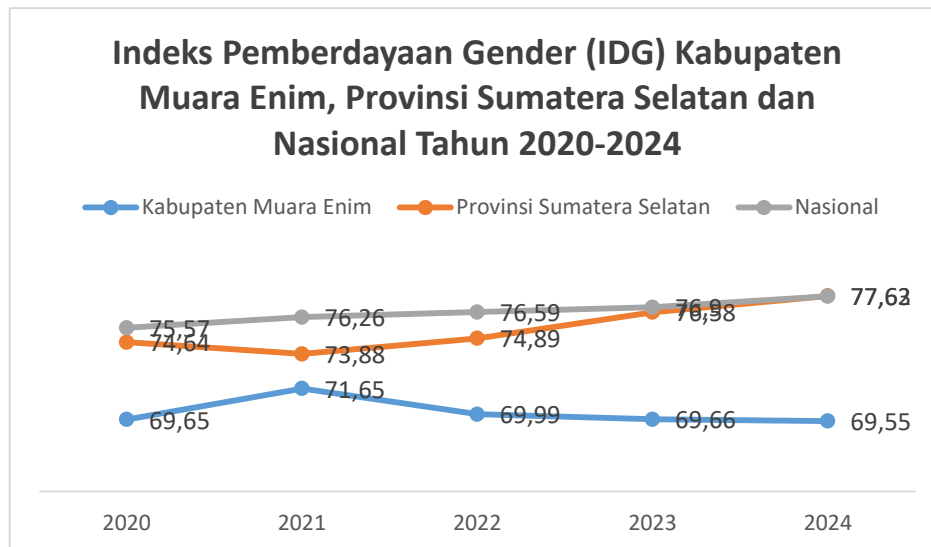
Sumber : DPPPA Kabupaten Muara Enim

Untuk pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2024 sebesar Rp.17.795 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.9.297 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

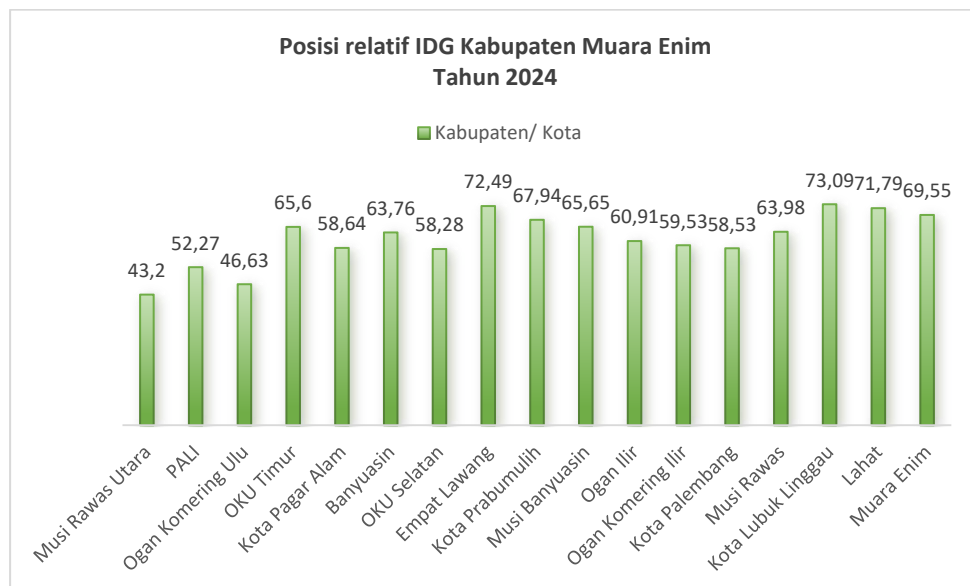


Sumber : DPPPA Kabupaten Muara Enim

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Muara Enim menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian IDG Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran serta perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih perlu terus diperkuat.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim



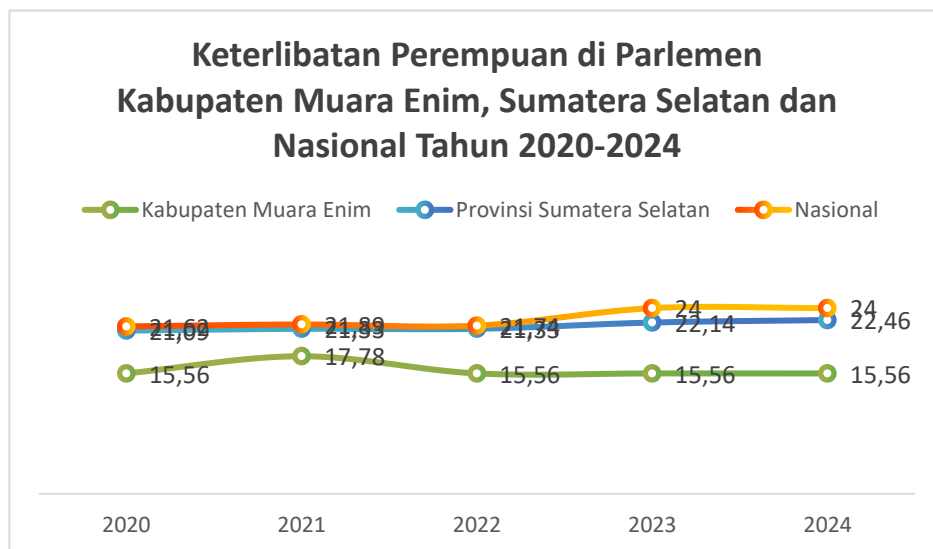
Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk melalui beberapa indikator utama, antara lain keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi perempuan dalam pendapatan atau kegiatan ekonomi. Indikator-indikator tersebut mencerminkan tingkat partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan pembangunan.

Gambaran indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Muara Enim secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

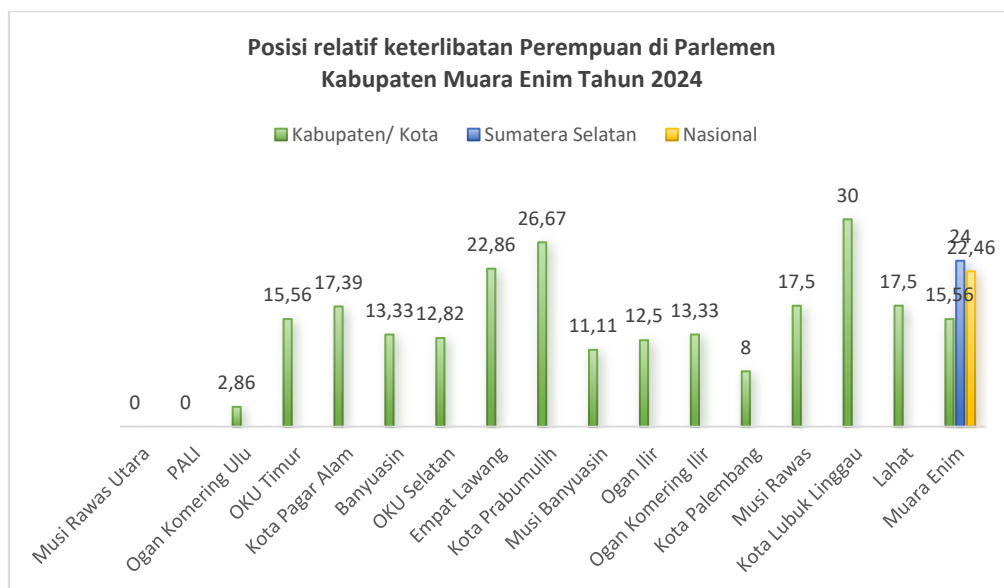
1) Keterlibatan perempuan di parlemen

Tingkat keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Muara Enim selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, keterlibatan perempuan tercatat sebesar 15,56 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 17,87 persen. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan hingga kembali berada pada angka 15,56 persen pada tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, tingkat keterlibatan perempuan di Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah rata-rata capaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik masih perlu terus ditingkatkan.



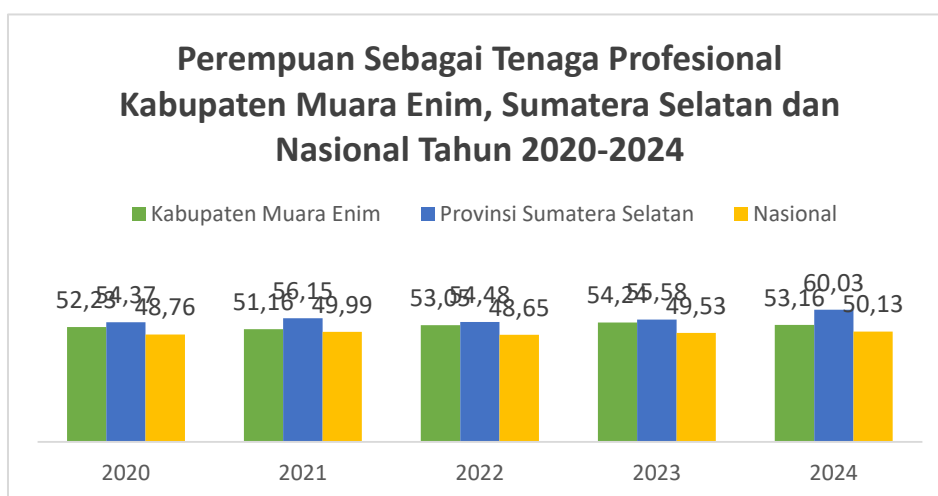
Sumber : DPPPA Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 2024, Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Muara Enim menempati posisi ke-7 tertinggi di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Muara Enim masih berada dibawah rata-rata capaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional, sehingga menunjukkan bahwa upaya peningkatan representasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan masih perlu terus diperkuat.



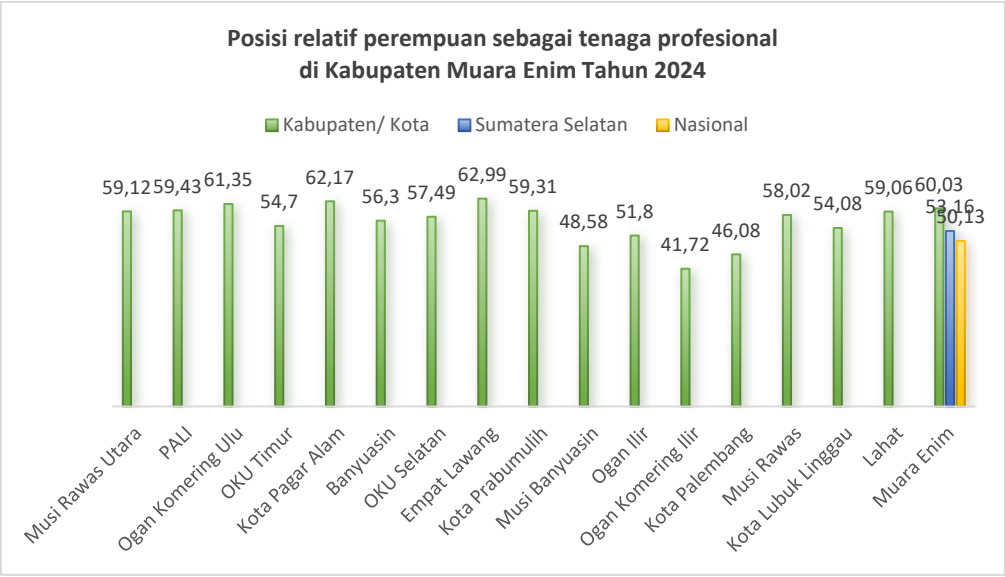
Sumber: DPPPA Kabupaten Muara Enim

- 2) Perempuan sebagai tenaga profesional
- Persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Muara Enim selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 53,23 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 51,16 persen. Selanjutnya, capaian tersebut kembali menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga mencapai 60,03 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor pekerjaan profesional serta meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah.



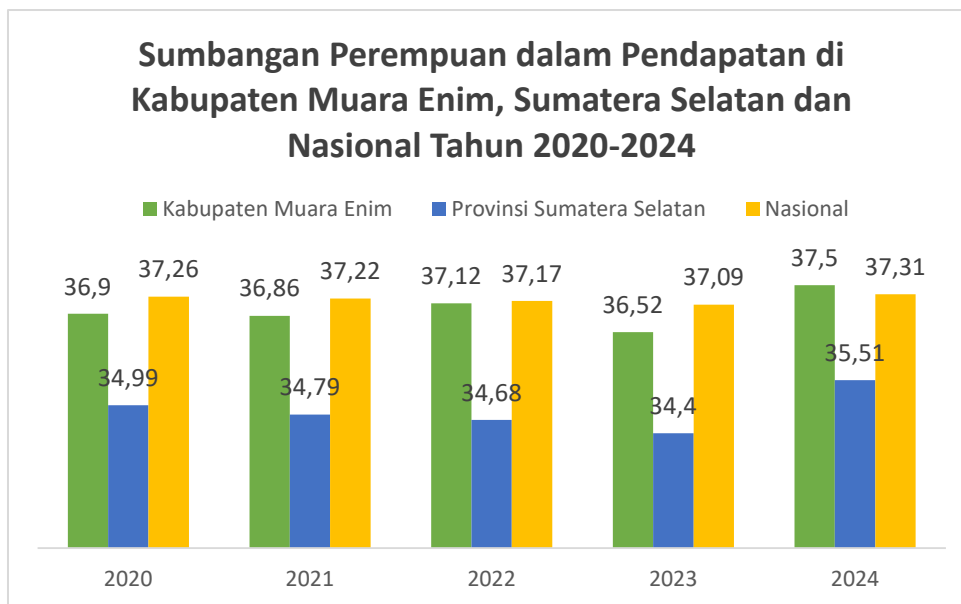
Sumber : DPPPA Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 2024, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Muara Enim berada pada urutan keempat terendah dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, capaian keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Muara Enim tercatat telah berada di atas rata-rata tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional, yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam peningkatan partisipasi perempuan pada sektor pekerjaan profesional.



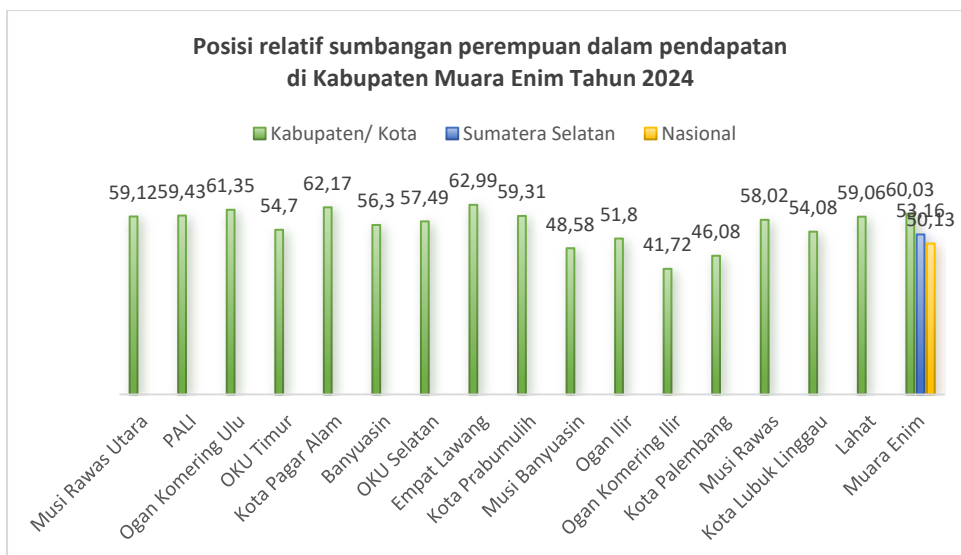
Sumber: DPPPA Kabupaten Muara Enim

- 3) Sumbangan pendapatan perempuan
- Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Muara Enim selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 kontribusi pendapatan perempuan tercatat sebesar 37,10 persen dan mengalami peningkatan menjadi 37,31 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut sejalan dengan tren yang terjadi pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional yang juga menunjukkan peningkatan kontribusi pendapatan perempuan pada tahun 2024.



Sumber : DPPP Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 2024, kontribusi pendapatan perempuan di Kabupaten Muara Enim berada pada urutan keempat terendah dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, capaian kontribusi pendapatan perempuan di Kabupaten Muara Enim telah berada di atas rata-rata tingkat Provinsi dan Nasional, yang menunjukkan semakin meningkatnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga.



Sumber : DPPP Kabupaten Muara Enim

Pencapaian tujuan meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah didukung oleh program dari dua sasaran strategis yaitu

meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

24. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan

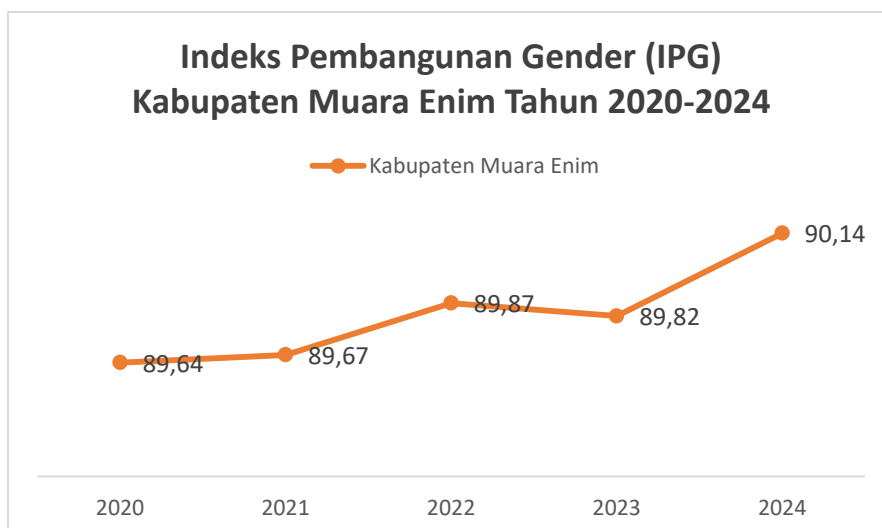
Tabel 2.29
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Persentase peningkatan IPG	Persen	0,36	0,09	0,36*	400	0,09	0,36*	400
Rata-rata capaian kinerja					400			400

*Nilai tahun sebelumnya

Data capaian IPG tahun 2025 masih dalam proses rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga menggunakan realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan capaian indikator gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Nilai IPG meningkat dari 89,82 pada tahun 2023 menjadi 90,14 pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 - 2026 maka realisasi kinerja di tahun 2025 telah tercapai 400 persen.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

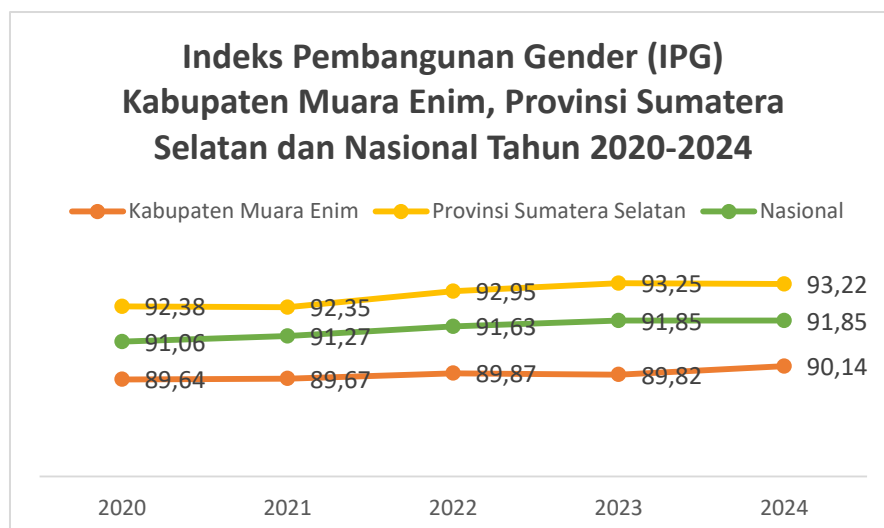


Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan grafik perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Muara Enim Tahun 2020–2024, terlihat bahwa capaian IPG menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat mengalami perlambatan pada periode tertentu. Pada tahun 2020 nilai IPG tercatat sebesar 89,64 dan meningkat menjadi 89,67 pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 89,87.

Pada tahun 2023 IPG mengalami sedikit penurunan menjadi 89,82, namun kembali meningkat cukup tinggi pada tahun 2024 hingga mencapai 90,14. Kenaikan pada tahun 2024 tersebut menunjukkan adanya perbaikan persentase peningkatan pembangunan gender yang mencerminkan semakin mengecilnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Muara Enim.

Secara umum, tren peningkatan IPG selama periode lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses, partisipasi, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara lebih setara. Meskipun demikian, fluktuasi yang masih terjadi menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat agar peningkatan IPG dapat berlangsung lebih stabil dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan grafik, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Muara Enim selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 90,19 dan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 90,25 pada tahun 2021 serta meningkat kembali menjadi 90,55 pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 90,47, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 90,87. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum persentase peningkatan IPG Kabupaten Muara Enim berada pada tren positif yang mencerminkan semakin membaiknya kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Apabila dibandingkan dengan capaian IPG tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, nilai IPG Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah rata-rata keduanya. Meskipun demikian, selisih capaian yang semakin kecil dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan gender di daerah, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Peningkatan IPG ini mengindikasikan bahwa akses perempuan terhadap pembangunan manusia terus mengalami perbaikan, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan gender agar capaian IPG Kabupaten Muara Enim dapat semakin mendekati bahkan melampaui rata-rata Provinsi maupun Nasional.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) disusun berdasarkan komponen yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup, dimensi pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Seluruh indikator tersebut disajikan berdasarkan jenis kelamin untuk menggambarkan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perkembangan IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan capaian pada ketiga dimensi pembangunan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja dan perluasan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis mampu mengurangi ketimpangan gender, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Ketimpangan gender masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian berkelanjutan, mengingat adanya perbedaan peran, akses, serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pembagian waktu antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan domestik dan publik, kesenjangan tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, serta adanya norma sosial dan budaya yang masih membatasi partisipasi perempuan pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, segregasi sektoral dan jenis pekerjaan, kecenderungan migrasi tenaga kerja laki-laki, serta keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif seperti modal usaha, teknologi, dan pelatihan turut berkontribusi terhadap terjadinya ketimpangan dalam partisipasi angkatan kerja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan yang responsif gender melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, serta penguatan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan guna mendorong terciptanya kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan yang bekerja di Kabupaten Muara Enim sebanyak 120.484 orang, sementara penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 201.362 orang. Jika dilihat berdasarkan status formal diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja

pada sektor formal di tahun 2025 sebanyak 47.777 orang masih didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43.388 orang dan perempuan sebanyak 4.389 orang.

Berdasarkan data Tahun 2023–2024, jumlah pekerja laki-laki di sektor formal di Kabupaten Muara Enim masih jauh lebih besar dibandingkan pekerja perempuan. Pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 43.388 pekerja laki-laki bekerja di sektor formal, sedangkan pekerja perempuan hanya sebanyak 4.389 orang. Selanjutnya pada Tahun 2024, jumlah pekerja sektor formal mengalami penurunan signifikan, dimana pekerja laki-laki tercatat sebanyak 774 orang dan pekerja perempuan sebanyak 51 orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam penyerapan tenaga kerja sektor formal masih relatif tinggi. Rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, adanya stereotip pembagian pekerjaan berdasarkan gender, serta dominasi tenaga kerja laki-laki pada sektor formal strategis seperti industri, konstruksi, dan energi yang menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Muara Enim.

Selain itu, perempuan cenderung lebih banyak bekerja pada sektor informal yang menawarkan fleksibilitas waktu kerja, meskipun sektor tersebut umumnya memiliki tingkat perlindungan kerja dan jaminan sosial yang lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan perluasan kesempatan kerja yang responsif gender guna mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal serta mengurangi kesenjangan gender di bidang ketenagakerjaan.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan ketimpangan gender, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Perbedaan akses, partisipasi, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan masih dipengaruhi oleh pembagian peran domestik dan publik, kesenjangan pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif, permodalan, dan peluang kerja.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), diperlukan kebijakan pembangunan yang responsif gender melalui :

1. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.
2. Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif.

3. Dukungan terhadap perempuan juga dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan usaha, penguatan UMKM dan koperasi, serta perluasan akses pasar.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup perempuan turut didorong melalui penyediaan layanan kesehatan, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, peningkatan gizi, serta perluasan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan guna mendukung partisipasi perempuan secara optimal dalam pembangunan daerah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengelolaan sistem data gender dan anak.

25. Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan

Tabel 2.30
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

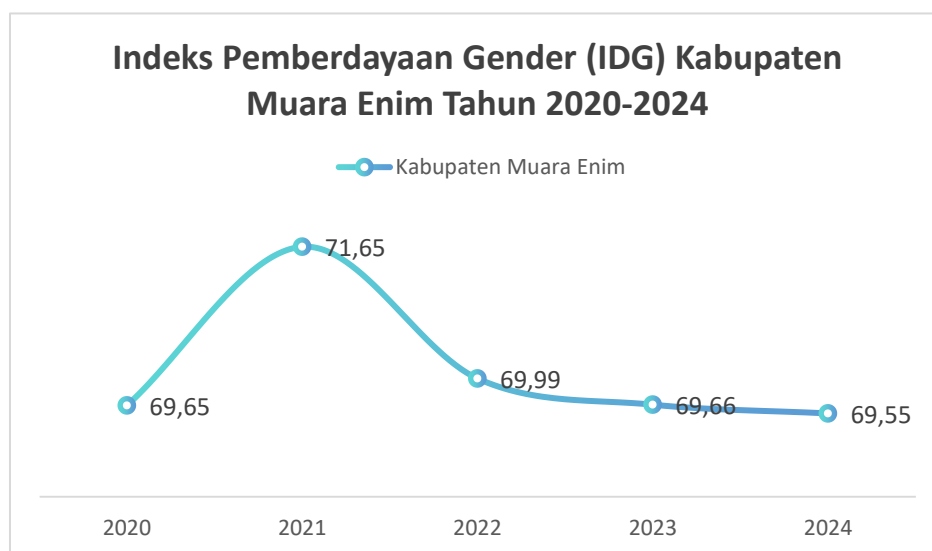
Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Persentase peningkatan IDG	Persen	- 0,16	2,87	- 0,16*	NA	2,87	- 0,16*	NA
Rata – rata capaian kinerja					NA			NA

*Nilai tahun sebelumnya

Realisasi persentase peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2025 beserta perbandingannya terhadap target akhir RPD Tahun 2024–2026 belum dapat dilakukan pengukuran, mengingat nilai IDG tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk melalui beberapa indikator utama, antara lain keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi perempuan dalam pendapatan atau kegiatan ekonomi. Indikator-indikator tersebut mencerminkan tingkat partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan pembangunan.

Nilai IDG menurun dari 69,66 pada tahun 2023 menjadi 69,55 pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar -0,16 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, seperti keterwakilan di parlemen, tenaga profesional, serta kontribusi terhadap pendapatan, masih perlu ditingkatkan secara lebih optimal.



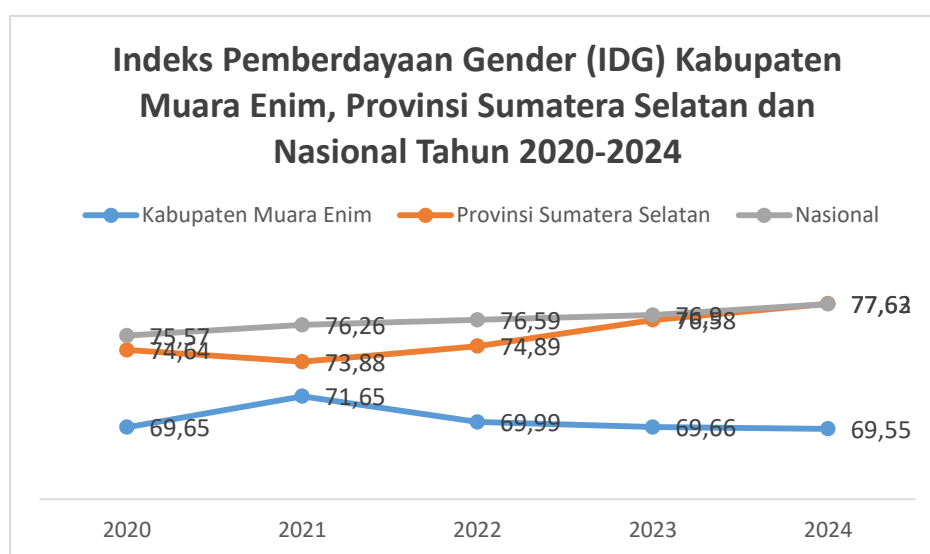
Berdasarkan grafik perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Muara Enim tahun 2020–2024, capaian IDG menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif dengan kecenderungan stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 nilai IDG tercatat sebesar 69,65 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 71,65. Namun demikian, pada tahun 2022 nilai IDG kembali menurun menjadi 69,99 dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 69,66 serta tahun 2024 sebesar 69,55.

Secara persentase, peningkatan IDG Kabupaten Muara Enim belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan cenderung mengalami perlambatan dibandingkan tren peningkatan IDG pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di Kabupaten Muara Enim masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Apabila dibandingkan secara relatif antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, posisi IDG Kabupaten Muara Enim masih berada pada kelompok menengah, sehingga menunjukkan perlunya penguatan kebijakan

pemberdayaan perempuan, khususnya dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, peningkatan perempuan sebagai tenaga profesional, serta peningkatan kontribusi perempuan terhadap pendapatan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, upaya peningkatan IDG ke depan perlu difokuskan pada perluasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja formal, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta penguatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

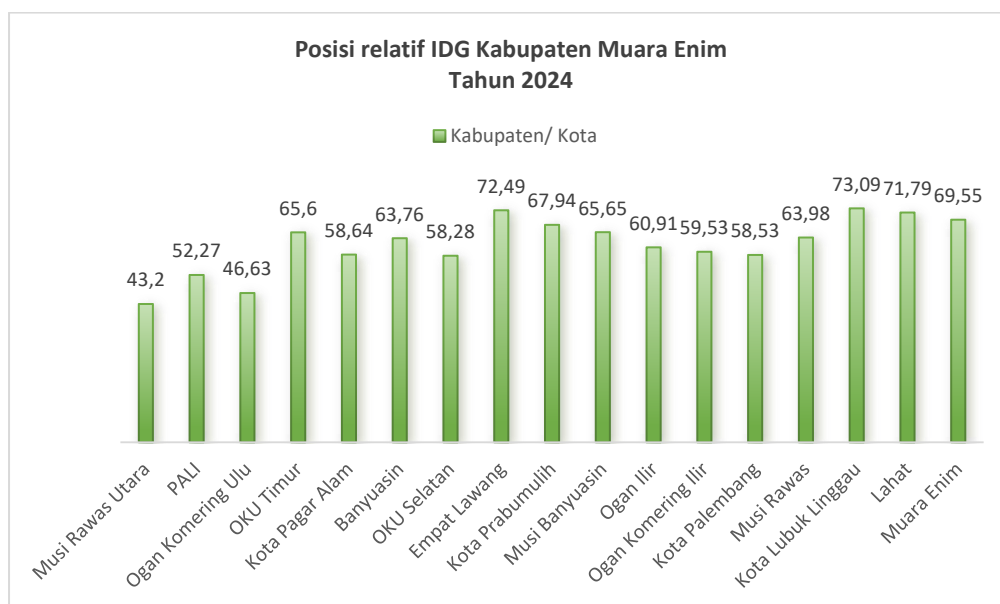
Penurunan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Muara Enim sebesar 0,11 poin menunjukkan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan pada beberapa dimensi utama belum berjalan secara optimal. IDG dibentuk oleh tiga dimensi utama, yaitu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga.

Dari ketiga dimensi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) secara langsung berkontribusi pada dimensi kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga melalui pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi perempuan. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi serta partisipasi perempuan dalam aktivitas produktif.

Namun demikian, dua dimensi lainnya, yaitu keterlibatan perempuan di lembaga legislatif serta perempuan sebagai tenaga profesional, berada di luar

kewenangan langsung DPPPA karena sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, struktur ketenagakerjaan daerah, tingkat pendidikan, serta peluang kerja pada sektor formal. Kondisi ini turut mempengaruhi capaian IDG secara keseluruhan. Selain faktor kewenangan, penurunan nilai IDG juga dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan penghitungan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pengukuran kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga. Sebagian perempuan yang berkontribusi pada kegiatan ekonomi sektor informal, seperti perdagangan skala kecil atau usaha rumah tangga, masih tercatat dalam kategori ibu rumah tangga sehingga kontribusi ekonominya belum sepenuhnya tercermin dalam indikator pendapatan perempuan. Hal tersebut berdampak pada rendahnya nilai kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga dalam perhitungan IDG.

Dengan demikian, peningkatan capaian IDG memerlukan sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan kebijakan yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada sektor formal, jabatan profesional, serta ruang pengambilan keputusan publik.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Apabila dibandingkan secara relatif antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, posisi IDG Kabupaten Muara Enim masih berada pada kelompok menengah, sehingga menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam peningkatan keterwakilan perempuan di

parlemen, peningkatan perempuan sebagai tenaga profesional, serta peningkatan kontribusi perempuan terhadap pendapatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, upaya peningkatan IDG ke depan perlu difokuskan pada perluasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja formal, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta penguatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui penguatan kapasitas baik *hard skills* maupun *soft skills*, yang mencakup peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, pola pikir kritis, keterampilan komunikasi, serta keberanian dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Upaya peningkatan kesetaraan gender pada bidang pendidikan dilakukan melalui jalur pendidikan formal, khususnya bagi perempuan dari kelompok pra-sejahtera guna memperluas akses dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, melalui jalur pendidikan nonformal dilakukan penguatan kapasitas perempuan melalui program pendidikan keaksaraan, pengembangan keterampilan hidup (*life skills*), peningkatan kemampuan berpikir kritis, manajerial, serta pengembangan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Pengarusutamaan gender dalam urusan tenaga kerja merupakan bagian penting dari upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan di dunia kerja. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melakukan berbagai langkah strategis melalui regulasi, antara lain Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Kedua regulasi tersebut menekankan bahwa lingkungan kerja harus didesain tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjamin perlindungan, kenyamanan, dan penghargaan terhadap hak - hak pekerja perempuan.

Sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, khususnya dalam peningkatan kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan

kegiatan pelatihan usaha berbasis keluarga yang bertujuan meningkatkan kapasitas keterampilan, produktivitas, serta kemandirian ekonomi perempuan.

Pelatihan usaha berbasis keluarga diarahkan pada penguatan kemampuan kewirausahaan perempuan, pengelolaan usaha rumah tangga, akses pemasaran produk, serta peningkatan nilai tambah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perempuan. Melalui program ini diharapkan perempuan tidak hanya berperan dalam sektor domestik, tetapi juga mampu berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi perempuan akan didorong melalui sinergi lintas sektor, termasuk fasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi perempuan, sehingga partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif dapat meningkat secara berkelanjutan dan berdampak pada perbaikan capaian IDG di Kabupaten Muara Enim. Dukungan terhadap peningkatan partisipasi perempuan juga perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana serta ruang publik yang aman, inklusif, dan responsif gender, guna menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif bagi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

26. Analisis Capaian Tujuan 7 Meningkatnya pemenuhan hak anak

Tabel 2.31
Analisis Pencapaian Tujuan 7
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Predikat Kabupaten/Kota layak anak	Kategori	Nindya *	Nindya	Nindya *	100	Utama	Nindya*	85
Rata – rata capaian kinerja					100			85

*) Penilaian mandiri

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025, capaian indikator sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak Kabupaten Muara Enim memperoleh kategori Nindya, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dan berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024–2026, maka realisasi tersebut telah mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan.

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, serta lembaga masyarakat secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan KLA secara nasional berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan hak anak dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, penilaian KLA dilakukan melalui pemenuhan indikator yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi identitas anak, akses informasi layak anak, serta partisipasi anak dalam pembangunan.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, mencakup pengasuhan yang layak, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan ketahanan keluarga.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan sehat.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, termasuk penyediaan sekolah ramah anak serta ruang kreativitas dan rekreasi anak;
5. Perlindungan khusus, yang mencakup perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan situasi darurat.

Predikat Nindya menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim telah mampu memenuhi sebagian besar indikator pemenuhan hak anak secara lintas sektor, dengan tingkat capaian evaluasi berada pada kategori menengah tinggi dalam sistem penilaian nasional KLA. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang

anak secara optimal melalui sinergi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Muara Enim antara lain sebagai berikut:

1. Menjalin koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui sinergi perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, lembaga masyarakat, serta sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Muara Enim.
2. Mengakomodasi partisipasi dan aspirasi anak dalam proses pembangunan melalui pembentukan dan pembinaan Forum Anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta pelibatan anak dalam Musrenbang.
3. Membangun kemitraan dengan dunia usaha melalui pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Muara Enim guna mendukung pemenuhan hak anak melalui program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan sarana ramah anak.
4. Melakukan penguatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak melalui pembentukan serta optimalisasi peran Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).
5. Menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui UPTD PPA, termasuk layanan pengaduan, penanganan, dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Mengembangkan Sekolah Ramah Anak serta melaksanakan upaya pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
7. Meningkatkan derajat kesehatan anak melalui percepatan penurunan stunting, intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan posyandu, serta pelayanan kesehatan ramah anak.
8. Melaksanakan program pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi, edukasi masyarakat, dan penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.
9. Mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya menciptakan lingkungan desa yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

10. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan anak, seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai bentuk pemenuhan hak sipil anak.
11. Menyediakan ruang bermain ramah anak dan fasilitas publik yang aman, termasuk taman dan ruang terbuka hijau yang mendukung tumbuh kembang anak.
12. Melaksanakan edukasi pengasuhan (*parenting*) dan penguatan peran keluarga melalui kegiatan pembinaan keluarga serta layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Selanjutnya peningkatan kualitas penyelenggaraan KLA perlu terus diarahkan pada penguatan kelembagaan gugus tugas KLA, integrasi program ramah anak dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendukung terwujudnya Kabupaten Muara Enim menuju kategori KLA Utama secara berkelanjutan. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam memastikan pemenuhan hak anak pada seluruh klaster Kabupaten Layak Anak antara lain melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan perlindungan anak, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan akses anak terhadap layanan kesehatan dasar, pendidikan yang layak, lingkungan pengasuhan yang aman dan ramah anak, serta perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi rentan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga dan lembaga masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah anak. Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga terus meningkatkan partisipasi dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, dan komunitas dalam mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pencapaian tujuan pemenuhan hak anak didukung oleh program dari sasaran strategis meningkatkan desa ramah perempuan dan peduli anak.

27. Analisis Capaian Sasaran Strategis
Meningkatkan desa ramah perempuan dan peduli anak

Tabel 2.32
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2025	
Persentase desa ramah perempuan dan peduli anak	Persen	4,07	10,20	8,20	80,39	12,20	8,20	67,21
Rata – rata capaian kinerja					80,39			67,21

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2025 terdapat sebanyak 21 desa dari total 256 desa di Kabupaten Muara Enim yang telah mengimplementasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dengan demikian realisasi indikator sasaran sebesar 8,20 persen dengan capaian kinerja sebesar 53,53 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Muara Enim tahun 2024–2026, maka capaian kinerja indikator tersebut tercapai sebesar 67,21 persen, sehingga masih diperlukan upaya percepatan implementasi DRPPA pada desa-desa lainnya guna mendukung pencapaian target pembangunan yang responsif gender dan ramah anak secara berkelanjutan.

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai upaya percepatan pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak hingga pada tingkat pemerintahan desa. Program ini bertujuan mewujudkan desa yang responsif gender, inklusif, aman, serta mampu menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Pelaksanaan DRPPA dilaksanakan melalui pemenuhan 10 indikator utama, meliputi penguatan kelembagaan perempuan dan anak di desa, ketersediaan data pilah gender dan anak, regulasi desa yang mendukung DRPPA, dukungan pembiayaan desa, peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan desa, pemberdayaan ekonomi perempuan, pengasuhan anak berbasis hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, penghapusan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan usia anak.

Target capaian Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 10,20 persen atau setara dengan 26 desa. Namun demikian, realisasi capaian hingga akhir tahun 2025 baru mencapai 21 desa. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan pendampingan, pembinaan, serta fasilitasi desa dalam pemenuhan indikator DRPPA.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Penetapan DRPPA 2025 melalui SK Bupati No 763/ KPTS/ DPPP/ 2025 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
2. Kegiatan sosialisasi, pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi DRPPA.
3. Pelatihan sahabat perempuan dan anak dengan jumlah peserta 60 orang dari 21 desa DRPPA.
4. Pelatihan kewirausahaan perempuan di tiga desa DRPPA dengan jumlah peserta 90 orang.
5. Monitoring pelaksanaan DRPPA ke lima desa DRPPA.
6. Penyuluhan pencegahan perkawinan anak di tiga desa DRPPA dengan jumlah peserta 150 orang.
7. Penyusunan strategi daerah pencegahan dan penanganan perkawinan anak 2025 - 2029.

Pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan percepatan (akselerasi) pencapaian Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak guna mengejar target yang belum tercapai pada tahun 2025. Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui :

1. Pelaksanaan strategi daerah pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui penyuluhan, pertemuan stakeholder, layanan konseling keluarga dengan kasus perkawinan anak.
2. Pelatihan kewirausahaan perempuan.

Program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Muara Enim antara lain program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pemenuhan hak anak, serta program perlindungan khusus anak, yang dilaksanakan secara terpadu guna mewujudkan lingkungan desa yang aman, setara, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SESUAI PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN MUARA ENIM 2025 - 2029

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025 - 2029 ditetapkan sebagai berikut :

BUPATI MUARA ENIM

PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison

Jabatan : Bupati Muara Enim

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Enim,

2025

BUPATI MUARA ENIM,


EDISON

PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,67
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Ketimpangan Gender	0,546
3	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,01
4	Meningkatnya perekonomian Masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita	193,73
5	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,307
6	Menurunkan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,88
7	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	9,49
8	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	3,6
9	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana	145,91
10	Meningkatnya ketahanan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,41
11	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	81

**PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025**

No	Program	Anggaran
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.297.495.500
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	41.515.610.880
3	Program Hubungan Industrial	535.092.300
4	Program Kawasan Permukiman	36.297.751.500
5	Program Kewaspadaan Daerah	7.768.408.541
6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.611.200.300
7	Program Koordinasi Kelerutraman dan Keterlibatan Umum	2.164.335.544
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.061.389.370
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.192.924.742
10	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	84.548.788
11	Program Pemasaran Pariwisata	1.939.991.335
12	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	877.857.250
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.413.302.054
14	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.251.861.395
15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	6.039.373.710
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.722.091.464
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.472.702.455
18	Program Pemberdayaan Sosial	12.291.351.140
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.128.595.925
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.062.307.443
21	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	225.496.700
22	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	703.561.010
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.963.841.734
24	Program Pembinaan Perputakaan	3.346.831.851
25	Program Pembinaan Sejarah	150.707.631
26	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	894.441.490
27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	305.703.344.428
28	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.254.097.882
29	Program Penanganan Bencana	935.222.800
30	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.010.785.900
31	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	116.490.100
32	Program Penganggungan Bencana	2.720.710.453
33	Program Penataan Bangunan Gedung	27.744.639.790
34	Program Penataan Desa	12.204.574.110

No	Program	Anggaran
35	Program Penatagunaan Tanah	315.367.184
36	Program Pencatatan Sipil	419.757.016
37	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.734.430.054
38	Program Pendaftaran Penduduk	1.895.779.213
39	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.899.952.025
40	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	485.050.585
41	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.672.077.860
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	482.960.400
43	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	56.322.615
44	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	504.197.392
45	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	316.837.600
46	Program Pengawasan Keamanan Pangan	505.698.100
47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.592.790.050
48	Program Pengelolaan Anisip	611.371.235
49	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.292.331.155
50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.498.396.321
51	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25.491.280.512
52	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.767.262.674
53	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	140.429.288
54	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	404.742.770
55	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	739.323.485
56	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.754.464.000
57	Program Pengelolaan Kelembagaan Masyarakat (Kehati)	329.265.300
58	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	510.308.943.018
59	Program Pengelolaan Pelayanan	406.571.000
60	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.432.151.921
61	Program Pengelolaan Pendidikan	244.542.071.069
62	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.855.419.277
63	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.029.674.246
64	Program Pengelolaan Persampahan	13.740.396.640
65	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	142.362.600
66	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	498.933.714
67	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	257.801.875
68	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	56.074.834.886
69	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.407.765.100

No	Program	Anggaran
100	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	251.683.000
101	Program Peningkatan Keterlaksanaan Dan Keterlibatan Umum	1.397.951.360
102	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	411.864.100
103	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	363.302.081
104	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	211.778.265
105	Program Peningkatan Reran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Akademi Sudastra Politik	4.403.964.150
106	Program Peningkatan Pemasaran, Sarana Dan Fasilitas Umum (Pau)	49.969.901.435
107	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	37.658.404.765
108	Program Penyediaan dan Pengembangan Pemasaran Pertanian	33.166.326.179
109	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perikanan	17.302.513.608
110	Program Penyelenggaraan Jalan	175.460.577.265
112	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.286.114.015
113	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.705.603.794
114	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.126.744.162
115	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.205.569.500
116	Program Penyelenggaraan Pemasaran Untuk Pengembangan Informasi	611.657.300
117	Program Penyelenggaraan Penindakan Untuk Pengembangan Informasi	573.465.600
118	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.135.572.496
119	Program Penyelenggaraan Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	53.207.878.829
120	Program Penyelenggaraan Sertifikasi Tanah Garapan	181.296.911
121	Program Penyelenggaraan Pertanian	2.785.467.800
122	Program Penyelenggaraan dan Pembangunan	5.793.081.880
123	Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Industri	562.616.600
124	Program Penyelenggaraan Lingkungan Hidup	63.457.079
125	Program Penyelenggaraan Tenaga Kerja	275.204.113
126	Program Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.322.540.461
127	Program Perizinan Usaha Pertanian	1.017.757.400
128	Program Penyelenggaraan dan Jaminan Sosial	766.590.800
129	Program Penyelenggaraan dan Penyelamatan Anisip	129.506.700
130	Program Penyelenggaraan Khusus Anak	566.236.473
131	Program Penyelenggaraan Perempuan	584.954.395

No	Program	Anggaran
70	Program Pengelolaan Tanah Murni Pahlawan	365.903.285
71	Program Pengelolaan Tanah Kosong	598.137.454
72	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	404.999.100
73	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.290.052.744
74	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	86.640.400
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kesejahteraan	37.899.146.959
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kependudukan	4.342.643.160
77	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	599.999.640
78	Program Pengembangan Kebudayaan	1.478.251.600
79	Program Pengembangan Kesehatan Tradisional Regional	834.795.672
80	Program Pengembangan Kurikulum	645.197.300
81	Program Pengembangan Perumahan	3.178.743.000
82	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Sampah Limbah Regional	3.091.995.000
83	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.420.910.281
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	550.000.000
85	Program Pengembangan Umum	2.026.905.150
86	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	123.657.115
87	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.703.517.200
88	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.348.196.000
89	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.065.274.600
90	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.565.049.660
91	Program Pengendalian Penduduk	786.693.504
92	Program Pengawasan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99.600.300
93	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	175.608.800
94	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.915.366.705
95	Program Pengawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.224.259.595
96	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	376.311.500
97	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.141.698.542
98	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.582.251.400
99	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.452.127.783

No	Program	Anggaran
132	Program Penurunan Kebayakan, Peningkatan dan Asistensi	3.109.350.940
133	Program Peningkatan Penanaman Modal	757.907.900
134	Program Rehabilitasi Sosial	623.710.200
135	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	323.745.894
136	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	815.037.380
137	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	384.907.675
	Total	2.025.590.323.328

Jumlah program sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) program dengan anggaran sebesar Rp. 2.025.590.323.328 (dua triliun dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).



Muara Enim, 2025

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.33
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,67	73,77	100,14	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,548	0,550*	99,64	Baik
3.	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,01	5,42	77,31	Baik
4.	Meningkatnya perekonomian Masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	193,73	182,11*	94	Baik
5.	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,307	0,258	118,99	Sangat Baik
6.	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,88	4,13	93,95	Baik
7.	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	%	9,49	9,45	100,42	Sangat Baik
8.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,6	3,359***	93,30	Baik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	didukung infrastruktur berkualitas						
9.	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	145,91	168,35****	86,67	Baik
10.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,41	5,42	100,18	Sangat Baik
11.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81	74,94**	92,52	Baik

*) Nilai tahun sebelumnya

**) Hasil sementara

***) Nilai perhitungan terakhir

****) Nilai dengan metode perhitungan terbaru

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 tujuan dan 11 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 11 indikator sasaran terpilih, diketahui bahwa 4 indikator sasaran berada pada kategori Sangat Baik, 7 indikator pada kategori Baik.

Secara umum, mayoritas indikator sasaran telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara keseluruhan pada kategori Baik, yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang cukup optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 2.34
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,1	73,67	73,77	100,14
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,550	0,548	0,550*	99,64
3.	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,89	7,01	5,42	77,31
4.	Meningkatnya perekonomian Masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	182,11	193,73	182,11*	94
5.	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,307	0,258	118,99
6.	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,09	3,88	4,13	93,95
7.	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	%	9,79	9,49	9,45	100,42
8.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,36	3,6	3,359***	93,30

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas						
9.	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	147.41	145,91	168,35****	86,67
10.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	Indeks	5.387	5,41	5,42	100,18
11.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	81	74,94**	92,52

*) Nilai tahun sebelumnya

**) Hasil sementara

***) Nilai perhitungan terakhir

****) Nilai dengan metode perhitungan terbaru

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD KABUPATEN MUARA ENIM 2025 - 2029

Tabel 2.35
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD 2025 - 2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Capaian 2025	% Terhadap Target Akhir RPJMD 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,93	73,77	97,16

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2025- 2029	Capaian 2025	% Terhadap Target Akhir RPJMD 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,540	0,550*	98,18
3.	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,28	5,42	65,46
4.	Meningkatnya perekonomian Masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	217,92	182,11*	83,57
5.	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,295	0,258	114,34
6.	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,54	4,13	85,71
7.	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	%	8,29	9,45	87,72
8.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	4,07	3,359** *	82,53

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2025- 2029	Capaian 2025	% Terhadap Target Akhir RPJMD 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	yang didukung infrastruktur berkualitas					
9.	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	139,91	168,35* ***	83,11
10.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,48	5,42	98,91
11.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	74,94**	88,16

*) Nilai Tahun Sebelumnya

**) Hasil Sementara

***) Nilai Perhitungan Terakhir

****) Nilai dengan metode perhitungan terbaru

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 11 indikator tujuan dan sasaran strategis, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 2025–2029 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada dalam tahapan menuju target yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan indikator tersebut, 1 indikator telah melampaui target akhir RPJMD, yaitu Indeks Gini dengan capaian sebesar 114,34 persen. Sementara itu, beberapa indikator telah mendekati target akhir RPJMD, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (97,16 persen), Indeks Ketimpangan Gender (98,18 persen), dan Indeks Kota Toleran (98,91 persen). Adapun indikator lainnya masih memerlukan upaya percepatan pencapaian agar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Laporan keuangan merupakan instrumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Salah satu komponen laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang memuat gambaran mengenai sumber pendapatan, alokasi belanja, serta penggunaan sumber daya keuangan selama satu periode anggaran, disertai perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Secara ringkas, Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33	3.914.103.838.058,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31	382.437.801.698,52
Pajak Daerah	195.567.613.344,00	194.665.442.709,58	99,53	127.905.669.439,00
Retribusi Daerah	186.323.243.953,00	173.275.335.331,76	92,99	113.062.672.451,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.552.719.027,07	26.552.719.027,07	100,00	31.147.873.242,38
Lain-lain PAD yang Sah	30.745.227.322,96	54.876.102.665,65	178,48	110.321.586.565,75
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31	382.437.801.698,52
PENDAPATAN TRANSFER	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.524.646.144.599,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.384.409.910.660,00	3.178.794.712.284,00	93,92	3.198.030.938.052,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56	326.615.206.547,22
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56	326.615.206.547,22
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.524.646.144.599,22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97	7.019.891.760,42
Pendapatan Hibah	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02	727.192.879,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.146.225.344,00	6.766.237.573,08	163,19	6.292.698.881,42
JUMLAH LAIN LAIN	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97	7.019.891.760,42

Tabel 2.36
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
JUMLAH PENDAPATAN	4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33	3.914.103.838.058,16
BELANJA DAERAH	4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54	3.917.575.460.242,96
BELANJA OPERASI	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23	2.236.645.214.872,58
Belanja Pegawai	1.413.990.292.944,69	1.228.547.741.022,42	86,88	1.059.547.345.085,03
Belanja Barang dan Jasa	1.170.205.111.116,48	1.047.806.287.421,44	89,54	997.240.572.419,55
Belanja Bunga	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,92	7.485.321.723,00
Belanja Subsidi	1.206.750.000,00	449.328.000,00	37,23	0,00
Belanja Hibah	79.919.408.400,00	75.397.682.999,00	94,34	172.371.975.645,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23	2.236.645.214.872,58
BELANJA MODAL	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69	1.173.510.368.320,38
Belanja Modal Tanah	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28	10.194.664.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.352.258.207,17	312.210.171.967,00	93,37	160.953.164.905,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.727.427.152,00	298.572.404.158,98	86,61	202.931.222.921,64
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	782.372.452.613,69	721.758.065.918,32	92,25	786.229.627.683,74
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.997.009.365,00	12.982.234.349,00	99,88	11.788.479.750,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.050.000.000,00	1.461.855.900,00	71,31	1.413.209.060,00
JUMLAH BELANJA MODAL	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69	1.173.510.368.320,38
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00

Tabel 2.36
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
BELANJA TRANSFER	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72	506.699.877.050,00
Belanja Bagi Hasil	38.193.085.729,00	38.181.085.729,00	99,96	22.333.351.461,00
Belanja Bantuan Keuangan	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,63	484.366.525.589,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72	506.699.877.050,00
JUMLAH BELANJA	4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54	3.917.575.460.242,96
SURPLUS/DEFISIT	(632.081.631.766,00)	(325.516.147.209,10)	51,49	(3.471.622.184,80)
PEMBIAYAAN DAERAH	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34	654.021.770.083,21
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	560.300.286.213,21
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.130,00
Penyertaan Modal Daerah	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	99,99	6.278.516.130,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.130,00
PEMBIAYAAN NETTO	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34	654.021.770.083,21

Tabel 2.36
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	308.755.484.560,27	0,00	650.550.147.898,41

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing			100,14
	Program pendidikan dan tenaga pedidikan	(1.915.750.062,00)	
	Program pengembangan kurikulum	(300.644.400,00)	
	Program pengembangan kebudayaan	(823.285.000,00)	
	Prorgram pembinaan keluarga berencana (kb)	(329.682.828,06)	
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	(131.919.570,00)	
Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah			94
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	(127.855.125,00)	
Meningkatnya perlindungan sosial adaptif			100,42
	Program pengembangan umkm	(155.487.000,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	(350.861.850,00)	
	Program pelayanan penanaman modal	(419.916.606,00)	
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	(398.520.500,00)	
	Program pengelolaan perikanan tangkap	(146.772.388,00)	
	Program pengelolaan perikanan budidaya	(53.219.686,00)	
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	(46.512.204,00)	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	(229.412.379,50)	
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	(200.648.800,00)	
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	(873.986.562,00)	
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	(1.115.032.775,00)	
	Program perencanaan dan pembangunan industri	(295.399.200,00)	
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	(142.300.937,00)	
	Program pengelolaan pendapatan daerah	(1.757.815.496,50)	
	Program pemberdayaan sosial	(917.410.603,25)	
	Program rehabilitasi sosial	(126.487.275,00)	
	Program perlindungan dan jaminan sosial	(295.517.425,00)	
	Program penanganan kerawanan pangan	(97.978.700,00)	
	Program administrasi pemerintahan desa	(2.315.511.012,00)	
	Program penataan desa	(393.560.750,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja			93,95
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	(477.793.820,00)	
	Program hubungan industrial	(275.109.300,00)	
Meningkatnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas			93,30
	Program penyelenggaraan penataan ruang	(591.526.362,00)	
	Program pengembangan perumahan	(377.218.900,00)	
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	(516.752.433,00)	
	Program pengelolaan pelayaran	(2.919.900,00)	
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	(342.276.200,00)	
	Program pengelolaan persampahan	(181.006.700,00)	
Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah			86,67
	Program penanggulangan bencana	(570.549.986,00)	
	Program penanganan bencana	(37.521.200,00)	
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamat kebakaran dan penyelamat non kebakaran	(532.191.752,00)	
Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat			100,18
	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	(354.865.160,00)	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	(178.720.880,00)	
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	(81.196.000,00)	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik			92,52
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	(54.493.330.264,85)	
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	(842.396.700,00)	
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	(812.194.580,00)	
	Program penelitian dan pengembangan daerah	(2.609.645.467,00)	
	Program pendaftaran penduduk	(147.905.734,00)	
	Program pencatatan sipil	(129.606.464,00)	
	Program pengelolaan aplikasi informatika	(474.559.300,00)	
	Program pengelolaan arsip	(381.611.095,00)	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	(2.128.129.673,00)	
	Program perekonomian dan pembangunan	(1.552.206.901,00)	
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	(495.808.675,15)	
Total		82.548.532.581,31	

Total efisiensi anggaran dari 50 program sebesar Rp. 82.548.532.581,31 dialihkan ke program lain yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pengembangan penyediaan sistem air minum, sistem drainase, peningkatan PSU, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

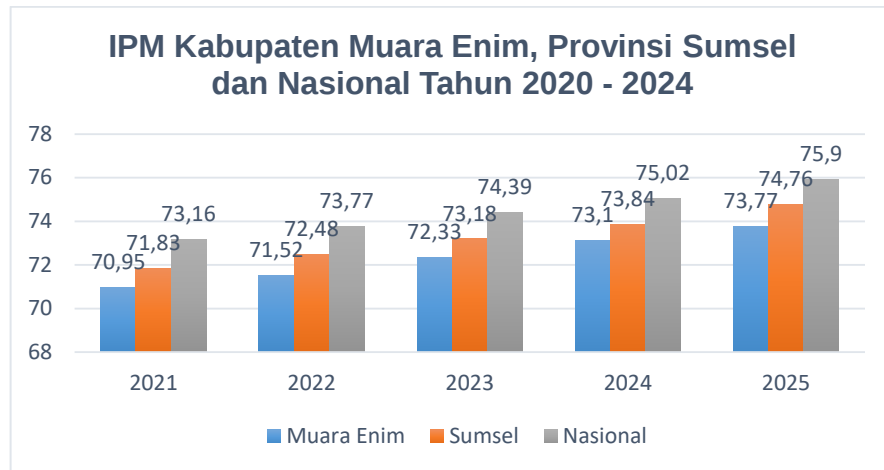
1. Capaian Tujuan 1 Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing

Tabel 2.37
Analisis Pencapaian Tujuan 1
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mandiri dan Berdaya Saing

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,10	73,67	73,77	100,14	75,93	73,77	97,16
Rata – rata capaian kinerja					100,14			97,16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2025 dari target IPM sebesar 73,67 terealisasi sebesar 73,77 dengan capaian kinerja sebesar 100,14 persen berada dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 capaian kinerjanya sebesar 97,16 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan sehat yang tercermin dari angka harapan hidup, pengetahuan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang dicerminkan oleh pengeluaran per kapita riil. IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2025 masih berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,76 dan IPM Nasional sebesar 75,90.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya sebagai berikut :

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

1. Gerakan perbaikan gizi dan edukasi gizi keluarga.
2. Pelayanan imunisasi dan deteksi dini penyakit.
3. Optimalisasi Posyandu dan Puskesmas untuk memperluas akses layanan kesehatan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan cek kesehatan keliling (cekling).
5. Penerapan pendekatan pelayanan kesehatan berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui pengembangan puskesmas serta rehabilitasi pustu sesuai standar pelayanan.
6. Peningkatan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan.
7. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, media edukasi kesehatan, serta kampanye perilaku hidup sehat di masyarakat.
8. Selain itu, indikator pendukung kesehatan keluarga menunjukkan capaian yang relatif baik, khususnya pada akses air bersih, sanitasi layak, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap, serta kepesertaan jaminan kesehatan.

B. Dimensi Pengetahuan

1. Pelatihan kompetensi guru.
2. Pelatihan wirausaha produktif.
3. Pengembangan UMKM berbasis komoditas unggulan.
4. Melaksanakan program penanganan kemiskinan ekstrem.

5. Optimalisasi layanan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
 6. Peningkatan akses infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
 7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan.
 8. Optimalisasi pelaksanaan program wajib belajar.
 9. Melaksanakan program wajib belajar melalui peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.
 10. Menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pendidikan nonformal dan kesetaraan guna mendukung operasional satuan pendidikan.
 11. Memberikan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, atribut sekolah, dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
 12. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan guna menekan angka putus sekolah.
 13. Mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan kegiatan pembelajaran masyarakat.
 14. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan;
 15. Sinergi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan masyarakat.
- C. Dimensi Standar Hidup Layak
1. Pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Pemerintah Provinsi sebagai upaya perlindungan pendapatan pekerja.
 2. Pembangunan dan perbaikan sarana perdagangan guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
 3. Pelaksanaan operasi pasar murah di 44 lokasi pada 22 Kecamatan.
 4. Pelaksanaan Program Sembako Murah Membara di 22 Desa.
 5. Kerja sama dengan BULOG dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.
 6. Pengawasan harga kebutuhan pokok secara rutin untuk menjaga stabilitas harga.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus

memperkuat pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan upaya sebagai berikut :

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP).
2. Memperkuat pelayanan promotif dan preventif melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat serta pengendalian penyakit tidak menular.
4. Mendorong perubahan perilaku hidup sehat, khususnya pengurangan kebiasaan merokok di lingkungan keluarga.
5. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

B. Dimensi Pengetahuan :

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan pada seluruh wilayah.
2. Menekan angka putus sekolah melalui penguatan program wajib belajar.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan sarana prasarana sekolah.
4. Memperluas dukungan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
5. Memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam peningkatan partisipasi pendidikan. Menyusun program bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
6. Mengoptimalkan penerapan sistem zonasi pendidikan untuk pemerataan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah.
7. Mengembangkan sekolah terbuka dan pendidikan jarak jauh sebagai alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil maupun peserta didik yang memiliki keterbatasan akses.
8. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses pembelajaran yang berkualitas.
9. Memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan.

C. Dimensi Standar Hidup Layak :

1. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja melalui kebijakan pengupahan daerah.
2. Memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
3. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi barang.
4. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan guna mendukung aktivitas ekonomi lokal.
5. Memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
6. Rangkaian intervensi tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal sehingga mendukung peningkatan pengeluaran per kapita riil masyarakat.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia di dukung oleh program dari sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing.

2. **Capaian Sasaran Strategis**
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing

Tabel 2.38
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mandiri dan Berdaya Saing

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,550	0,548	0,550*	99,64	0,540	0,550*	98,18
Rata-rata capaian kinerja					99,64			98,18

*Nilai tahun sebelumnya

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga menggunakan capaian tahun sebelumnya yakni terealisasi sebesar 0,550 atau capaian kinerja 99,64 persen berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 98,18 persen.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

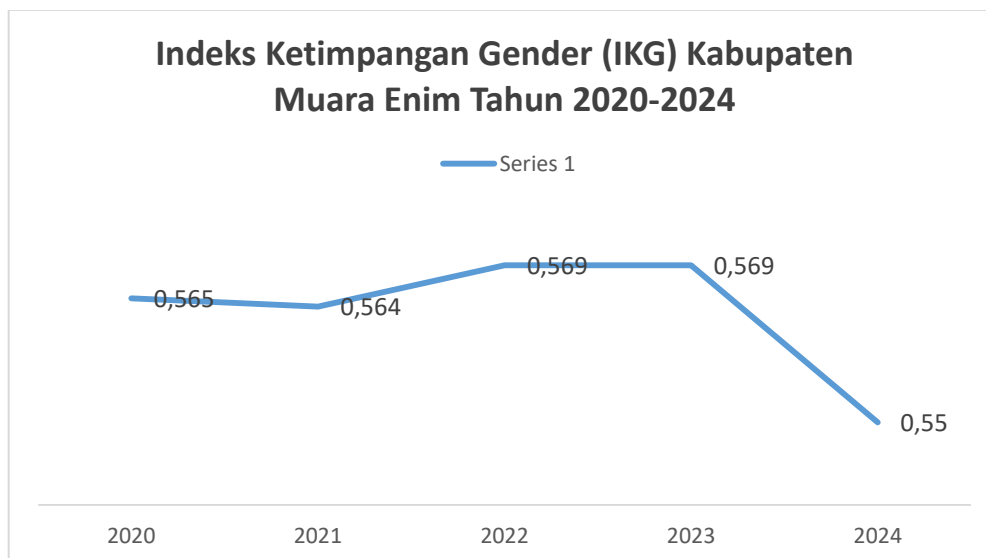
1. Kesehatan Reproduksi,
2. Pemberdayaan, dan
3. Pasar Tenaga Kerja,

yang diukur melalui lima indikator spesifik, yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI/MTF),
2. Angka Kelahiran Remaja (MHPK20),
3. Pendidikan minimal SMA ke atas,
4. Keterwakilan perempuan di parlemen,
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Dengan demikian, nilai IKG tidak hanya ditentukan oleh indikator yang diampuh oleh sektor Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), tetapi juga dipengaruhi oleh sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik.

Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, kesetaraan gender diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengadaptasi ukuran ketimpangan gender dari UNDP dengan nama Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Sama seperti GII, IKG mengevaluasi ketidaksetaraan gender pada tiga dimensi.

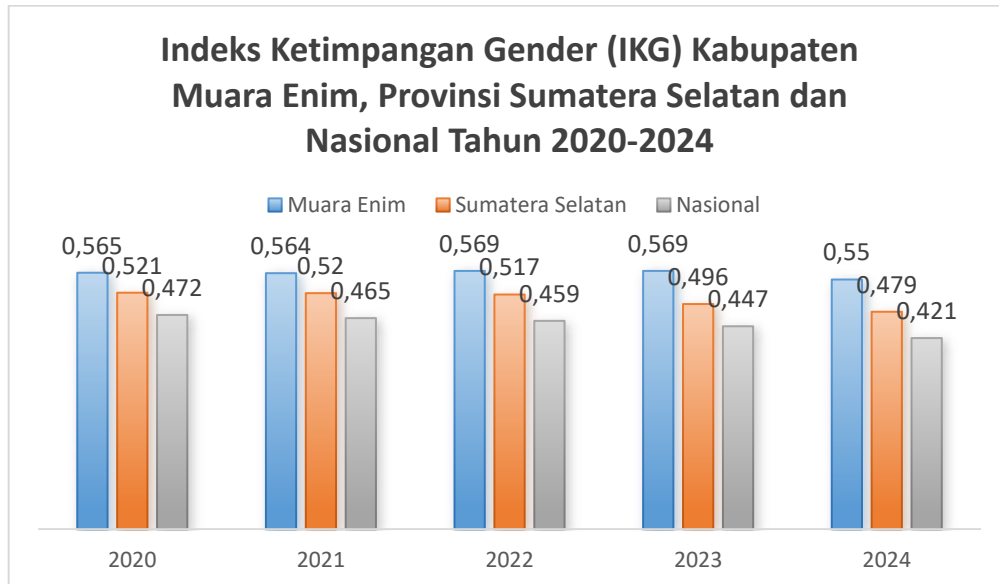


Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IKG Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 mengalami penurunan dari 0,569 menjadi 0,550 dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Muara Enim menurun cukup signifikan jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yang tidak ada perubahan nilai atau stagnan. Penurunan nilai IKG ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin berkurang dan kesetaraan gender semakin membaik di Kabupaten Muara Enim.

IKG menggambarkan besarnya kerugian (*loss*) yang terjadi dalam pembangunan manusia akibat adanya ketimpangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Angka 0 mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya, dan angka 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut. Dengan demikian, nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah (semakin membaik). Sebaliknya, nilai IKG yang semakin besar menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin tinggi (semakin memburuk). Selanjutnya, IKG menjadi ukuran ketimpangan gender dalam pembangunan manusia dengan menggunakan 3 dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahunnya. IKG Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan IKG Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,479 dan IKG Nasional sebesar 0,421.



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu kesetaraan gender berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan menjadi objek kajian penting dalam berbagai literatur akademik. Esther Duflo (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi dapat memperkuat kesetaraan gender, sebaliknya kesetaraan gender akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Pandangan ini juga diperkuat oleh penelitian Doepke, dkk. (2012) dan Doepke & Tertilt (2019), yang menunjukkan bahwa pemberian hak yang lebih luas kepada perempuan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ketika perempuan memiliki lebih banyak hak dan peran dalam pengambilan keputusan, terjadi redistribusi sumber daya dari laki-laki kepada perempuan. Redistribusi ini dapat menghilangkan ketidakefisienan dalam perilaku ekonomi dan meningkatkan investasi perempuan dalam pengembangan kapasitas dan pendidikan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan berkelanjutan.

Upaya yang telah dilakukan dalam menekan ketimpangan gender di Kabupaten Muara Enim antara lain:

1. Penguatan Ketahanan dan Perlindungan Perempuan

- a) Pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak.
 - b) Pelaksanaan program SETIA (Sekolah Pengantin Anyar) sebagai edukasi kesiapan pernikahan dan kesehatan reproduksi.
 - c) Kegiatan pencegahan pernikahan usia anak.
 - d) Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- a) Kerja sama dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam penyebaran informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b) Penyediaan layanan pengaduan melalui UPTD PPA (berupa layanan langsung), dan Layanan telepon SAPA 129.
 - c) Penyediaan rumah perlindungan bagi korban perempuan dan anak yang dibiayai APBD dan DAK Non Fisik PPA.
 - d) Layanan pendampingan kasus secara gratis dengan melibatkan Kepolisian, Rumah Sakit HM Rabain, Psikolog dan Tenaga ahli hukum.
 - e) Selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan rincian 37 kasus pada anak dan 18 kasus terhadap perempuan yang telah mendapatkan layanan pendampingan.
 - f) Layanan penjangkauan kasus hingga tingkat kecamatan dan desa melalui UPTD PPA.

Selain layanan penanganan kasus, Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) juga melaksanakan kegiatan preventif dalam bentuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi di SD IT Serasan Muara Enim diikuti oleh 133 siswa dan 39 guru.
2. Sosialisasi di SD IT Rabbani Muara Enim diikuti oleh 150 siswa dan 22 guru.
3. Sosialisasi di SDN 07 Muara Enim diikuti oleh 143 siswa dan 29 guru.
4. Sosialisasi di SDN 20 Muara Enim diikuti oleh 147 siswa dan 25 guru.
5. Sosialisasi di SDN 06 Muara Enim diikuti oleh 156 siswa dan 16 guru.
6. Total peserta kegiatan meliputi 729 siswa dan 131 guru.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pemahaman siswa dan tenaga pendidik mengenai bentuk dan dampak kekerasan terhadap anak.

- b) Mendorong terbentuknya lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
- c) Memperkuat peran guru dalam deteksi dini dan pencegahan kekerasan.
- d) Upaya preventif ini berkontribusi terhadap penguatan dimensi pemberdayaan serta perlindungan anak dalam mendukung penurunan ketimpangan gender.

Selain sosialisasi di satuan pendidikan juga dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kegiatan ini diikuti oleh 56 peserta dari 28 sekolah di Kecamatan Muara Enim. Pelatihan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola sekolah dalam mengidentifikasi serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Meningkatkan pemahaman prosedur pelaporan dan mekanisme rujukan kasus.
- 3) Memperkuat jejaring perlindungan anak di tingkat satuan pendidikan.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan sekolah memiliki sistem respons yang lebih cepat dan tepat dalam menangani kasus kekerasan, sehingga upaya pencegahan dan perlindungan dapat berjalan lebih efektif.

3. Penguatan fungsi keluarga

- a) Penyediaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- b) Layanan mediasi bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun bersama keluarga.
- c) Edukasi bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim.

Upaya tersebut berkontribusi terhadap dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan dalam penghitungan IKG.

Sebagai upaya untuk menurunkan IKG secara lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan :

- 1. Meningkatkan koordinasi lintas Perangkat Daerah agar intervensi terhadap seluruh dimensi IKG berjalan terintegrasi.
- 2. Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 3. Memperluas akses pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif bagi laki-laki dan perempuan.
- 4. Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan reproduksi secara komprehensif.

5. Memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk pelatihan manajerial dan penguatan UMKM perempuan.
6. Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.
7. Menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan setara bagi perempuan.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender serta peran aktif laki-laki dalam keluarga.
9. Mengedukasi dampak pernikahan dini dan budaya patriarki yang berpotensi memperlebar ketimpangan gender.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program penyediaan data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak dan program peningkatan kualitas keluarga.

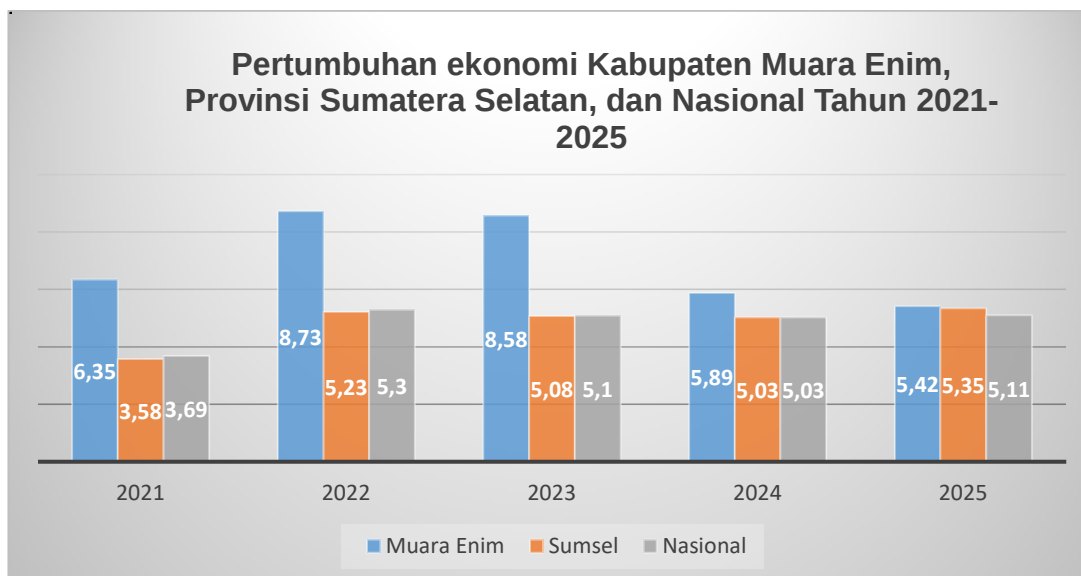
3. Capaian Tujuan 2 Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah

Tabel 2.39
Analisis Pencapaian Tujuan 2
Meningkatkan Daya Saing dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,89	7,01	5,42	77,31	8,28	5,42	65,46
Rata – rata capaian kinerja					77,31			65,46

Persentase laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 5,42 persen dengan capaian kinerja 77,31 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian kinerjanya sebesar 65,46 persen.

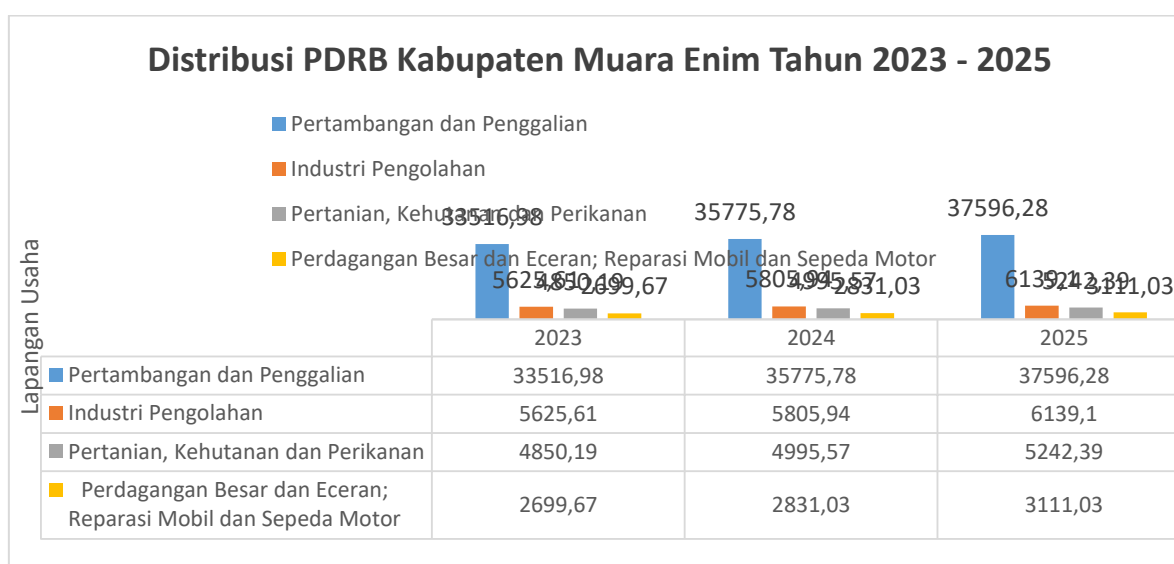
Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,35 persen dan Nasional sebesar 5,11 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di daerah dihitung dengan mengukur persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) antara dua periode biasanya tahunan.

Berdasarkan harga konstan terdapat empat sektor yang dominan memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB yaitu :



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan sektor pariwisata, UMKM, investasi, serta industri kecil dan menengah, antara lain:

1. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata serta pelaksanaan promosi wisata dan penyelenggaraan berbagai event daerah guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Pendataan UMKM sebagai dasar pemberian bantuan permodalan agar program lebih tepat sasaran
3. Pelatihan penggunaan *platform digital* seperti Shopee untuk pemasaran produk.
4. Pendampingan penyusunan legalitas usaha dan perizinan UMKM
5. Pemberian sarana produksi bagi pelaku UMKM berupa mesin jahit, peralatan bengkel, alat prasmanan, peralatan pertukangan, mesin kopi, alat produksi keripik, dan peralatan usaha lainnya
6. Promosi dan pemasaran produk UMKM melalui *e-commerce* lokal Ambung E-Mac serta melalui kegiatan Expo, Bazar UMKM, Gebyar UMKM, APKASI, dan Dekranasda.
7. Pelaksanaan inovasi Terus Jempol Membara (Jemput Bola Pelayanan Perizinan) di beberapa kecamatan.
8. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pelatihan pangan olahan, pelatihan sandang (mencukit songket), sosialisasi mutu produk kopi, serta penerapan industri hijau guna meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing usaha.
9. PBB maksimum Rp. 100.000 dibebaskan/ gratis.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, pelaku usaha memperoleh peningkatan kapasitas produksi, inovasi usaha, serta akses pasar yang lebih luas sehingga turut membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah yaitu belum tersedianya data UMKM yang lengkap dan mutakhir, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan dan bantuan usaha belum sepenuhnya optimal dan tepat sasaran.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Partisipasi dalam gelar pameran kepariwisataan.

3. Pelaksanaan festival ekonomi kreatif sebagai sarana promosi dan peningkatan kreativitas pelaku ekonomi kreatif.
4. Fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata.
5. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam pengembangan serta pengelolaan destinasi pariwisata.
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata.
7. Pemutakhiran data UMKM secara berkala.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pelaku usaha.
9. Pendampingan pelayanan penerbitan NIB pada tahun 2026 guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.
10. Peningkatan investasi daerah.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan promosi investasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
12. Melanjutkan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025–2045.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program peningkatan daya tarik pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif, program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program pengembangan ekspor, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

4. **Capaian Sasaran Strategis** **Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah**

Tabel 2.40
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Berbasis Pengembangan Potensi Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2025	Realisasi 2025	
PDRB Per Kapita	Rp Juta	182,11	193.73	182.11*	94.00	217.92	182.11*	83.57
Rata – rata capaian kinerja					94.00			83.57

*Nilai tahun sebelumnya

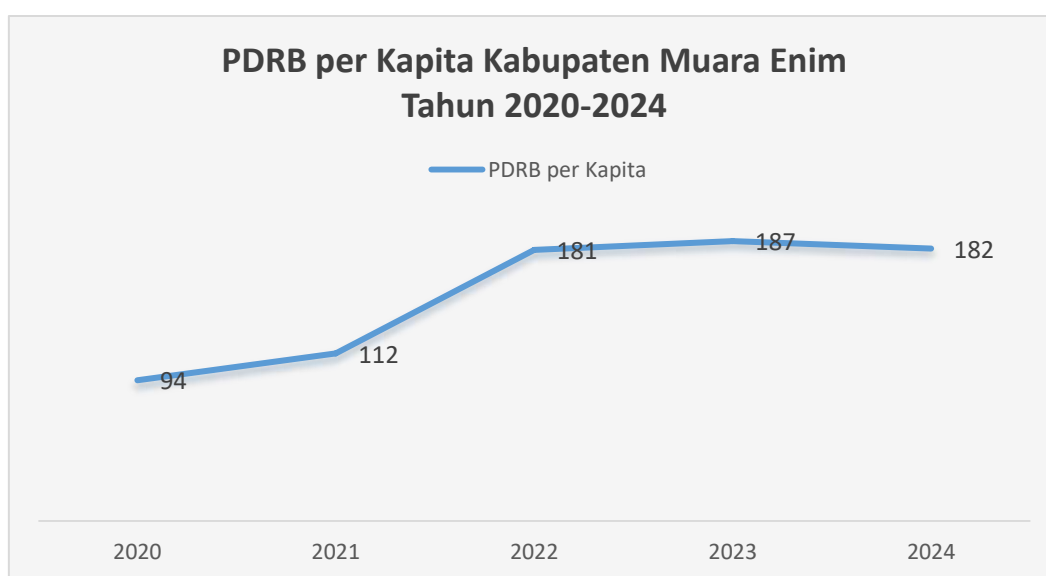
PDRB per Kapita Kabupaten Muara Enim tahun 2025 belum dirilis oleh BPS sehingga masih menggunakan nilai terakhir yaitu di tahun 2024 sebesar 182,11 dengan capaian kinerja 94,00 persen dan berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 capaian kinerjanya sebesar 83.57 persen. .

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan Pendapatan Regional Bruto (PRB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktivitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB

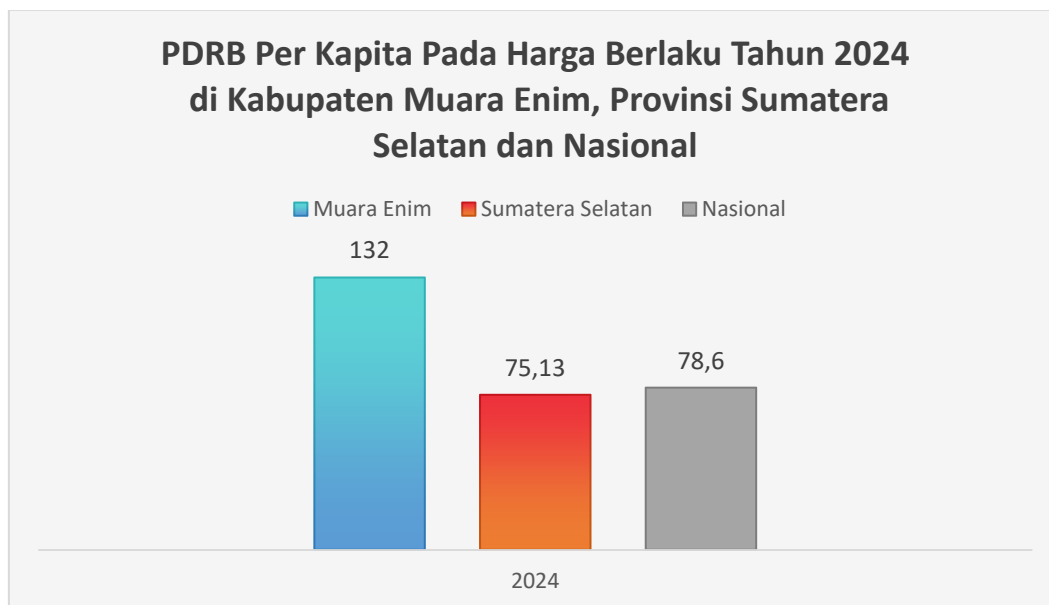
Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai PDRB atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dalam 1 tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita di wilayah ini tercatat sebesar 94 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 nilainya telah mencapai 182 juta rupiah atau sekitar 15,18 juta per orang per bulan.

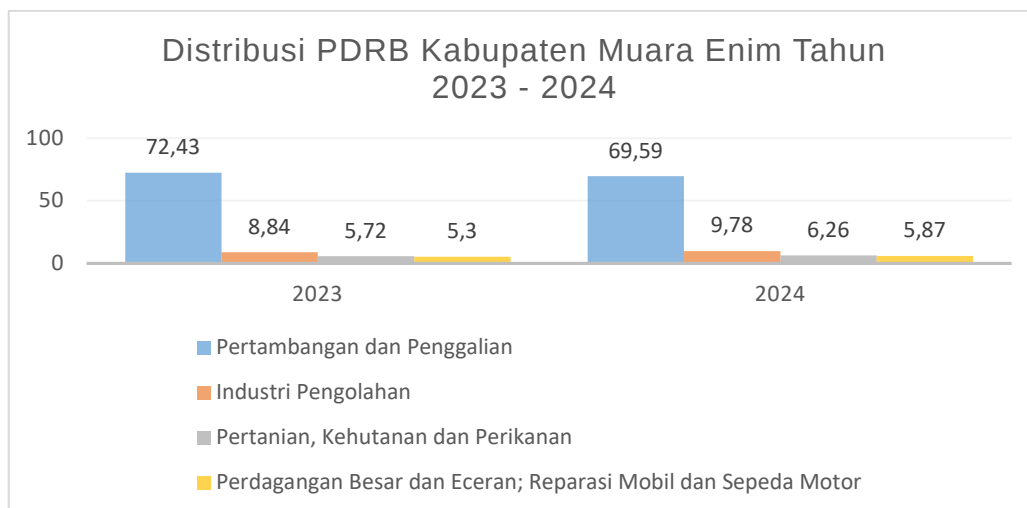


Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim tertinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 75,13 dan Nasional 78,6.

Indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, nilai tambah yang terbentuk sebesar Rp 118,52 triliun, dan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp 116,72 triliun. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan dari Rp 52,23 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 55,30 triliun di tahun 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2024 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh sektor primer yaitu 75,85 persen dari total PDRB. Kontribusi sektor primer berasal dari kategori pertambangan dan penggalian sebesar 69,59 persen dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,26 persen. Berdasarkan harga berlaku terdapat empat sektor yang dominan memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB yaitu:



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Selama lima tahun terakhir (2010 - 2024) struktur perekonomian Kabupaten Muara Enim didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dihasilkan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 69,59 persen. Jika dibandingkan dengan peranannya di tahun 2020 yang sebesar 51,66 persen, maka telah terjadi peningkatan kontribusi pada kategori ini dalam periode 5 tahun tersebut. Selanjutnya peranan pada posisi kedua hingga kelima berturut-turut adalah kategori industri pengolahan sebesar 9,78 persen, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,26 persen, selanjutnya kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,87 persen dan kategori konstruksi sebesar 3,31 persen. Sektor lainnya berperan kurang dari 3 persen.

Tabel 2.41
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Muara Enim Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020–2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,09	8,74	5,66	5,72	6,26
2	Pertambangan dan Penggalian	51,66	58,00	72,76	72,43	69,59
3	Industri Pengolahan	16,21	14,11	9,01	8,84	9,78

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,15	0,10	0,10	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02
6	Konstruksi	5,67	4,80	3,06	3,07	3,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,44	7,84	4,98	5,30	5,87
8	Transportasi dan Perdagangan	1,47	1,27	0,93	1,01	1,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	0,59	0,52	0,34	0,35	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	0,80	0,71	0,45	0,45	0,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,49	0,30	0,30	0,33
12	Real Estat	1,17	1,00	0,65	0,66	0,73
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,04	0,67	0,67	0,78
14	Jasa Pendidikan	1,20	1,04	0,67	0,67	0,78
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,38	0,25	0,25	0,29
16	Jasa Lainnya	0,30	0,24	0,15	0,16	0,17
Jumlah		100	100	100	100	100

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami peningkatan peran dalam struktur perekonomian Kabupaten Muara Enim, sementara sektor lainnya mengalami penurunan porsi dalam struktur perekonomian sebagai akibat dominasi sektor pertambangan dan penggalian. Penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut dan adanya dampak el nino, yang menyebabkan penurunan produksi pertanian.

Batubara masih menjadi komoditas dominan di Kabupaten Muara Enim, bahkan di Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya peranan kategori pertambangan dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 69.59 persen terhadap perekonomian Kabupaten Muara Enim.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah antara lain:

1. Ikut serta dalam gelar pameran kepariwisataan serta melaksanakan pendidikan ekonomi kreatif yang dikembangkan, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus memperluas promosi potensi wisata daerah guna menarik kunjungan wisatawan, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan usaha berbasis kreativitas yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah.
2. Melaksanakan festival ekonomi kreatif dalam rangka promosi sekaligus meningkatkan kreativitas pelaku ekonomi kreatif, melalui penyelenggaraan kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kreatif untuk menampilkan produk unggulan daerah, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan inovasi produk, serta memperkuat daya saing pelaku ekonomi kreatif sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang usaha baru di masyarakat.
3. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata, guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan sektor pariwisata melalui pengakuan kompetensi tenaga kerja secara resmi, sehingga mampu meningkatkan standar layanan wisata, memperkuat kepercayaan wisatawan, serta mendukung pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
4. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata, melalui peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata agar mampu mengelola potensi wisata secara mandiri, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi pariwisata, serta menciptakan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
5. Melakukan *update* data UMKM secara berkala, sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan UMKM yang tepat sasaran, mendukung pemberian bantuan dan fasilitasi usaha secara efektif, serta memastikan keberlanjutan pembinaan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha dan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyederhanaan proses pelayanan perizinan dan peningkatan sistem pelayanan berbasis digital guna memberikan kemudahan akses

layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

7. Pelaksanaan kegiatan pendampingan pelayanan NIB pada tahun 2026 yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah, cepat, dan transparan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan jumlah usaha formal serta meningkatkan investasi daerah.
8. Mengikuti kegiatan promosi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, sebagai upaya memperkenalkan potensi investasi dan produk unggulan Kabupaten Muara Enim kepada investor dan pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja sama usaha serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan penyampaian LKPM kepada pelaku usaha, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal serta mendukung tersedianya data investasi yang akurat sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
10. Melanjutkan penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Tahun 2025–2045, sebagai arah kebijakan investasi jangka panjang yang terintegrasi dengan potensi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan lahan yang rendah ditindaklanjuti melalui pembinaan berkelanjutan kepada petani, melalui kegiatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, kelompok pengelola alsintan, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), guna meningkatkan kemampuan budidaya pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, peningkatan kesejahteraan petani, serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan produk, grading produk, sistem tumpang sari, dan penerapan teknologi tepat guna.
2. Antisipasi pencapaian target produksi padi menuju swasembada beras melalui adaptasi perubahan iklim, dengan melakukan analisis kerentanan wilayah terdampak perubahan iklim, penyusunan roadmap adaptasi, serta penerapan teknologi pertanian adaptif seperti penggunaan varietas unggul, pengelolaan lahan dan air, serta sistem pemupukan yang mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

3. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), melalui penyusunan Perda LP2B sebagai penguatan regulasi dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian, sehingga keberlanjutan produksi pangan dapat terjaga serta mendukung ketahanan pangan daerah secara jangka panjang.
4. Pengendalian inflasi sektor pertanian melalui pengadaan benih padi, pupuk NPK, serta bibit cabai dan bawang merah beserta sarana produksi pertanian, yang disalurkan kepada kelompok tani guna meningkatkan produksi pertanian sekaligus menekan biaya usaha tani masyarakat.
5. Peningkatan produksi sektor peternakan melalui pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak serta penyediaan hijauan pakan ternak, dengan pemberian bantuan ternak sapi, kambing, itik, dan ayam kepada kelompok tani serta pembangunan Rumah Potong Hewan secara bertahap pada tahun 2026 guna menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta meningkatkan peluang pasar produk peternakan melalui pelaksanaan pasar tani.
6. Meningkatkan produksi komoditas melalui optimasi lahan kebun karet dengan memberikan bantuan berupa pupuk kimia seluas 475 hektar di Desa Talang Beliung, Desa Babatan, Desa Lubuk Semantung, Desa Muara Gula Lama, Desa Betung, Desa Menanti, dan Desa Kota Baru, guna meningkatkan produktivitas tanaman karet, nilai produksi perkebunan, serta pendapatan petani yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Pemberian bantuan pupuk organik granul untuk optimasi lahan kebun kopi seluas 425 hektar di Desa Penindayan, Desa Babatan, Desa Pulau Panggung, Desa Pagar Jati, Padang Bindu, Indramayu, Tanjung Baru, dan Embawang, sebagai upaya peningkatan kesuburan tanah, produktivitas tanaman kopi, kualitas hasil produksi, serta peningkatan nilai ekonomi komoditas kopi masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program peningkatan daya tarik pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif, program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program

pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program pengembangan ekspor, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

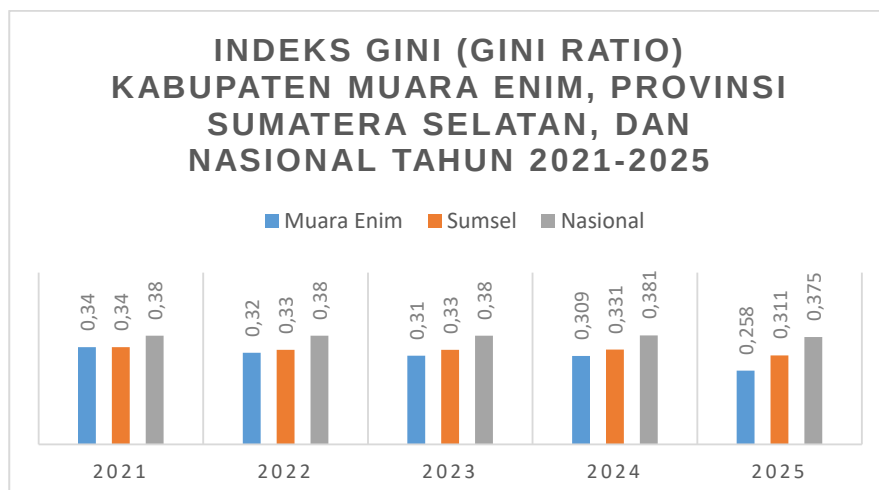
5. Capaian Tujuan 3
Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.42
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Terwujudnya Pemerataan Pendapatan dan Kesempatan Ekonomi Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Indeks gini	Angka	0,309	0,307	0,258	118,99	0,295	0,258	114,34
Rata – rata capaian kinerja					118,99			114,34

Indeks Gini Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 0,258 dengan capaian kinerja sebesar 118,99 persen dan berada pada kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, capaian kinerja indikator ini mencapai 114,34 persen, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat relatif rendah serta distribusi pendapatan yang semakin merata.

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menggambarkan distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat. Nilai indeks gini Kabupaten Muara Enim lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Perubahan nilai Indeks Gini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, kualitas pembangunan manusia, serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan kesenjangan pendapatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pemerataan pendapatan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan

Pada tahun 2025 luas panen tanaman padi di Kabupaten Muara Enim mencapai 35.617 hektar, dengan luas tanam 35.212 Ha dan produktivitas sebesar 58,00 kw/ha, sehingga diperoleh produksi padi sebesar 206.611,43 ton Gabah Kering Panen. Pencapaian tersebut didukung melalui berbagai program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, antara lain:

- 1) Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija seluas 2.234 Ha
- 2) Optimalisasi peningkatan indeks pertanaman seluas 2.000 Ha melalui bantuan benih padi.
- 3) Pengawasan mutu benih dan bantuan benih padi pokok, pupuk urea, pupuk NPK serta kantong benih untuk penangkaran seluas 50 Ha.
- 4) Pengendalian organisme pengganggu tanaman melalui penyediaan fungisida sebanyak 200 botol, rodentisida 400 kg, molustisida 800 bungkus, dan bio-insektisida 1.000 sachet.

- 5) Penanganan dampak perubahan iklim melalui bantuan benih kacang tanah sebanyak 5.000 kg.
 - 6) Bantuan pasca bencana berupa terpal jemur 17 lembar dan power thresher 2 unit.
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan embung pertanian sebanyak 6 unit.
 - 8) Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 114 unit.
 - 9) Pembangunan irigasi usaha tani sebanyak 27 unit.
 - 10) Pengadaan alat dan mesin pertanian dalam pengelolaan LP2B dan KP2B.
2. Pengembangan Produksi Sayuran Unggulan
- Upaya peningkatan produksi sayuran dilakukan melalui :
- 1) Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian berkualitas serta pelaksanaan gerakan tanam bawang merah, kentang, dan cabai di Balai Benih Aur Duri Desa Tenam Bungkok. Bantuan yang diberikan meliputi benih cabai 1500 gram kepada 9 kelompok tani, benih kentang 2400 gram kepada 3 kelompok tani, benih tomat 600 gram kepada 4 kelompok tani, Benih bawang merah 4800 gram kepada 5 kelompok tani, Pupuk NPK 2.900 kg, pupuk organik 38 liter, mulsa 112 roll, dan pupuk kandang 10.000 kg, bantuan bibit cabai 10.000 batang, bantuan pengendalian inflasi berupa benih cabai 1250 gram, benih bawang merah 2500 kg, pupuk NPK 1400 kg, dan mulsa 63 roll.
 - 2) Pengembangan tanaman pekarangan melalui bantuan berbagai benih sayuran, herbisida, insektisida, pupuk NPK dan pupuk organik
 - 3) Program prioritas Pupuk Membara sebanyak 142857 kg.
3. Pengembangan buah-buahan unggulan
- Peningkatan produksi buah dilakukan melalui pemberian bibit alpukat, durian, mangga, dan sawo kepada kelompok tani serta bantuan pupuk NPK dan pupuk organik. Selain itu diberikan bantuan bibit buah untuk Kecamatan Lubai berupa alpukat 400 batang, durian 400 batang, mangga 400 batang, lengkeng 400 batang
4. Peningkatan Produksi Peternakan
- Upaya peningkatan produksi peternakan dilakukan melalui :
- 1) Pengadaan ternak sapi dan kambing pada kelompok tani.
 - 2) Penerapan teknologi inseminasi buatan.
 - 3) Penyediaan obat-obatan, vitamin, hormon dan vaksin ternak.
 - 4) Pengadaan ayam buras dan itik guna peningkatan produksi telur.
 - 5) Pengembangan agribisnis peternakan serta penguatan database peternakan.

5. Penguatan sarana pascapanen perkebunan
 - 1) Dilakukan pemberian sarana pasca panen karet sebanyak 5 UPPB berupa bak pembeku 500 unit, timbangan digital 20 unit, dan zat pembeku karet 5.000 kg.
 - 2) Sarana pasca panen kopi kepada 9 kelompok tani berupa solar dryer 2 unit, huller 8 unit, dan terpal jemur kopi 200 lembar.
6. Pengembangan Sektor Perikanan
 - 1) Penyaluran bantuan sarana perikanan kepada 104 kelompok perikanan.
 - 2) Bantuan alat pengolahan hasil perikanan kepada 110 penerima (UPI).
 - 3) Pelatihan budidaya perikanan kepada 30 kelompok.
 - 4) Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan bagi 14 kelompok.
7. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
 - 1) Pembangunan tembok penahan tanah/bronjong di berbagai kecamatan.
 - 2) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
 - 3) Pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase lingkungan dan perkotaan.
 - 4) Pembangunan jalan baru, peningkatan kondisi jalan, pelebaran jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan di berbagai kecamatan.
 - 5) Penetapan RTRW dan RRTR serta koordinasi pemanfaatan ruang daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat antara lain :

1. Pemanfaatan lahan yang belum optimal akan ditingkatkan melalui pembinaan berkelanjutan kepada kelompok tani, kelompok alsintan, dan P3A guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani melalui diversifikasi usaha tani dan penerapan teknologi tepat guna.
2. Penguatan program pemanfaatan pekarangan melalui OPAL. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman serta pembangunan *green house* dan *screen house* akan terus dikembangkan guna meningkatkan produksi pangan rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
3. Adaptasi perubahan iklim pada produksi padi. Dilakukan melalui penyusunan peta kerentanan wilayah, *roadmap* adaptasi perubahan iklim, penggunaan varietas unggul serta teknologi pengelolaan lahan dan air.
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dilanjutkan melalui penyusunan Peraturan Daerah LP2B guna memperkuat perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan.

5. Peningkatan daya saing produk pertanian. Dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kualitas produksi, serta perluasan akses pasar produk pertanian.
6. Pengendalian Inflasi sektor pertanian. Dilakukan melalui penyediaan benih padi, pupuk NPK, serta bantuan bibit cabai dan bawang merah guna menjaga stabilitas produksi dan harga pangan.
7. Penguatan subsektor peternakan melalui pengawasan peredaran bibit ternak, bantuan ternak kepada kelompok tani, serta pembangunan Rumah Potong Hewan secara bertahap pada tahun 2026.
8. Peningkatan akses pemasaran produk pertanian dan peternakan. Dilaksanakan melalui penyelenggaraan pasar tani guna memperluas akses pemasaran dan meningkatkan pendapatan petani dan peternak.
9. Program padat karya yang melibatkan masyarakat di desa / kelurahan.
10. Memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
11. Pendampingan usaha kecil secara intensif baik dari sisi produksi, kemasan maupun digital marketing.
12. Pengembangan sentra produk unggulan desa.
13. Fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan.
14. Pembangunan infrastruktur yang menunjang akses produksi dan distribusi.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian, program perizinan usaha pertanian, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan permukiman, program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi, program peningkatan kerjasama desa.

6. **Capaian Sasaran Strategis**
Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja

Tabel 2.43
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Menurunnya Pengangguran dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,09	3,88	4,13	93,95	3,54	4,13	85,71
Rata – rata capaian kinerja					93,95			85,71

Capaian indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka dari target 3,88 persen terealisasi sebesar 4,13 persen sehingga capaian kinerja tahun 2025 sebesar 93,95 persen berada dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 capaian kinerja sebesar 85,71 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah melakukan kegiatan atau membantu melakukan kegiatan untuk mendapat penghasilan atau keuntungan minimal seminggu sebelum dilakukan survei. Tenaga kerja adalah penduduk di usia produktif yaitu 15 tahun hingga 64 tahun dianggap penduduk yang mampu bekerja. Maka mereka digolongkan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang-orang yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dan juga orang-orang yang sedang berusaha untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Jadi angkatan kerja dibedakan menjadi 2 golongan yaitu :

1. Penduduk bekerja yaitu mereka yang melakukan produksi barang dan jasa.
2. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan yaitu mereka yang sedang berusaha untuk dapat ikut serta memproduksi barang dan jasa.

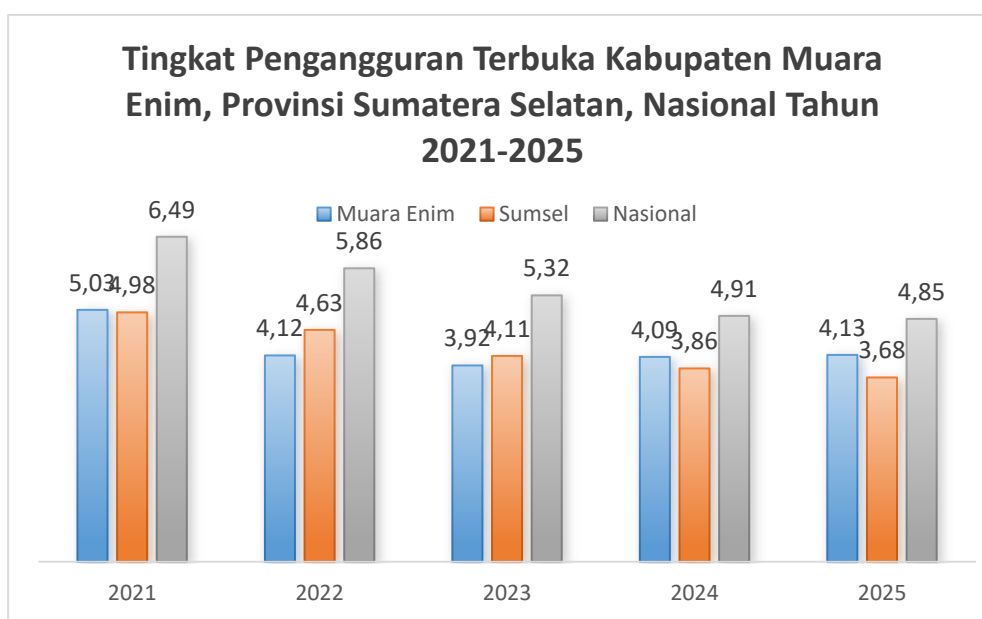
Tenaga kerja tetapi bukan angkatan kerja, adalah mereka yang tidak bekerja ataupun tidak berusaha mencari pekerjaan. Mereka adalah bagian dari tenaga kerja, tetapi tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Mereka ini misalnya penduduk yang sedang bersekolah, ibu-ibu yang mengurus rumah tangga ataupun pensiunan.

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kondisi seperti ini dikenal dengan sebutan pengangguran terbuka dan sering diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selayaknya,

pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berakibat ke tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk, khususnya bagi angkatan kerja. Walaupun mungkin tetap saja tidak semua angkatan kerja dapat terserap tetapi setidaknya dapat memperkecil tingkat pengangguran terbuka.

Secara komparatif, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,68 persen, namun lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional yang mencapai 4,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pengendalian pengangguran di Kabupaten Muara Enim relatif lebih baik dibandingkan capaian nasional, masih diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja guna menurunkan tingkat pengangguran agar sejalan dengan capaian tingkat provinsi.

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Tabel 2.44
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Angkatan Kerja (Jiwa)			Pengangguran Terbuka (Jiwa)	
Bekerja	Menganggur	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
321.846	13.868	335.714	7.201	6.667

Salah satu faktor yang menghambat pencapaian target kinerja adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan serta tidak diperpanjangnya kontrak kerja bagi tenaga kerja yang masa kontraknya telah berakhir. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pencari kerja dan berkurangnya daya serap tenaga kerja di sektor unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dengan standar kurikulum yang terstruktur, seperti pelatihan menjahit, tata boga, dan servis AC.
2. Memberikan bantuan peralatan usaha kepada peserta pelatihan, khususnya pada bidang tata boga, guna mendukung kemandirian dan pengembangan usaha mandiri.
3. Melaksanakan *jobfair* MEMBARA yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, penyandang disabilitas, serta memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antar daerah dengan melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya.
4. Melaksanakan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan pengoperasian alat berat, pengelasan, dan komputer dasar.
5. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja pada berbagai perusahaan di berbagai sektor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Upaya yang akan dilakukan agar lebih meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja lokal ke sektor-sektor di luar pertambangan melalui penguatan kerja sama dengan perusahaan pada sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa, dan sektor potensial lainnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi lapangan kerja guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan serta memperluas kesempatan kerja yang lebih berkelanjutan.
2. Meningkatkan fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar daerah maupun luar provinsi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah lain, perusahaan pengguna tenaga kerja, serta pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar kerja yang lebih luas bagi pencari kerja asal Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha.
3. Mengoptimalkan penyaluran dan penempatan alumni pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan memperkuat mekanisme *link and match* antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

lulusan pelatihan guna memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja.

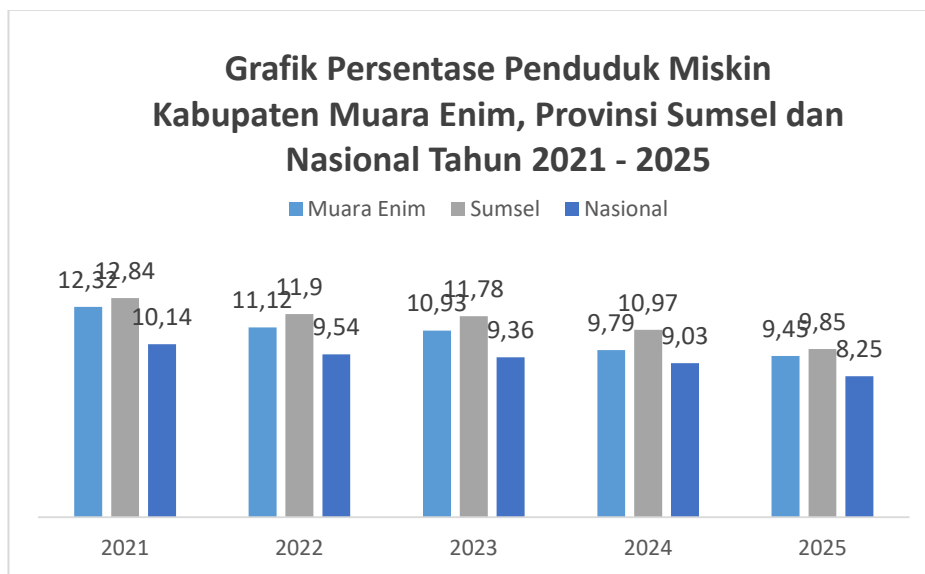
7. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya perlindungan sosial adaptif

Tabel 2.45
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Perlindungan Sosial Adaptif

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Persentase penduduk miskin	Persen	9,79	9,49	9,45	100,42	8,29	9,45	87,72
Rata – rata capaian kinerja					100,42			87,72

Indikator sasaran persentase penduduk miskin tahun 2025 terealisasi sebesar 9,45 persen dari target sebesar 9,49 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,42 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029, realisasi tahun 2025 telah mencapai kinerja sebesar 87,72 persen.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim lebih rendah dibandingkan dengan persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,85 persen namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rata-rata penduduk miskin tingkat nasional sebesar 8,25 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan papan yang diakibatkan rendahnya pendapatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan produktivitas, lemahnya nilai produksi, serta terbatasnya kesempatan bekerja.

Pengukuran angka kemiskinan di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui penetapan nilai standar kebutuhan minimum, baik kebutuhan pangan dan non pangan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batasan untuk membedakan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin atau penduduk mampu. Garis batas tersebut disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Dengan kata lain, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki jumlah pengeluaran rata-ratanya berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dilihat dari kondisi awalnya memang miskin. Kemiskinan pada golongan ini dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan, dan mereka hanya mendapatkan pendapatan yang sangat rendah. Kemiskinan ini juga dapat disebabkan karena mengalami cacat, sakit, usia lanjut, dan bencana alam. Dengan begitu, seringkali kemiskinan natural ini terjadi secara turun temurun.

Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang terjadi pada individu miskin yang dikarenakan struktur sosial dalam masyarakat, seperti adanya batasan hak-hak mereka dalam mengakses sumber ekonomi yang telah tersedia. Biasanya golongan tersebut memiliki kesadaran terhadap kehidupan ekonominya yang berbeda dari masyarakat lain yang lebih dianggap mampu, sehingga kekuasaannya berada di bawah individu yang kaya. Contohnya, para petani yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan seseorang yang dapat memberikannya modal atau lahan untuk digarap. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) adalah kemiskinan yang dipandang melalui sudut pandang budaya, di mana disebabkan adanya pola perilaku, sikap mental, dan pikiran yang tidak mampu menghadapi dan mengikuti perubahan untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Biasanya budaya ini muncul karena adanya rasa minder, malas, boros dan tidak disiplin pada individu untuk meraih kesuksesan.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui alternatif kebijakan dan program untuk masyarakat miskin yaitu dengan meningkatkan pendapatan seperti dengan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin yang mempunyai kemampuan dalam memperoleh hasil di berbagai kegiatan serta dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti kepentingan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memudahkan kegiatan sosial ekonomi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengentasan kemiskinan meliputi:

1. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
2. Melaksanakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kabupaten/kota
3. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan fungsi sosial penerima manfaat.
4. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (di luar korban HIV/AIDS dan NAPZA) di luar panti sosial melalui penyediaan alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, serta pemberian layanan rujukan guna meningkatkan keberfungsian sosial dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Melaksanakan pemeliharaan anak - anak terlantar sebagai bentuk perlindungan dan pengasuhan alternatif untuk menjamin terpenuhinya hak dasar serta tumbuh kembang anak secara optimal.

5. Melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten melalui proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data guna memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
6. Melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (UEP) guna meningkatkan ketepatan sasaran intervensi dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
7. Melaksanakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial di tingkat kabupaten/kota melalui penyediaan bantuan darurat, dukungan logistik, serta fasilitasi pemulihan sosial pasca bencana.
8. Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda usia 16–30 tahun dalam berbagai bidang usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas kewirausahaan pemuda agar memiliki keahlian produktif, mampu menciptakan usaha mandiri, serta memperluas peluang kerja.
9. Pemutakhiran basis data kemiskinan daerah.
10. Penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.
11. Penyaluran bantuan usaha produktif bagi keluarga miskin.
12. Pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja lokal.
13. Pelaksanaan program padat karya di desa/ kelurahan.
14. Memastikan kepesertaan JKN aktif bagi keluarga miskin.
15. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.
16. Program bedah rumah bagi keluarga miskin ekstrem.
17. Penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah kantong kemiskinan.
18. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
19. Memberikan pelatihan keterampilan pada pencari kerja berupa pelatihan dengan standar kurikulum seperti menjahit, tata boga, servis *air conditioner* (AC).
20. Memberi bantuan peralatan yang diserahkan kepada peserta pelatihan tata boga.
21. Memberikan pelatihan pengoperasian alat berat, las, komputer dasar bagi pencari kerja.
22. Pemberian bantuan bahan pangan pada daerah rawan pangan berupa beras, minyak, gula dan sarden kaleng.
23. Pemberian subsidi dalam rangka kegiatan Sembako Murah Membara
24. Selain intervensi ekonomi langsung, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan penguatan ketahanan keluarga melalui distribusi sarana prasarana pelayanan

KB pada 31 fasilitas kesehatan, pembinaan Kampung KB di 22 kecamatan, serta edukasi kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan dan PIK-R. Program tersebut berkontribusi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan perencanaan kehidupan generasi muda, yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan dapat mencegah kemiskinan struktural.

25. Melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut :

- a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.356 unit di 17 kecamatan.
- b) Program bedah rumah melalui dana CSR antara lain PT Bukit Asam sebanyak 25 unit, PT. PPA sebanyak 5 unit, PT. Medco sebanyak 8 unit, Bank Sumsel Babel sebanyak 1 unit.
- c) Pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 103 unit di 15 kecamatan.
- d) Perbaikan rumah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebanyak 4 unit di Kecamatan Muara Enim. Dengan demikian, total realisasi penanganan RTLH Tahun 2025 mencapai 1.463 unit dari target 1.479 unit. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui perbaikan kondisi hunian, khususnya pada komponen atap, lantai, dan dinding (aladin), sehingga meningkatkan kelayakan tempat tinggal, kesehatan lingkungan, serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran basis data kemiskinan daerah.
2. Penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.
3. Penyaluran bantuan usaha produktif bagi keluarga miskin.
4. Pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja lokal.
5. Pelaksanaan program padat karya di desa/ kelurahan.
6. Memastikan kepesertaan JKN aktif bagi keluarga miskin.
7. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.
8. Program bedah rumah bagi keluarga miskin ekstrem.
9. Penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah kantong kemiskinan.
10. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
11. Pemagangan peserta pelatihan keterampilan.

12. Memberikan pelatihan bahasa jepang bagi peserta yang lulus seleksi magang di Jepang.
13. Melaksanakan kembali pemberian bantuan bahan pangan pada daerah rawan pangan.
14. Mendukung program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan pemberian bantuan paket budikamber (budidaya ikan dalam ember) kepada rumah tangga miskin.
15. Pelaksanaan kegiatan Sembako Murah Membara.
16. Meningkatkan akurasi data penerima melalui survei dan pendataan ulang berbasis kondisi riil lapangan.
17. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai standar rumah layak huni agar perbaikan sesuai dengan ketentuan teknis.
18. Memfokuskan penanganan tidak hanya pada bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
19. Meningkatkan efektivitas bantuan stimulan, termasuk penguatan dukungan material dan upah perbaikan.
20. Melakukan evaluasi dampak program RTLH terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya perlindungan sosial adaptif didukung oleh program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan kerawanan pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program administrasi pemerintahan desa, program penataan desa, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

8. **Capaian Tujuan 4** **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung** **Infrastruktur Berkualitas**

Tabel 2.46
Analisis Pencapaian Tujuan 4
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2022	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025- 2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,36	3,6	3,359*	93,30	4,07	3,359*	82,53
Rata – rata capaian kinerja					93,30			82,53

*capaian tahun 2023

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas layanan infrastruktur dasar daerah, yang dihitung berdasarkan sejumlah variabel sektoral dan metodologi tertentu. Pada Tahun 2025, capaian IKLI dianalisis menggunakan data hasil perhitungan terakhir yang tersedia, yaitu Tahun 2023 sebesar 3,359 dari target 3,60, dengan capaian kinerja sebesar 93,30 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, capaian tersebut setara dengan 82,53 persen terhadap target periode.

Penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur sangat penting bagi penyedia layanan publik untuk mengetahui umpan balik berupa indeks kepuasan masyarakat atas penyediaan layanan infrastruktur. Indeks yang tinggi mencerminkan tingginya kualitas *output* dan *outcome* dari penyediaan layanan infrastruktur, begitu sebaliknya. Selain mengukur kepuasan masyarakat, indeks kepuasan layanan infrastruktur juga menginventarisasi keinginan serta harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih baik. Kinerja saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan merupakan *feedback* yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang mendukung suatu struktur, sehingga dapat berjalan dan mencapai target yang telah ditentukan. Infrastruktur juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk menjamin berjalannya sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dan fungsi sosial dapat berfungsi dengan baik.

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, jenis-jenis infrastruktur terbagi menjadi 19 (sembilan belas) jenis, yaitu:

1. infrastruktur transportasi

2. infrastruktur jalan
3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi
4. infrastruktur air minum
5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika
9. Infrastruktur ketenagalistrikan
10. infrastruktur minyak dan gas bumi serta energi yang terbarukan;
11. infrastruktur konservasi energi
12. infrastruktur fasilitas perkotaan
13. infrastruktur fasilitas pendidikan
14. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan kesenian
15. Infrastruktur kawasan
16. infrastruktur pariwisata
17. infrastruktur kesehatan;
18. infrastruktur lembaga pemasyarakatan
19. Infrastruktur perumahan rakyat.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dihitung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Penyusunan IKLI dengan menggunakan 8 variabel dalam menilai sektor infratraktur di Kabupaten Muara Enim diantaranya jalan dan jembatan, infrastruktur air bersih, infrastruktur perumahan, infrastruktur ruang publik, infrastruktur pelayanan publik, infrastruktur irigasi, sarana dan prasarana perhubungan dan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei di kecamatan - kecamatan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.47
Nilai IKLI dan Tingkat Kepuasan atas Variabel Pelayanan Infrastruktur

No	Variabel Pelayanan	IKLI	Rata-rata Tingkat Kepuasan	Mutu Layanan	Kinerja Layanan
1.	Jalan dan jembatan	3,677	73,54%	B	Baik
2.	Infrastruktur Air Bersih	3,332	66,63%	C	Cukup Baik

No	Variabel Pelayanan	IKLI	Rata-rata Tingkat Kepuasan	Mutu Layanan	Kinerja Layanan
3.	Infrastruktur Perumahan	3,413	68,26%	B	Baik
4.	Infrastruktur Ruang Publik	3,159	66,56%	C	Cukup Baik
5.	Infrastruktur Pelayanan Publik	3,566	71,31%	B	Baik
6.	Infrastruktur Irigasi	3,406	68,12%	B	Baik
7.	Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,244	64,88%	C	Cukup Baik
8.	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	3,075	60,43%	C	Cukup Baik
Rata - rata		3,359	67,47%	C	Cukup Baik

Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan hidup (tabel 3.) menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup diperoleh nilai 60,43% dengan mutu pelayanan termasuk kategori C. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastuktur sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup di Kabpuaten Muara Enim pada tahun 2023 termasuk dalam kondisi yang cukup baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan fisik infrastruktur sarana dan prasarana lingkungan hidup dengan nilai rata-rata 3,377. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (58,26%) menyatakan bahwa ketersediaan fisik pengelolaan sampah dan limbah cukup sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas fisik infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dengan nilai rata-rata sebesar 2,913, sebanyak 59,13% masyarakat Kabupaten Muara Enim menyatakan cukup baik.

Sub unsur yang disurvei dan menunjukkan tingkat kepuasan terendah berdasarkan persepsi masyarakat (nilai kenyataan) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terendah
Berdasarkan Sub Unsur Pelayanan Infrastruktur

No	Sub Unsur Pelayanan	Tingkat Kepuasan
1	Ketersediaan fisik pengelolaan limbah	57,54%
2	Ketersediaan fisik pengelolaan sampah	58,99%
3	Kualitas fisik pengelolaan limbah	59,13%
4	Kualitas fisik pengelolaan sampah	59,13%
5	Tingkat pemanfaatan pengelolaan limbah	59,71%
6	Tingkat pemanfaatan pengelolaan sampah	61,01%
7	Ketersediaan fisik sarana transportasi bus	61,30%
8	Ketersediaan fisik fasilitas terminal	61,30%
9	Kesesuaian pengelolaan limbah	61,30%
10	Ketersediaan fisik Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	61,74%

Hasil survei tersebut sejalan dengan hasil perhitungan IKLI per variabel pada tabel 3.54 yang menunjukkan bahwa variabel sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup merupakan indeks kepuasan layanan infrastruktur per variabel yang terendah dengan skor 3,075 atau dengan tidak kepuasan 61,74 dari total 100%.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Infrastruktur jalan dan jembatan
 - a) Pembangunan jalan baru dilaksanakan di Kecamatan Muara Belida, Benakat, Muara Enim, Rambang Niru dan Lubai.
 - b) Peningkatan kondisi jalan dilaksanakan di Kecamatan Gelumbang, Muara Belida, Lubai, SDL, Rambang Niru, Tanjung Agung, Benakat, Lubai Ulu, Rambang, Lawang Kidul, Ujan Mas, Empat Petulai Dangku, Muara Enim, Panang Enim, Gunung Megang, Kelekar, Lembak, SDT, Belida Darat, Belimbing dan SDU.
 - c) Pelebaran jalan menuju standar dilaksanakan di Kecamatan Gelumbang, Kelekar, Belimbing, Lembak, Muara Enim, Ujan Mas, Rambang dan Belida Darat.
 - d) Rehabilitasi jalan dilaksanakan di Kecamatan Belida Darat, SDU, Ujan Mas, Sungai Rotan, Gelumbang, Rambang, SDT, Lawang Kidul, Tanjung Agung, Belimbing, Muara Enim, SDL, Gunung Megang dan Rambang Niru.

- e) Pembangunan jembatan baru dilaksanakan di Kecamatan Rambang, Sungai Rotan, Lubai, Benakat, Empat Petulai Dangku, Lubai Ulu, Gelumbang, Lembak dan Belida Darat.
 - f) Rehabilitasi dan penggantian jembatan dilaksanakan di Kecamatan Lawang Kidul, Lembak, Tanjung Agung, Panang Enim, SDT, Kelekar, Rambang, Rambang Niru, Gelumbang, SDU dan Benakat.
2. Infrastruktur air bersih dan sanitasi, target persentase rumah tangga akses air bersih layak tahun 2025 sebesar 73,50%, dengan realisasi 76,06%. Pembangunan SPAM sebanyak 45 unit melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Sampai akhir 2025, dari 138.503 rumah tangga, sebanyak 105.350 rumah tangga telah menggunakan sumber air minum layak. Pembangunan jamban dan tangki septik dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Gunung Megang, Gelumbang, Kelekar, Muara Belida, Rambang dan Sungai Rotan.
 3. Infrastruktur drainase dan pengendalian banjir
 - a. Pembangunan sistem drainase lingkungan dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Lembak dan Lawang Kidul. Rehabilitasi drainase perkotaan dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim, Gelumbang, Lubai.
 - b. Pembangunan drainase perkotaan dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim, Gelumbang, Kelekar, Lawang Kidul, Lubai, Panang Enim, Sungai Rotan, Rambang Niru, Belida Darat, Belimbing, Tanjung Agung, Benakat, Empat Petulai Dangku, SDT, Lubai Ulu, Lembak dan SDL.
 - c. Pembangunan tembok penahan tanah/bronjong dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim, SDT, Benakat, Gunung Megang, SDU, Kelekar, Ujan Mas, Lubai, SDL, Panang Enim, Gelumbang dan Rambang Niru.
 4. Infrastruktur irigasi ditingkatkan dengan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim, Lubai, SDU, Tanjung Agung, Panang Enim, SDL dan SDT.
 5. Infrastruktur persampahan ditingkatkan dengan pembangunan TPS 3R di Kecamatan Muara Enim, Rambang, Lembak, Kelekar, SDT dan Belida Darat.
 6. Pembangunan dan/atau lanjutan sarana dan prasarana TPA Gelumbang Tahun 2025.
 7. Penataan ruang dengan penetapan RTRW dan RRTR. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan capaian indeks Kualitas Layanan Infrastruktur antara lain:

1. Peningkatan kualitas jalan penghubung desa - kecamatan - pusat ekonomi, menjadikan prioritas dalam program pengendalian tindak lanjut berkenaan dengan ketersediaan dan kualitas fisik sarana transportasi bus, fasilitas terminal, dan sarana transportasi angkutan para transit.
2. Pengembangan SPAM Perdesaan.
3. Pembangunan sanitasi layak, tempat pembuangan sampah dan pengelolaan limbah.
4. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
5. Pemeliharaan rutin infrastruktur ketersediaan fisik ruang ramah anak serta memperhatikan juga dari sisi kualitas fisiknya.
6. Pengukuran dan evaluasi IKLI secara berkala.
7. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah.

Program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran kinerja antara lain program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi.

9. Capaian Tujuan 6
Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah

Tabel 2.49
Analisis Pencapaian Tujuan 6
Menurunkan Risiko Bencana Melalui Mitigasi Yang Efektif dan Penguatan Ketahanan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Indeks Risiko Bencana	Angka	147,41	145,91	168,35*	86,67	139,91	168,35*	83,11
Rata – rata capaian kinerja					86,67			83,11

*) Nilai dari BNPB dengan metode perhitungan terbaru

Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebesar 168,35, masih berada di atas target yang ditetapkan sebesar 145,91 serta lebih tinggi dibandingkan target akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 139,91. Peningkatan indeks realisasi ini dikarenakan bahwa pada Tahun 2025 terjadi perubahan metode pengukuran IRB oleh pemerintah pusat. Perubahan metodologi tersebut berdampak pada perbedaan pendekatan perhitungan, indikator penilaian, serta pembobotan komponen risiko. Nilai IRB yang diterima daerah merupakan hasil penilaian nasional berdasarkan metodologi terbaru, sehingga tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara linier dengan *baseline* maupun target yang ditetapkan menggunakan metode sebelumnya.

Selain faktor metodologis, capaian IRB juga dipengaruhi oleh kesiapan data dan dokumen pendukung yang menjadi komponen penilaian, khususnya dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan Daerah (RPKD). Data risiko dan dokumen sektoral yang tersebar pada berbagai Perangkat Daerah belum seluruhnya terintegrasi dan mutakhir, sehingga mempengaruhi penilaian kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana. Belum tercapainya target IRB Tahun 2025 tidak semata-mata mencerminkan peningkatan risiko secara faktual, namun juga dipengaruhi oleh perubahan sistem evaluasi dan penguatan aspek tata kelola data kebencanaan.

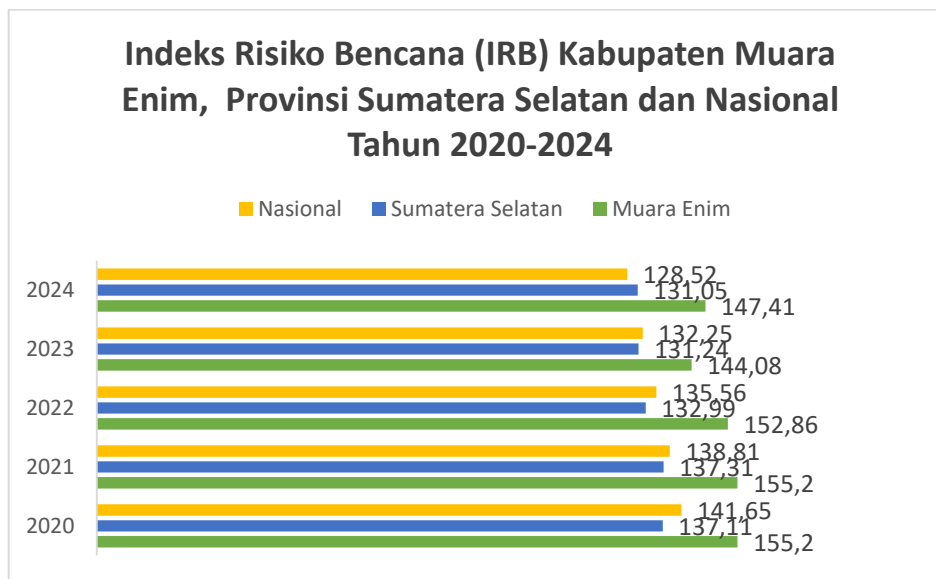
Perubahan metode pengukuran IRB Tahun 2025 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memperkuat tata kelola data kebencanaan, integrasi dokumen perencanaan, serta kapasitas pengurangan risiko bencana secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat

pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan. Pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 pada Provinsi Sumatera Selatan memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 131,05.



Indeks Risiko Bencana Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren menurun setiap tahunnya yang mengindikasikan berkurangnya risiko bencana di Muara Enim. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 masih berada dibawah Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan sebesar 131,05 dan Indeks Risiko Bencana Nasional sebesar 128,52.

Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah sebagai salah satu komponen utama penilaian Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana, antara lain:

1. Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana secara tatap muka kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan sesuai jenis ancaman. Dari target 135 warga, terealisasi 120 warga atau sebesar 85,55%. Meskipun belum mencapai target, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.
2. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, yang diwujudkan melalui:

- Pelaksanaan gladi kesiapsiagaan,
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana,
- Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC),
- Penyusunan dokumen rencana kontinjensi.

3. Peningkatan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan realisasi lebih dari 500 korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi dari target 500 korban per jenis kejadian bencana. Hal ini menunjukkan respons tanggap darurat yang efektif.
4. Menghimpun dan mengintegrasikan data dukung dari Perangkat Daerah terkait sebagai bagian dari penguatan basis data risiko bencana daerah.
5. Penguatan sistem dasar kelembagaan penanggulangan bencana, melalui:
 - Penyusunan dan pengesahan 1 dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P).
 - Tersusunnya dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan,
 - Ketersediaan 12 dokumen data dan laporan informasi kebencanaan,
 - Penyelesaian 2 dokumen maklumat pelayanan secara sah/legal dengan capaian 100%.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa secara kapasitas kelembagaan dan operasional, Kabupaten Muara Enim telah melakukan penguatan sistem penanggulangan bencana. Namun demikian, peningkatan kapasitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam nilai IRB Tahun 2025, yang turut dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran serta aspek kelengkapan dan integrasi data lintas sektor.

Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam mengurangi indeks risiko bencana selama tahun 2025 sebagai berikut :

Pada Tahap Pra-Bencana:

1. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana masih rendah.
2. Edukasi dan simulasi kebencanaan belum menjangkau seluruh wilayah rawan.
3. Data risiko bencana belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi.
4. Koordinasi lintas sektor (Perangkat Daerah, desa, relawan) belum optimal.
5. Sarana prasarana mitigasi seperti rambu, EWS, dan jalur evakuasi masih terbatas.
6. Keterbatasan SDM teknis kebencanaan.

Pada Tahap Tanggap Darurat:

1. Mobilisasi personel dan logistik belum sepenuhnya cepat dan efektif.

2. Sistem komando dan komunikasi darurat belum optimal.
3. Data korban dan kerusakan pada awal kejadian belum akurat.
4. Koordinasi lintas instansi masih perlu diperkuat.

Pada Tahap Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) :

1. Pemahaman metodologi JITUPASNA di tingkat perangkat daerah dan desa masih terbatas.
2. Verifikasi data kerusakan dan kerugian memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Dukungan data sektoral dari Perangkat Daerah teknis belum maksimal.
4. Pada Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR)
5. Sinkronisasi dokumen RR dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum optimal.
6. Kapasitas teknis perencanaan pascabencana masih perlu ditingkatkan.

Dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam penurunan indeks risiko bencana akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Penguatan Pra-Bencana

1. Meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan.
2. Memutakhirkan peta risiko dan basis data kebencanaan secara periodik.
3. Memperkuat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
4. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kebencanaan.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor.

Penguatan Tanggap Darurat:

1. Penyusunan dan pembaruan SOP tanggap darurat.
2. Penguatan sistem komando dan komunikasi darurat.
3. Penyediaan logistik dan peralatan darurat yang memadai.
4. Optimalisasi posko terpadu lintas instansi.

Penguatan Tata Kelola Pascabencana:

1. Pembentukan tim JITUPASNA lintas Perangkat Daerah sejak pra-bencana.
2. Pengembangan database kerusakan dan kerugian sektoral.
3. Pemanfaatan teknologi informasi (GIS dan aplikasi pendataan lapangan).
4. Penyelarasan dokumen RR dengan dokumen perencanaan daerah.

Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Data :

1. Koordinasi intensif dalam penetapan dokumen Rencana Kontinjensi.

2. Percepatan penyusunan dan penetapan RPKD dengan dukungan data lintas Perangkat Daerah
3. Penguatan sistem informasi kebencanaan daerah.
4. Peningkatan sinergi data dengan Perangkat Daerah teknis.
5. Penguatan koordinasi vertikal dengan BNPB dan BPBD Provinsi.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, program penanganan darurat bencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, program pengembangan sistem informasi kebencanaan.

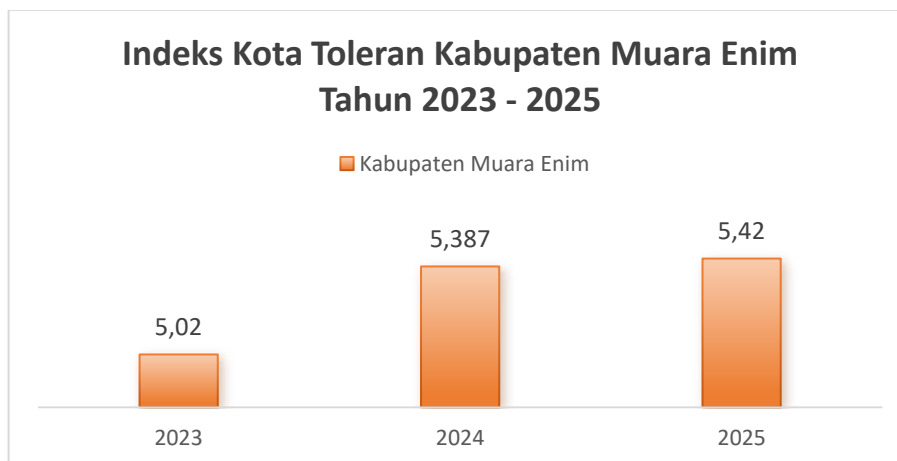
10. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat

Tabel 2.50
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2029	Realisasi 2025	
Indeks Kota Toleran	Indeks	5,387	5,41	5,42	100,18	5,48	5,42	98,91
Rata – rata capaian kinerja					100,18			98,91

Indeks Kota Toleran merupakan pengukuran kinerja kota meliputi pemerintah kota dan elemen Masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Target Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebesar 5,41 terealisasi sebesar 5,42 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,18 berada pada kategori sangat baik. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian di tahun 2025 sebesar 98,91 persen.

Indeks Kota Toleran merupakan pengukuran kinerja kota meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Indeks ini menilai kepemimpinan pemerintah, produk hukum, dan tindakan sosial yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta merawat harmoni sosial di tingkat kota.



Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim diukur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan SETARA Institute Jakarta. Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim meningkat dari 5,02 di tahun 2023 menjadi 5,387 di tahun 2024 dan di tahun 2025 sebesar 5,42. Hal ini menunjukkan tren positif dalam implementasi komitmen pemajuan toleransi dan inklusi sosial di Kabupaten Muara Enim terutama dalam konteks peran Pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kota Toleran di Kabupaten Muara Enim antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa/Kampung Sadar Kerukunan (Kampung Toleran). Telah dibentuk Desa Sadar Kerukunan di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 925 Tahun 2024 tentang Desa Sadar Kerukunan dan Susunan Pengurus. Pemilihan Desa Sigam didasarkan pada hasil survei Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim. Selain itu, pembentukan Kampung Toleran juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan nasional penguatan moderasi beragama.
2. Integrasi nilai moderasi beragama di satuan pendidikan. MTsN 2 Muara Enim mengintegrasikan materi moderasi beragama dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guna memperkuat pemahaman tenaga pendidik terhadap pentingnya sikap beragama yang seimbang, inklusif, dan toleran.
3. Fasilitasi perayaan hari besar keagamaan. Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan hari besar seluruh agama sebagai bentuk komitmen

dalam menjamin kebebasan beragama dan menciptakan rasa aman serta nyaman bagi seluruh umat beragama.

4. Pembinaan kerukunan umat beragama melalui FKUB. Pembinaan dan penguatan kerukunan dilaksanakan secara rutin bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui kegiatan dialog, koordinasi, serta konsolidasi antarperwakilan organisasi keagamaan.
5. Fasilitasi dan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah dilakukan melalui mekanisme Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna memastikan terpenuhinya aspek administrasi dan sosial kemasyarakatan secara tertib dan kondusif.
6. Pemberian bantuan pembangunan rumah ibadah. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pembangunan rumah ibadah, termasuk pembangunan gereja di Kecamatan Gelumbang, sebagai bentuk dukungan terhadap sarana peribadatan yang layak bagi seluruh umat beragama.
7. Dialog lintas agama dan penanganan permasalahan secara cepat. Dialog lintas agama dilaksanakan secara berkala melalui FKUB dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas sosial. Setiap potensi permasalahan atau gesekan sosial yang muncul segera ditindaklanjuti melalui pendekatan persuasif dan musyawarah.
8. Dilaksanakan rapat dan koordinasi antar organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, termasuk karang taruna dan organisasi lainnya, dalam rangka memperkuat kolaborasi sosial serta mendorong kegiatan produktif seperti pengembangan kewirausahaan sebagai bagian dari penguatan kohesi sosial.
9. Pemberian bantuan operasional bagi organisasi keagamaan. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi bantuan operasional kepada organisasi keagamaan guna mendukung kegiatan pembinaan umat dan menjaga harmoni sosial.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Mendorong integrasi nilai toleransi dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten akan mengarahkan kecamatan dan desa untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama ke dalam program kerja lokal, melalui pelatihan aparatur, dialog masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan sosial berbasis keberagaman.
2. Memperkuat kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil. Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan meningkatkan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta

kelompok minoritas dalam kegiatan-kegiatan rutin yang partisipatif guna menjaring aspirasi, memfasilitasi agenda keagamaan, dan memperluas ruang inklusi sosial.

3. Peningkatan peran generasi muda dalam penguatan toleransi. Memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan lintas keagamaan, serta terlibat dalam forum-forum dialog dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Penguatan pendekatan berbasis dialog lintas agama. Memperluas forum pertemuan dan dialog lintas keagamaan secara berkelanjutan guna mendorong interaksi sosial yang positif serta membangun kohesi dan inklusi sosial di tengah masyarakat.
5. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama melalui pembinaan, edukasi, serta kegiatan sosial bersama.
6. Peningkatan layanan perizinan rumah ibadah. Penyederhanaan prosedur perizinan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan sesuai ketentuan yang berlaku, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik sosial.
7. Pemberian dukungan operasional kepada organisasi keagamaan. Memfasilitasi bantuan operasional bagi organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Kristiani, Parisada Hindu Dharma, dan WALUBI, guna mendukung kegiatan pembinaan umat dan penguatan harmoni sosial.
8. Penguatan peran FKUB dan kegiatan kolaboratif sosial. Melaksanakan pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta memfasilitasi kegiatan bersama seperti kerja bakti, bakti sosial, dan forum kebersamaan lintas agama sebagai wujud nyata praktik toleransi di masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengembangan kapasitas kepramukaan, program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

11. Capaian Tujuan 8
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

Tabel 2.51
Analisis Pencapaian Tujuan 8
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi
Pada Peningkatan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	RPJMD 2025-2029		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi		Target 2025	Realisasi 2025	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,71	81	74,94*	92,52	85	74,94*	88,16
Rata – rata capaian kinerja					92,52			88,16

*Nilai sementara dari Portal RB per Januari 2026

Target capaian tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dengan indikator sasaran indeks reformasi birokrasi saat ini nilai akhirnya belum dirilis oleh Kementerian PAN RB sehingga masih menggunakan hasil sementara dengan capaian kinerja 92,52 persen berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025-2029 maka capaian kinerjanya tercapai 88,16 persen.

Adapun indeks reformasi Kabupaten Muara Enim tahun 2021 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.52
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim 2021 - 2025

No	Keterangan	Tahun				2025
		2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks reformasi birokrasi	CC (59,42)	B (60,78)	B (63,28)	A- (80,71)	B* (74,94)

*Nilai sementara dari Portal RB per Januari 2026

Sumber: Data diolah

Di tahun 2025 selain menyusun rencana aksi reformasi birokrasi general, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga menyusun rencana aksi reformasi tematik yaitu pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, hilirisasi, ketahanan pangan nasional, kualitas dan akses layanan kesehatan dan peningkatan akses, kualitas dan mutu layanan pendidikan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP :
 - a) Pendampingan dan asistensi atas tingkat maturitas SPIP pada Perangkat Daerah oleh APIP.
 - b) Pendampingan dan asistensi atas tingkat maturitas SPIP pada Perangkat Daerah oleh BPKP.
 - c) Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d) Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim bagi Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - e) Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah.
 - f) Melakukan pendampingan dengan BPKP untuk penyusunan dokumen risk resiko tingkat Perangkat Daerah dan Kabupaten.
2. Pada kegiatan pembangunan ZI dilakukan pendampingan, asistensi dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan.
3. Menetapkan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Pejabat Fungsional Statistisi serta Pejabat Fungsional Pranata Komputer, menyusun SOP/Petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata, interoperabilitas dan kode referensi serta mengusulkan permintaan pegawai Pejabat Fungsional Statistisi ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim dan ke BPS RI dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan statistik.
4. Pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI Versi 3 baik yang dilaksanakan di Depo Arsip maupun ke Perangkat Daerah.
5. Melakukan audit kearsipan di Perangkat Daerah dan kecamatan sekaligus pembinaan dan sosialisasi aplikasi SRIKANDI.
6. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.
7. Menyusun dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
8. Sosialisasi capaian IPAK dan penyampaian program pencegahan korupsi daerah.
9. Evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa dan pengoptimalan probity audit berkala pada pengadaan barang/jasa.
10. Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan SKM online ke Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

11. Penyusunan pemutakhiran data talent pool ASN berbasis kompetensi dan potensi.
12. Telah dilakukan penguatan regulasi internal untuk mendukung penempatan pegawai berbasis sistem merit.
13. Optimalisasi pemanfaatan SIASN dalam pengelolaan kepegawaian berbasis digital.
14. Pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian daerah dengan platform nasional.
15. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kepegawaian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi layanan ASN.
16. Memberikan *reward* berupa piagam penghargaan, lencana kepada pegawai di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
17. Memberikan *punishment* berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada setiap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kehadiran.
18. APIP Inspektorat melakukan evaluasi internal Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah per triwulan.
19. Pada kegiatan pembangunan ZI dilakukan pendampingan, asistensi dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan.
20. Menetapkan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Pejabat Fungsional Statistisi serta Pejabat Fungsional Pranata Komputer, menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata, interoperabilitas dan kode referensi serta mengusulkan permintaan pegawai Pejabat Fungsional Statistisi ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim dan ke BPS RI dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan statistik.
21. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.
22. Menyusun Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan *launching* budaya kerja BerAKHLAK.
23. Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan SKM online ke Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
24. Melakukan pendampingan penggunaan e-Katalog tiap Perangkat Daerah.
25. Melakukan pendampingan & Reviu RUP di dalam aplikasi SIRUP (Stuktur Anggaran & strategi pengadaan).
26. Melakukan koordinasi dan konsolidasi aktif terkait pengadaan barang dan jasa dengan UKPBJ Pembina dan LKPP.

27. Membuka layanan pengadaan secara elektronik untuk penyedia dan non-penyedia di Mall Pelayanan Publik.
28. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKK untuk penggunaan toko DARING & e-katalog.
29. Melakukan pendampingan pemenuhan data e-kontrak.
30. Menginisiasi peningkatan kompetensi SDM PBJ dari personil lainnya.
31. Melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa kepada personil UKPBJ.
32. Pemenuhan data dukung sesuai dengan indikator yang disajikan dalam variabel.
33. Mengikuti peluncuran SIA SPBE V2 secara daring.
34. Mengikuti pelatihan bimtek SIA SPBE V2 yang dilakukan oleh Kemenpan RB.
35. Menyusun Dokumen Kebijakan seperti, SK Tim Asessor, SK Bupati Tentang Tim koordinasi SPBE, SK Peta Rencana SPBE, dan SK Arsitektur SPBE TO-BE.
36. Evaluasi mandiri terhadap penerapan pelaksanaan SPBE dengan hasil 3,77.
37. Koordinasi terkait penggunaan indikator pemerintah digital yang akan menggantikan Indeks SPBE Nasional pada dokumen perencanaan pemerintah daerah.
38. Melaksanakan pembinaan statistik sektoral secara berkala setiap tahun dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola data dan mendukung implementasi SPBE.
39. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sektoral, termasuk pemenuhan standar metadata, interoperabilitas, dan kualitas data.
40. Mengikuti dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai bagian dari penguatan tata kelola data dan peningkatan indeks SPBE.
41. Melaksanakan koordinasi dengan pembina data, yaitu BPS Kabupaten, dalam rangka harmonisasi metodologi, standardisasi data, dan peningkatan kualitas statistik sektoral.
42. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta regulasi daerah terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan pelaksanaan penilaian EPSS.
43. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan produsen data di lingkungan Perangkat Daerah untuk memastikan konsistensi, validitas, dan integrasi data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Melakukan internalisasi dan monitoring budaya kerja ASN BerAKHLAK secara berkelanjutan.

2. Melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penilaian kematangan Perangkat Daerah.
3. Melakukan penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025 - 2029.
4. Melakukan evaluasi SOP yang berorientasi pada kecepatan dan kepastian layanan.
5. Menerapkan manajemen talenta ASN secara bertahap.
6. Memperkuat peran APIP dalam evaluasi SAKIP internal dan evaluasi RB.
7. Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai dengan level yang ditargetkan.
8. Mengembangkan zona integritas menuju WBK/ WBBM pada unit pelayanan.
9. Melakukan pendampingan terhadap unit pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
10. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan menindaklanjuti hasil SKM.
11. Menyusun rencana aksi RB Tematik yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025 - 2029.
12. Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam implementasi RB tematik.
13. Meningkatkan penerapan teknologi informasi terkait kepegawaian yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
14. Meningkatkan pendampingan, asistensi dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan sehingga target ZI dapat dicapai.
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan membuat surat edaran kepada Perangkat Daerah untuk mengaktifkan kembali penggunaan aplikasi SRIKANDI.
16. Pengembangan kompetensi SDM PBJ terkait pemenuhan PPK tipe B melalui BKPSDM.
17. Pengembangan dan peningkatan kompetensi fungsional PBJ menuju jenjang JF Ahli Muda & Madya.
18. Mengoptimalkan pemenuhan data e-kontrak.
19. Meningkatkan progress kepatuhan penginputan data ke aplikasi SIRUP.
20. Melaksanakan penelaahan serta inventarisasi kelengkapan dokumen pendukung produk hukum yang diunggah guna memastikan kesesuaian dan validitas data.
21. Konsultasi ke Kementerian PAN RB terkait transformasi Indeks SPBE ke Indeks Pemerintahan Digital, evaluasi mandiri Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital.

22. Melakukan koordinasi penyempurnaan proses bisnis yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD terbaru dengan Bagian Organisasi Setda.
23. Reviu arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menyesuaikan dokumen RPJMD terbaru.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di dukung program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan aplikasi informatika, program pengelolaan arsip, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

1. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut ke-12 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)



2. Kabupaten Muara Enim Raih *Innovative Government Award* (IGA) Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai ‘Kabupaten Sangat Inovatif’ Tahun 2025.



3. Pemerintah Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebagai Peringkat Ketiga Nasional dan satu satunya peraih diluar Pulau Jawa dengan inovasi unggulan kolaborasi pemanfaatan irigasi berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN)/Bappenas RI.



4. Penghargaan Terbaik Pertama sebagai Kabupaten/Kota dengan Cakupan Imunisasi Rutin tahun 2024 dan triwulan I Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



5. Peringkat 7 pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan perolehan 12 medali yaitu 1 emas, 3 perak dan 8 perunggu.



6. Kabupaten Muara Enim meraih dalam penganugerahan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebanyak 12 sekolah di Kabupaten Muara Enim menerima penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional dan Mandiri sekaligus menjadikan sebagai penerima terbanyak di Sumatera Selatan.



7. Penghargaan Kematangan UKPBJ Proaktif atas Pencapaian Pemenuhan Standart LPSE 2022 sebagai LPSE System Provider oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Kepala Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, meraih Penghargaan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



9. Predikat BB dengan nilai 76,51 atau naik sebesar 1,1 poin dari tahun 2023 atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
10. Penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2025 pada Ajang TOP BUMD Awards Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah TOP Business.

11. Penghargaan PPID Provinsi Sumatera Selatan “SLIP PPID AWARD” Tahun 2025 dengan Prestasi Baik Sekali.



12. Terbaik I Regional Luar Jawa Bali I Kategori Rata-rata Pelayanan KB MKJP Terbanyak pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional.



13. Penghargaan Tercepat Bentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan se-Sumsel dari Menteri Hukum RI.



14. Penghargaan sebagai Pionir Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Gender di Sumsel dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Selatan.



15. Lubuk Raman Harumkan Muara Enim, Raih Peringkat 3 Desa Terbaik Nasional 2025.



16. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya Tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.



17. Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang diraih Desa Lubuk Raman.



18. Penghargaan Pin Emas KTNA sebagai Bukti Komitmen Maju dan Sejahteraan Petani.



19. Juara Umum 3 Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ke-16 Sumsel Tahun 2025 di Musi Banyuasin.



20. Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Kabupaten Muara Enim meraih skor tertinggi 98,61 dan ditetapkan sebagai pemerintah kabupaten/kota dengan kualifikasi paling informatif di Sumatera Selatan.



21. Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan bergengsi atas keberhasilan implementasi 100 persen pembayaran gaji ASN melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI di awal tahun 2026.



22. Sebanyak 7 kepala desa (Kades) dan 2 Lurah Kabupaten Muara Enim menerima penghargaan Non Litigation Peacemaker (NL.P) Tahun 2025 oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Adapun penghargaan NL.P yang diberikan kepada kades dan lurah yang berhasil menyelesaikan masalah hukum diwilayahnya secara damai tanpa proses pengadilan. Penghargaan dalam bentuk piagam ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sumsel.



23. Satu-satunya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Pembina Proklam yang diberikan kepada Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum atas keberhasilannya membina dan mendukung gerakan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di wilayahnyadari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.



24. MAN 1 Muara Enim Raih Tiga Penghargaan Anugerah Humas Award 2026.



25. Desa Harapan Jaya, Kecamatan Muara Enim turut menorehkan prestasi gemilang dengan berhasil meraih penghargaan Proklim Utama 2025, yang dinilai mampu mengimplementasikan aksi nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.



26. Radio LPPL Suara Muara Enim Terbaik I Penyiaran Informasi Pembangunan Daerah Kategori Pendidikan dan Kesehatan di Ajang Anugerah Penyiaran Sumsel 2025 oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan otonomi daerah, selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pelayanan kesehatan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Pada Tahun 2025, tidak terdapat Instansi Pemerintah Pusat yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim

3.2.1 Target Kinerja

Target program yang ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 434/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Nomor 637/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

3.2.2 Realisasi

Pada Tahun 2025, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pelaksanaan program-program strategis prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Adapun program-program tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp 23.500.000.000,00;
2. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 27.500.000.000,00;
3. Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp 6.000.000.000,00.

Adapun secara terperinci dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No	Pemerintah Provinsi	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program/ Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 434/KPTS/BPKAD /2025 Tanggal 7 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025	Program Penyelenggaraan Jalan/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Subkegiatan Rekonstruksi Jalan, Peningkatan Jalan Desa Talang Nangka - Batas Kab.Pali (Desa Pandan) Target Output: 1 Paket	Desa Talang Nangka – Batas Kab. Pali (Desa Pandan) Kab. Muara Enim	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.500.000.000	5.645.600.000	20	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi capaian kegiatan fisik Peningkatan Jalan Desa Talang Nangka - Batas Kab.Pali (Desa Pandan) sebesar 15% yang diakibatkan kondisi cuaca (banjir) sehingga diperlukan perpanjangan waktu pengerjaan pada tahun 2026.	15
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyediaan	Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	Dinas Kesehatan	6.000.000.000	5.925.000.000	100	Tuntas Dilaksanakan	100

			Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 637/KPTS/BPKAD /2025 Tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) / Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota / Output: Jumlah Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum / Rincian Kegiatan : Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell Sebanyak 734 Unit Dipasang di 14 Kecamatan	Kab. Muara Enim	Dinas Perhubungan	23.500.000.000	23.488.000.139	100	Tuntas Dilaksanakan	100

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersifat *reimburse* dengan 3 (tiga) tahap penyaluran, yaitu :

1. Tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak.

2. Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak, tahap ini baru bisa diajukan bila penggunaan di tahap I sudah mencapai 75%.
3. Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak, tahap ini baru bisa diajukan bila penggunaan di tahap II sudah mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengajukan permohonan pencairan tahap I, II, dan III kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025. Namun, realisasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 hanya Tahap I yaitu 30% dari nilai kontrak pekerjaan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 434/KPTS/BPKAD/2025 sebesar Rp9.975.900.000,00 yang diterima pada RKUD Kab. Muara Enim pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk pekerjaan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 637/KPTS/BPKAD/2025 belum ada realisasi pencairan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan telah selesai 100% dan pembayaran kepada pihak ketiga telah terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sedangkan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat perpanjangan waktu dikarenakan kondisi cuaca yang hujan terus-menerus sehingga menyebabkan lokasi pekerjaan terendam banjir.

Ada pun rincian dari realisasi Tahap I dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan ialah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak sebesar Rp27.328.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.198.400.000,00;
2. Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.925.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.777.500.000,00.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan pelaksanaan program Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) karena anggaran pekerjaan tersebut terdapat pada APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 tanggal 16 Oktober 2025. Pelaksanaan pekerjaan

dimulai pada November 2025 dan jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa bahwa pengajuan pencairan dilakukan secara bertahap dengan syarat dan dokumen yang harus dipenuhi. Hal tersebut menyebabkan penyampaian dokumen persyaratan pengajuan pencairan BKBK mendekati akhir tahun anggaran sehingga proses pencairan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak tepat waktu.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Solusi yang diharapkan yaitu untuk pekerjaan yang bersumber dari dana BKBK hendaknya dianggarkan pada APBD Induk agar pelaksanaan pekerjaan dan penyampaian pengajuan pencairan dana BKBK ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tepat waktu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari mewujudkan wajib belajar pendidikan secara maksimal, agar jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak sekolah legal baik formal maupun non formal dari PAUD (TK, RA, dsb), SD/MI, SMP/MTS, paket A, paket B, ataupun, Sekolah Luar Biasa (LSLB), dan atau kalau ada anak usia sekolah yang sudah sekolah tapi rentan / berpotensi putus sekolah karena kemiskinan dan belum mendapat KIP, PKH, dan sebagainya, kurang keterjangkauan jarak transportasi dengan sekolah, kurang adanya fasilitas sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik kependidikan, tenaga penunjang, tenaga lab, dan sebagainya, maka Pemerintah Daerah wajib mendata, mendorong dan memfasilitasi, agar anak usia sekolah mendapat pendidikan untuk kehidupan yang layak sesuai amanat UUD 1945.

Stimulasi bisa berupa apa saja misalnya penyediaan sarana transportasi sekolah, sekolah dengan sarana prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, bantuan sosial hibah kepada siswa kurang mampu, menyediakan pendidikan gratis, buku gratis, seragam, tas hingga sepatu gratis, sarapan gratis jika anggaran ada, mampu dan memungkinkan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1	2	3	4
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara Usia 4 s/d 6 Tahun	a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Atau Jasa; b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan c. Petunjuk Teknis Atau Tata Cara Pemenuhan Standar
2	Pendidikan Dasar	Warga Negara Usia 7 s/d 15 Tahun	
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun	

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Muara Enim

4.1.2 Target Pencapaian

- A. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan dengan cara :
- Menghitung jumlah anak usia 4 sampai 6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - Menghitung jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Dalam hal peserta didik mengikuti PAUD pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.
- B. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara :
- Menghitung jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - Menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar ; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Dalam hal peserta didik mengikuti Pendidikan Dasar pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.
- C. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara :
- Menghitung jumlah anak usia 7 sampai 18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - Menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan; dan

- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

Sebagai realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2025 jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) sebanyak 96.937 jiwa dengan capaian sebesar 100%.

Jumlah warga negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 1.163 jiwa dengan capaian sebesar 100%.

Sedangkan jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 12.931 jiwa dengan capai sebesar 100%.

4.1.3 Realisasi

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = (4):(3) x100%	Jumlah penduduk usia sekolah	Target Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = (7):(6) x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	109.979	90.009	81,84%	111.135	96.937	87,22%
2. PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	137.280	1467	1,07%	144.172	1.163	0,80%
3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	23.166	13.632	55,84%	23.066	12.931	56,06%

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Muara Enim

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Muara Enim tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Alokasi Anggaran

No	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	364.486.351.709	356.325.467.516	97,76%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.217.252.857,90	232.311.995.508	97,93%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	106.447.510.127	103.859.922.122	97,57%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	18.204.245.704	17.632.160.924	96,86%
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	2.617.343.020	2.521.388.962	96,33%
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	344.552.900	313.684.418	91,04%
	Penetapan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar	344.552.900	313.684.418	91,04%
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 6.894.487.888	Rp. 5.870.508.690	85,15%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Rp. 6.894.487.888	Rp. 5.870.508.690	85,15%

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Muara Enim

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Dukungan Personil Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

KELOMPOK PEGAWAI	JENIS PEGAWAI	JENJANG TEMPAT TUGAS				JUMLAH
		Dinas	SD	SMP	TK	
PNS	Guru		1.537	756	23	2.316
	Pengawas	29				29
	Penjaga Sekolah		10	-	-	10
	Tata Usaha		1	21	-	22
PPPK	Guru		2.671	1.256	937	4.864
	Penjaga Sekolah		169	61	4	234
	Tata Usaha		1.162	392	142	1.696

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Muara Enim

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
2. Kesulitan mendapatkan data pendidikan pada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama.
3. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang guna pemenuhan SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4. Adanya kesulitan dalam pengelompokan anggaran SPM dikarenakan nama Program dan Kegiatan pada website SPM milik Kementerian Dalam Negeri tidak sama dengan nama program dan kegiatan pada aplikasi penganggaran Pemerintah Daerah yaitu Website SIPD.
5. Belum meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, belum gencarnya sosialisasi yang dilakukan, sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain: keterbatasan pendanaan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik terkait dengan pendidikan khususnya anak usia dini dan Pendidikan NonFormal, dan rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Kesetaraan terutama yang di perdesaan.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim terkait permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan SDM yang tersedia saat ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
2. Berupaya segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama guna mendapatkan data pendidikan yang dibutuhkan tepat waktu.
3. Akan memperbaiki bahkan menambah sarana dan prasarana penunjang guna pemenuhan SPM tersebut.
4. Mengelompokkan nama-nama program dan kegiatan yang ada kesamaaannya antara nama-nama program dan kegiatan di website SPM Kementerian Dalam Negeri dengan nama-nama program dan kegiatan yang ada di Website SIPD.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan kesehatan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya ada 12 jenis Pelayanan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar;
4. Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar;
5. Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia Produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 Tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan sesuai standar.

4.2.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya.

Tabel 4.5
Target dan sasaran SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

NO	INDIKATOR LAYANAN SPM	Sasaran 2025	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.315	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	9.917	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	9.815	100
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	47.083	100
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	23.320	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	418.999	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	54.388	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	120.865	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	7.735	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.291	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	11.971	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	15.983	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab.Muara Enim

4.2.3 Realisasi

Hasil Capaian adalah realisasi dari taget yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Tabel 4.6
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

INDIKATOR SPM		Total Capaian 2025	
		% Cakupan	% Realisasi Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	91.97	95.56
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	91.62	80.75
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	91.32	12.37
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	95.06	92.64
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.96	91.38
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93.71	87.59
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.38	93.28
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	99.19	99.51
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	99.02	72.95
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	97.68	89.80
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	124.31	65.41
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	104.36	80.71

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab.Muara Enim

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Muara Enim 2025

NO	INDIKATOR LAYANAN SPM	Total Anggaran SPM (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	364.110.874,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	49.775.900,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	966.290.000,00
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	219.741.406,00
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19.975.550,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1.768.885.960,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	626.900.850,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	868.956.500,00
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	33.405.200,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90.180.465,00
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	299.048.400,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	108.035.435,00
Total		5.415.306.540,00

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab.Muara Enim

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Tabel 4.8

Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Fasyankes	Dokter Spesialis						Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Terapis Gigi dan	Tenaga Farmasi	Tenaga Gizi	Tenaga Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Tenaga Laboratorium	Radiografer	Psikologi Klinis	Perawat Jiwa
		Sp. A	Sp. PD	Sp. B	Sp. OG	Sp. KK	Sp. Paru													
1	Pajar Bulan	0	0	0	0	0	0	1	1	31	42	1	3	1	5	2	3	0	0	0
2	Tanjung Raya	0	0	0	0	0	0	3	0	28	21	1	2	1	1	2	2	0	0	0
3	Pulau Panggung	0	0	0	0	0	0	1	0	22	32	2	4	2	5	3	2	0	0	0
4	Tanjung Agung	0	0	0	0	0	0	6	1	31	47	1	4	3	4	5	3	0	0	0
5	Tanjung Enim	0	0	0	0	0	0	5	2	37	43	5	3	1	1	2	4	0	0	0
6	Muara Enim	0	0	0	0	0	0	3	2	43	60	4	5	1	4	1	2	0	0	0
7	Ujan Mas	0	0	0	0	0	0	3	1	16	44	1	3	2	2	2	2	0	0	0
8	Benakat	0	0	0	0	0	0	2	1	14	14	3	2	2	2	1	3	0	0	0
9	Gunung Megang	0	0	0	0	0	0	3	1	19	38	1	5	2	3	2	3	0	0	0
10	Sumaja Makmur	0	0	0	0	0	0	1	0	15	27	2	2	0	3	1	2	0	0	0
11	Teluk Lubuk	0	0	0	0	0	0	3	0	13	37	1	3	4	2	2	2	0	0	0
12	Tebat Agung	0	0	0	0	0	0	3	1	24	33	3	4	3	2	4	4	0	0	0
13	Muara Emburung	0	0	0	0	0	0	2	0	12	21	1	5	2	3	1	6	0	0	0
14	Sugih Waras	0	0	0	0	0	0	3	0	18	46	2	2	2	2	2	2	0	0	0
15	Beringin	0	0	0	0	0	0	3	1	11	37	1	2	2	2	3	3	0	0	0
16	Sumber Mulia	0	0	0	0	0	0	2	2	17	42	2	2	2	1	2	1	0	0	0
17	Lembak	0	0	0	0	0	0	5	1	27	42	2	3	2	3	2	3	0	0	0
18	Belida Darat	0	0	0	0	0	0	2	1	16	48	2	2	2	2	2	2	0	0	0
19	Kelekar	0	0	0	0	0	0	3	0	12	39	4	3	2	2	2	1	0	0	0
20	Gelumbang	0	0	0	0	0	0	4	2	31	87	2	3	3	5	4	4	0	0	0
21	Sukarame	0	0	0	0	0	0	3	1	25	34	3	2	3	0	2	3	0	0	0
22	Muara Belida	0	0	0	0	0	0	3	1	10	29	1	4	2	3	1	2	0	0	0
23	Empat Petulai	0	0	0	0	0	0	1	0	5	26	1	1	1	2	1	1	0	0	0
24	Panang Enim	0	0	0	0	0	0	1	0	6	24	1	1	1	2	1	1	0	0	0
25	RSUD RABAIN	4	4	3	2	2	2	33	3	290	69	4	16	9	5	12	35	16	1	0
26	RSUD SDL	1	0	1	1	0	0	7	1	45	32	3	6	3	2	5	3	3	0	0
27	RSUD GELUMBANG	1	1	1	2	0	0	12	3	36	30	3	8	4	3	4	5	4	0	0
28	RSUD LUBAY	1	1	0	1	0	0	13	1	52	48	3	9	4	2	5	6	3	0	0
	Jumlah	7	6	5	6	2	2	131	27	906	1092	60	109	66	73	76	110	26	1	0

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab.Muara Enim

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 91.97%, Sisanya belum mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kehamilan, belum semua sasaran terdata, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak terlapor, faktor geografis yang sulit, dan sasaran yang berpindah tempat.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar capaian di tahun 2025 sebesar 91.62%, capaian ini belum sesuai dengan target dikarenakan masih ada persalinan di rumah, ibu

bersalin di fasilitas kesehatan lain/swasta tidak terdata/terlaporkan, dan sasaran yang berpindah tempat.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 91.32% karena tidak terlapor/terdata bayi yang lahir di pelayanan kesehatan swasta dan ditolong non nakes.
4. Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 95.06% karena masih ada balita yang tidak memantau pertumbuhan dan perkembangannya ke Posyandu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masih kurangnya kesadaran ibu membawa balita ke Posyandu.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 99.96% karena ada siswa yang tidak hadir saat skrining dan siswa yang putus sekolah/pindah.
6. Capaian Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih dibawah target yaitu 93.71 % hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target sebesar 99.38% dikarenakan kurangnya partisipasi usia lanjut melakukan pelayanan kesehatan di posyandu.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar capaian di tahun 2025 sebesar 99.19% capaian ini masih dibawah target dikarenakan Penderita Hipertensi merasa tidak ada keluhan sehingga tidak melakukan pemeriksaan dan minum obat secara rutin tiap bulan.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 99.02% hal ini dikarenakan penderita Diabetes Mellitus merasa sehat, dan merasa tidak perlu untuk memeriksa gula darah secara rutin dan mengambil obat secara rutin.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 97.68% hal ini dikarenakan masih kurangnya ketersediaan obat.
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 124.31% capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan TB, telah melampaui target. Keberhasilan tersebut didukung dengan gencarnya kegiatan cekling dan desaku libas TB membara yang menyasar sampai ke pelosok desa serta optimalisasi penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan didukung dengan tersedianya alat TCM, kendaraan mobil cekling yang dilengkapi dengan pemeriksaan CKG, PTM dan skrining TB. Serta peran aktif tenaga kesehatan dan masyarakat dalam deteksi dini
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar sebesar 104.36% capaian ini mencerminkan meningkatnya cakupan pelayanan HIV di kelompok sasaran seperti (ibu hamil, pasien TB, kelompok waria, kelompok LSL, kelompok wps, pasien IMS, warga binaan di lapas, penasun dan catin). pelaksanaan layanan tes dan konseling HIV di faskes berjalan optimal. Integrasi layanan HIV dengan program lain (KIA, TB dan IMS). Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap seperti alat tes HIV dan obat Anti Retroviral (ARV).

Solusi

Akan dilakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) sampai ke desa, selain itu adanya cek kesehatan gratis keliling (Cekling Membara) hingga ke desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Mengintegrasikan semua program yang ada di Dinas Kesehatan serta memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat dan penderita mengenai kesehatan semakin bertambah.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pekerjaan umum adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang pekerjaan umum yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;

4.3.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan termasuk perhitungan pembiayaannya adalah 100% (Seratus Persen).

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	2025

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Muara Enim

4.3.3 Realisasi

Pengukuran capaian pelaksanaan SPM pada jenis pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah persentase

jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dan jenis pelayanan pengukuran SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik yang terealisasi sebagai berikut:

Tabel 4.10
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian
		Indikator Pencapaian	Capaian %	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	76.06	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	84.55	2025

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Muara Enim

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2025, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	327,764,829	306.279.600	93.44
2.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,069,195,000	2.006.197.500	96.96
3.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	22,484,043,616	22.064.695.884	98.13
4.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1,812,339,745	1.793.401.924	98.96
5.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	21,947,549,600	21.311.731.777	97.10
6.	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	151.201.000	102.650.900	67.89
7.	Operasi dan pemeliharaan Sistem	226.224.590	38.390.880	16.97

	Pengelolaan Air Limbah Domestik			
JUMLAH		49.018.318.380	47.623.348.465	97.15

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Muara Enim

4.3.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 111 orang.

- a. Jumlah Pegawai Dinas PUPR dari Bulan Januari s.d Desember 2025:
 1. Pegawai Negeri Sipil : 74 Orang.
 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 36 Orang.
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PW) : 1 Orang.
- b. Rincian Pegawai PUPR.
 1. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.12
Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	17
2.	S1	58
3.	D4	2
4.	D3	7
5.	SLTA	27
6.	SLTP	-
JUMLAH		111 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

Tabel 4.13
Tingkat Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	8
3.	III	59
4.	IV	7
5.	V	14
6.	VII	3
7.	IX	20
JUMLAH		111 Orang

3. Jenis Kediklatan

Tabel 4.14
Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	1
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		1 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 7 Orang.
- c. Eselon IV : 4 Orang.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

1. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran/APBD.
2. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Kelembagaan dari Tingkat Desa Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (KPSPAM) belum bekerja dengan maksimal dan kurangnya dukungan dari pihak desa.
4. Penyelenggara terkait Pemeliharaan dan Operasional Perkotaan yaitu PDAM Lematang Enim belum menerapkan SOP yang benar.
5. Masih sangat kecilnya partisipasi dari pihak swasta dan dunia usaha.
6. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di desa belum bekerja maksimal pasca pembangunan.
7. Jarangnya iuran dari warga penerima manfaat IPAL Komunal.
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, memelihara dan mengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) yang terbangun dan air limbah sehingga masih ada yang melakukannya di pinggir sungai.
9. Kurangnya penyuluhan dari Pihak desa dan Sanitarian terkait pentingnya penggunaan jamban dan tangka septik sehat.

Solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait permasalahan di atas adalah:

- a. Menambah anggaran untuk kegiatan yang belum terlaksana.

- b. Meningkatkan kompetensi atau menambah personil dalam proses pendataan serta identifikasi kegiatan.
- c. Perlunya sosialisasi SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah agar bisa dipahami juga oleh dinas yang terkait untuk mendukung SPM tersebut.
- d. Menambah atau membuat penganggaran untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan SPM ke lokasi sasaran/target.
- e. Perumda Air Minum khususnya untuk layanan di Perkotaan kualitas airnya lebih ditingkatkan lagi, sedangkan untuk layanan air minum di Perdesaan KPSPAM yang sudah ada dapat menjaga kualitas airnya yang didistribusikan ke Pelanggan.
- f. Dinas yang terkait menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis dalam pengelolaan air minum dan air limbah.
- g. Mengalokasikan anggaran untuk pendataan bidang air minum dan air limbah secara berkala.
- h. Perlunya penganggaran untuk pengkajian kebutuhan sistem air limbah skala kawasan/kota yang hasilnya nanti bisa digunakan dalam perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun terkait pelayanan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana tersebut di atas, terdapat 2 poin urusan pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

- A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- B. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Muara Enim

NO	INDIKATOR SPM	TARGET KINERJA				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	TOTAL CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Muara Enim

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.16
Capaian SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Muara Enim

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		Tuntas Paripurna			100
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				100
1.1	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	0	0
1.2	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)				20
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	100

	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	100
	Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0	0	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota				100
2.1	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	0	0	0	100
2.2	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)	0	0	0	20
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0
	Subsidi uang sewa	0	0	0	0
	Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Muara Enim

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Muara Enim

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA (Kuantitatif)	PAGU INDUKATIF (Rp.)	KEUANGAN	
				(Rp)	(%)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		2.117.218.100	603.845.620	28,52
1.a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		399.497.600	341.770.966	85,55
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	117.858.300	103.998.741	88,24
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	233.868.000	221.065.225	94,53
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.771.300	16.707.000	34,97
1.b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		205.233.600	153.694.986	74,89

	Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	180 orang	205.233.600	153.694.986	74,89
1.c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		140.050.700	36.808.382	26,28
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	7 unit rumah	140.050.700	36.808.382	26,28
	JUMLAH		744.781.900	532.274.334	71,47

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Muara Enim

4.4.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 88 orang.

a. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dari Bulan Januari s.d Desember 2025:

1. Aparatur Sipil Negara : 84 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : 4 Orang.

b. Rincian Pegawai Disperkimtan.

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.18
Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	13
2.	S1	34
3.	D4	-
4.	D3	11
5.	SLTA	30
6.	SLTP	-
JUMLAH		88 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

Tabel 4.19
Tingkat Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	11
3.	III	35
4.	IV	5
5.	NON GOLONGAN	37
JUMLAH		88 Orang

3. Jenis Kediklatan

Tabel 4.20
Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	18
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		18 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 5 Orang.
- c. Eselon IV : 1 Orang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- a. belum adanya landasan hukum dan kepastian hukum pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana maupun relokasi rumah program Kabupaten/Kota
- b. belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran/APBD
- c. masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
- d. belum sinerginya implementasi SPM, belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan
- e. terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SPM
- f. terbatasnya biaya upah dan material sehingga masih membutuhkan swadaya dari warga penerima bantuan

Solusi yang mungkin dapat dilakukan terkait permasalahan di atas adalah:

- a) Menambah anggaran untuk kegiatan yang belum terlaksana
- b) Meningkatkan kompetensi atau menambah personil dalam proses pendataan serta identifikasi kegiatan
- c) Membuat rancangan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pelaksanaan Relokasi Rumah Korban Bencana dan Program Kabupaten Muara Enim

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berada di tiga Perangkat Daerah yaitu:

I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada bidang pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah : Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

4.5.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu tertentu dan termasuk perhitungan pembiayaannya adalah 100% (Seratus Persen).

Tabel 4.21
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim

No	Jenis Pelayanan Dasar	Data Pendukung		Target (%)
		Pembilang	Penyebut	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan Perda atau Perkada yang memuat Sanksi.	100

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Muara Enim

4.5.3 Realisasi

Capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Muara Enim adalah 96,39%. Angka ini mendekati standar tuntas paripurna (100%). Dimana Penegakan Perda atau Perkada tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kabupaten Muara Enim. Persentase pencapaian mutu barang/Jasa/SDM telah tercapai 81,96% menandakan pengelolaan sumber daya Satpol PP tepat sasaran, mendukung operasional penegakan Perda dan Perkada. Fokus perbaikan dapat ditekankan pada peningkatan kapasitas SDM untuk target 100% ke depan.

Tabel 4.22

**Capaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				96,39
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang Belum terlayani	
	A. Jumlah yang harus Dilayani	160.402	160.402	0	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16,39
	B. Jumlah mutu barang / jasa / SDM	Jumlah mutu barang / jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang / jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang / jasa yang belum tersedia	81,96
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	726	726	0	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli,	8	8	0	100

	penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)				
3.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	255	234	21	91,76
4.	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	0	0	0	100
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	0	100
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	515	515	0	100

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Muara Enim

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol PP Kabupaten Muara Enim untuk mendukung penerapan SPM Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23
Realisasi Keuangan SPM Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA (Kuantitatif)	PAGU INDUKATIF (Rp.)	KEUANGAN	
			(Rp)	(%)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1,824,730,300	1,493,297,725	81.84%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan		1,495,354,700	1,222,600,915	81.76%

Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.260.000	47.837.060	72,20%
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	432.288.700	426.292.568	98,61%
Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	62 Orang	458.350.000	304.350.000	66,40%
Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 Dokumen	98.288.000	93.863.000	95,50%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum melalui deteksi dini, dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	12 Laporan	226.928.000	149.067.132	65,69%
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Laporan	119.490.000	118.201.160	98,92%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	72 Unit	93.750.000	82.989.995	0,00%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		329.375.600	270.696.810	0,00%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan	83.373.600	73.511.760	88,17%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	171.106.800	125.009.200	73,06%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan	74.895.200	72.175.850	96,37%
JUMLAH		1.824.730.300	1.493.297.725	81,84%

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Muara Enim

4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 291 orang.

a. Jumlah Pegawai Satpol PP dari Bulan Januari s.d Desember 2025:

1. Pegawai Negeri Sipil : 114 Orang.
2. PPPK : 173 Orang.
3. PPNS Satpol PP : 4 Orang.

b. Rincian Pegawai Satpol PP.

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.24

Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	4
2.	S1	30
3.	D3	37
4.	D2	-
5.	SLTA	219
6.	SLTP	1
JUMLAH		291 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

Tabel 4.25

Tingkat Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	0
2.	II	82
3.	III	32
4.	IV	4
5.	V	173
JUMLAH		291 Orang

3. Jenis Kediklatan

Tabel 4.26

Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	12

2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	4
JUMLAH		16 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 4 Orang.
- c. Eselon IV : 10 Orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Beberapa subkegiatan belum teralokasikan anggaran yang cukup akibat efisiensi seperti subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
- Perlunya pembaharuan SOP untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu masyarakat.

Solusi

- Mengajukan alokasi anggaran pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja pada anggaran perubahan.
- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana dan prasarana mobilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- Penyusunan dan pembaharuan SOP dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa SOP baru memenuhi kebutuhan semua pihak.

II. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Sub Urusan Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Thn 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang atau jasa kebutuhan dasar yang berhak di peroleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten yaitu pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran memiliki 1 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan 4 mutu yang menjadi indikator capaian yaitu:

1. Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia

4.5.2 Target Pencapaian

Pada Permendagri No. 114 Thn 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.27

**Target Dan Sasaran SPM Bidang Urusan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Muara Enim**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	100%
		Prosedur operasional penanganan	100%

		kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	100%

Sumber data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Muara Enim

4.5.3 Realisasi

Hasil capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Muara Enim Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.28
Capaian SPM Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						89.07
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					89.71
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	89.71
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1536	1378	158	89.71
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.67
1	Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi		141	141	0	100
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		141	141	0	100
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran		852	781	71	91.67
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia		261	174	87	66.67
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran		46	46	0	100

6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran		95	95	0	100
---	--	--	----	----	---	-----

Sumber data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Muara Enim

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Pemadam Kebakaran tahun 2025 terdapat 1 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Pagu Anggaran Sebesar 3.652.969.866 dengan realisasi sebesar 3.253.794.951 atau 89,07%. Terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Tabel 4.29
Realisasi Keuangan SPM Trantibumlinmas Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN %
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			3.652.969.866	3.253.794.951	89.07
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449		2.059.059.700	1.903.652.600	92.45
	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12.457.724	11.530.665	92.56
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	908.514.608	825.770.493	90.89
	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30.874.956	27.678.295	89.65
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	496.387.279	433.068.900	87.24

	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jenis	505.000.000	502.933.200	99.59
	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	105.825.133	102.671.047	97.02
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			40.151.758	37.079.903	92.35
	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	19.488.058	17.567.272	90.14
	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	20.663.700	19.512.631	94.43
Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			49.573.728	48.938.578	98.72
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	49.573.728	48.938.578	98.72
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			734.163.858	701.041.691	95.49
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	111.933.180	108.842.107	97.24
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	622.230.678	592.199.584	95.17
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			770.020.822	563.082.179	73.13
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	466.076.850	347.070.904	74.47
	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	303.943.972	216.011.275	71.07
JUMLAH PROGRAM			3.652.969.866	3.253.794.951	89.07

Sumber data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab.Muara Enim

4.5.5 Dukungan Personil

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dengan membentuk Kelembagaan Tipe B mempunyai jumlah sarana dan prasaran mobil damkar sebanyak 22 unit, mobil tangki 4 unit, dan mempunyai pos damkar sebanyak 13 pos dengan meliputi 22 kecamatan.

Pelaksanaan SPM sub urusan Kebakaran Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 262 orang.

a. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dari Bulan Januari s.d Desember 2025:

1. Aparatur Sipil Negara : 182 Orang (21 PNS dan 161 PPPK)
 2. Non Aparatur Sipil Negara : 80 Orang
- b. Rincian Pegawai Satpol PP.
1. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.30
Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	22
3.	D4	-
4.	D3	1
5.	SLTA	238
6.	SLTP	-
JUMLAH		262 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

Tabel 4.31
Tingkat Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	239
3.	III	21
4.	IV	2
5.	NON GOLONGAN	-
JUMLAH		262 Orang

3. Jenis Kediklatan

Tabel 4.32
Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	29
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		29 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 4 Orang.
- c. Eselon IV : 8 Orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana armada pemadam bahaya kebakaran sehingga membuat personil damkar sering sekali kurang optimal ketika sedang berada di lokasi kebakaran, hambatan yang sering terjadi di lapangan yaitu kondisi jalan menuju ke lokasi dan keterlambatan laporan dari masyarakat.
2. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan pelatihan terhadap bencana terutama bagi personil pamadam bahaya kebakaran dan penyelamatan.
3. Aksesibilitas (jalan sempit, gaura, portal).
4. Kurangnya sarana dan prasarana (mobil damkar)
5. Kurangnya sumber air (hydran, kolam, bak penampungan, sungai) yang dapat dipergunakan.
6. Kepadatan lalu lintas dalam kota.
7. Konstruksi bangunan didominasi oleh bahan bahan kayu dan atap rumbia.
8. Kerapatan bangunan dari satu bangunan ke bangunan yang lain.
9. Belum idealnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran, penyelamatan serta bencana lainnya.
10. Belum maksimalnya pos dan armada pemadam.
11. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dibidang DAMKAR dan penyelamatan.

Solusi

1. Untuk memaksimalkan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan kebakaran untuk pengadaaan/penempatan satu kecamatan satu damkar, dijelaskan di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor DAMKAR yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi, serta kesiagaan aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian atau Shift.

2. Melakukan pengembangan peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan secara terus menerus kepada seluruh pegawai agar mampu mengemban tugas dan pekerjaan sebaik mungkin.
3. Telah terbentuknya Forum Komunikasi DPKP Muara Enim.
4. Telah melakukan konsolidasi dengan pihak perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim mengenai penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
5. Telah melakukan MOU dengan Kabupaten/Kota yang ada diperbatasan untuk kerjasama manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
6. Telah melakukan pendapatan peralatan DAMKAR dan Rescue di perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
7. Membuat perencanaan pengembangan POS/UPT di setiap kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim .
8. Mengajukan pembuatan usulan pengadaan Sarpras melalui dana DAK Provinsi, Pusat dan hibah serta proposal ke perusahaan.
9. Pembentukan *Public Safety Center* (PSC 119) Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PGDT) Kabupaten Muara Enim perlu penambahan pos dan armada pemadam.

III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan jenis dan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sesuai kebutuhan dasar dan yang penyediaannya berupa barang dan/atau jasa yang diberikan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah: Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

4.5.2 Target Pencapaian

Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim telah memasukan target SPM pada RPJMD, target pencapaian SPM Program Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dari segi penganggarnya pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.32
Target Capaian Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100	100	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	61364	61364	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	4684	4684	100%

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Muara Enim

4.5.3 Realisasi

Hasil pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025, tidak terlepas dari peran serta/kontribusi positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan kontribusi dari peran serta masyarakat terhadap upaya pemenuhan indikator SPM garapan bidang tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025 ini untuk terinventarisirnya pemutahiran data petugas/ aparatur dan tersedianya personil (petugas/aparatur yang melakukan kegiatan untuk penuhi cakupan indikator yang ditetapkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, meskipun ketersediaan SDM masih belum memadai untuk menunjang keberhasilan optimal SPM yang harus dipenuhi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025 ini. Berikut kami sampaikan Hasil Capaian SPM Jenis Pelayanan Dasar sebagai berikut:

Tabel 4.33
Capaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						97.70 %	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	250	-150	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	100.00 %	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	250	250	0	100.00 %	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	5	5	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	250	250	0	100.00 %	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	3	-1	100.00 %	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	20	20	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					95.61 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	61364	61364	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	15.61 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					78.06 %	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	0	100.00 %	

b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	0	100.00 %	
2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	75.00 %	
a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	5	5	0	100.00 %	
b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	0	0	0	0.00 %	
c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %	
d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100.00 %	
3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	90.00 %	
1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %	
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %	
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	123	123	0	100.00 %	
d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	13	13	0	100.00 %	
e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	42	42	0	100.00 %	
f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %	
2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					80.00 %	
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %	
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %	
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00 %	
d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100.00 %	

e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %	
4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	33.33 %	
1) . Simulasi Dalam Ruangan (Tabel-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00 %	
a. Tersedianya Dokumen Latihan tabel top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/tabel top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/tabel top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %	
2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					66.67 %	
a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00 %	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %	
c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %	
5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	70.00 %	
1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					80.00 %	
a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %	
b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0	0	0.00 %	
c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00 %	
d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %	
e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %	
2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %	

	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga PUSDALOPS (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1790	1790	0	100.00 %	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					97.50 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 %)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	4684	4684	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	17.50 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					87.50 %	
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00 %	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	1	1	0	100.00 %	
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	0	75.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	7	7	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00 %	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100.00 %	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100.00 %	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100.00 %	

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Muara Enim

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 baik secara langsung maupun tidak langsung pada Program Penanggulangan Bencana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.34
Alokasi Anggaran SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muara Enim

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	250 Orang	71.774.175	61.567.100	85,78
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	59 Orang	636.487.075	496.922.800	78,07
		Penyusunan Rencana Kontijensi	3 Dokumen	71.277.702,42	41.125.630	57,70
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kawasan	264.157.638	255.248.366	96,63
		Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	17.841.726	7.160.300	40,13
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	138.728.406,58	107.437.090	77,44
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	73.362.775	51.995.200	70,87
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	70 Laporan	493.829.925	204.738.900	41,46
		Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500 orang	155.440.525	150.783.130	97,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	22.250.063	22.250.063	100,00
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	2 Dokumen	70.141.800	66.821.654	95,27
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.278.500	46.816.299	93,11
		Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1 Dokumen	75.103.545	55.385.319	73,75

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Muara Enim

4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 92 orang.

Data Pegawai

a. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim dari Bulan Januari s.d Desember 2025

1. Aparatur Sipil Negara : 92 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : -.

b. Rincian Pegawai BPBD

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.35
Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	2
2.	S1	26
3.	D3	1
4.	D2	-
5.	SLTA	63
6.	SLTP	-
JUMLAH		92 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

Tabel 4.36
Tingkat Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	64
3.	III	27
4.	IV	1
5.	NON GOLONGAN	-
JUMLAH		92 Orang

3. Jenis Kediklatan

Tabel 4.37
Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
----	--------	--------

1.	DIKLAT STRUKTURAL	4 Orang
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		4 Orang

c. Jumlah Eselon

- A. Eselon II : - Orang.
 B. Eselon III : 1 Orang.
 C. Eselon IV : 4 Orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pada tahun 2025 beberapa kegiatan SPM sudah dapat dilaksanakan namun belum maksimal dalam pendanaannya. Ada beberapa kegiatan yang tidak memiliki anggaran karena keterbatasan jumlah anggaran yang ada pada APBD BPBD.

b. Solusi

Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu untuk kegiatan yang bersifat kajian yang menghasilkan dokumen dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain.

4.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Alam dan Sosial.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dilakukan dalam bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat dengan cara:

- a. Memberikan Dukungan Pelayanan/Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam Keluarga dan Masyarakat;
- b. Memberikan bimbingan kepada Keluarga dan Masyarakat.
- c. Mewujudkan Upaya Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak dan Terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat berdasarkan hak-hak Anak.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah dilakukan dalam bentuk Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

4.6.2 Target Pencapaian

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.38**Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100

Sumber data: Dinas Sosial Kab.Muara Enim

4.6.3 Realisasi

Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu:

- Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti dibagi Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dikali Seratus Persen (100%);
- Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibagi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota dikali Seratus Persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.39**Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			84.00%	

1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					20.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	68	0	68	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	7	7	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	6	6	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100.00%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	20	20	0	100.00%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	20	20	0	100.00%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	13. Layanan rujukan	Orang	6	6	0	100.00%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	32	32	0	100.00%	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	orang	11	11	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	11	11	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	1	1	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	0	100.00%	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1	1	0	100.00%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	100.00%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12. Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00%	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	51	51	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	6	6	0	100.00%	

	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	6	6	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	8	8	0	100.00%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	10	0	100.00%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00%	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	13. Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100.00%	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	20	20	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	3	3	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%	

	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00%	
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
	12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)):	Orang	122	122	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1. Penyediaan permakanan	Orang	122	122	0	100.00%	
	2. Penyediaan sandang	Orang	122	122	0	100.00%	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	122	122	0	100.00%	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	122	122	0	100.00%	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	122	122	0	100.00%	

Sumber data: Dinas Sosial Kab.Muara Enim

4.6.4 Alokasi Anggaran

Realisasi pencapaian SPM oleh Dinas Sosial pada tahun 2025 tidak terlepas dari peran serta positif Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.40
Alokasi Anggaran SPM Dinas Sosial Pada Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			953,355,300	867,247,338	90.97
	1	Penyediaan permakanan	Orang	12,736,200	6,064,400	47.62
	2	Penyediaan sandang	Orang	32,789,825	15,987,700	48.76
	3	Penyediaan alat bantu	Orang	473,689,425	459,865,328	97.08
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	175,054,750	167,572,200	95.73
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	14,075,650	12,182,200	86.55
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	191,515,875	158,150,336	82.58
	13	Rujukan anak-anak terlantar	Orang	53,493,575	47,425,174	88.66
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1,221,764,100	966,031,592	79.1
	1	Penyediaan makanan	Orang	1,221,764,100	966,031,592	79.1
	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0

	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0
3	Dana Operasional dari Kemensos					
TOTAL				2,175,119,400	1,833,278,930	84.28

Sumber data: Dinas Sosial Kab.Muara Enim

4.6.5 Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Muara Enim yang berperan aktif membantu memberikan Pelayanan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 4.41

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2025

NO.	JUMLAH PSKS	JUMLAH POPULASI (ORANG)
1.	Pekerja Sosial Profesional	109
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	274
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	63
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	7
5.	Karang Taruna	1.327
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	22
7.	SDM PKH	73

Sumber data: Dinas Sosial Kab.Muara Enim

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial dari jumlah Pegawai berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2025, jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 52 (dua puluh lima) Orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.42
Kondisi Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan Pada Dinas Sosial
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

NO.	URAIAN	Es.II	Es.III	Es.IV	Pelaksana	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris		1	2	3	6
3.	Bidang Rehabilitasi Sosial		1	2	2	5
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial		1	2	0	3
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		1	0	1	2
6.	Bidang Penanganan Fakir Miskin		1	0	2	3
	JUMLAH PNS					20
	PPPK				32	32
JUMLAH ASN						52

Sumber data: Dinas Sosial Kab.Muara Enim

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 antara lain:

1. Permasalahan

- a. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
- b. Sarana dan prasarana kantor yang kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;

2. Solusi

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
- b. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Bidang Urusan Pendidikan

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan:
 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
 - Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
 - Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary
 - Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan Sanitary
 - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pembangunan Pagar Sekolah
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan :
 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
 - Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pengadaan Meubelair Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
- Pembangunan Pagar Sekolah
- Penyelenggaraan Peningkatan Mutu SSN
- Pembangunan Laboratorium/Ruang Pratikum Sekolah
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP
- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari SMP
- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
- Pengadaan Alat-alat Praktek dan Peraga Siswa
- Pengadaan Meubelair sekolah SMP
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru dan Penjaga Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP
- Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
- Penyelenggaraan Peningkatan Mutu SSN SMP
- Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP

3. Program Pendidikan NonFormal

- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup/*life skill*
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan NonFormal
- Kesetaraan Fungsional (KF) Paket A, B dan C
- Pendidikan Peningkatan Pemahaman Ajaran dan Budaya Islam
- Sosialisasi tata tertib lalu lintas di jalan raya
- Penyelenggaraan Kompetisi bagi Pelajar
- Penyelenggaraan Kompetisi bagi Pelajar SMP

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- Pembinaan Kelompok Kerja Guru
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Sertifikasi

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
- Pembinaan Dewan Pendidikan
- Pembinaan Tenaga Kependidikan Komite Sekolah
- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pembinaan penyelenggaraan program sekolah gratis dan BOS
- Seleksi Tenaga Kependidikan Berprestasi/berdedikasi
- Penyediaan beasiswa bagi siswa SMU/SMK/MA dan Mahasiswa berprestasi

B. Bidang Urusan Kesehatan

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan /Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Peningkatan pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan
- Asuhan Persalinan Normal
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Asuhan Persalinan Normal (APN)
- Peningkatan Imunisasi
- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

4. Pelayanan Kesehatan Balita

- Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita
- Pembinaan posyandu dan UPGK Tingkat Kabupaten
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

- Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat TK, SD, Sekolah menengah dan Sederajat
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

- Peningkatan *Surveillance Epidemiologi* dan Penanganan wabah.
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- Peningkatan *Surveillance Epidemiologi* dan Penanganan wabah.
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeteis Militus

- Peningkatan *Surveillance Epidemiologi* dan Penanganan wabah.
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

- Temu Kerja Kesehatan Jiwa
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat/Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV

- Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Peningkatan komunitas, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
5. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Untuk dapat merealisasikan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan.

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim. Adapun Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat (mencakup Bidang Urusan Pekerjaan Umum) Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Identifikasi Lahan - lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Bangunan.
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau *Detail Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pada tahun 2025 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan keterkaitannya dengan penyerahan urusan wajib dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebanyak 1 (satu) Program, yaitu:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan subkegiatan:

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- b. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia
- f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

• **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Program Penanggulangan Bencana di tahun 2025 yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi sebesar

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

- **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
4. Alokasi Program Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - (1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
 - (3) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

F. Bidang Urusan Sosial

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan kegiatan :
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Keluarga Miskin
 - Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Kegiatan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
 - Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni)
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :
 - Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
 - Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penganggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
 - Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dari Kejadian Luar Biasa
 - Kegiatan Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial

3. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Terhadap Orang Terlantar/Tidak Mampu
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 - Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 - Kegiatan Peningkatan SDM Penyandang Cacat
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
 - Kegiatan Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial
 - Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Kegiatan Pemeliharaan Makam Pahlawan di Kabupaten Muara Enim
 - Kegiatan Monev Pelaporan Bantuan Sosial Pangan untuk Keluarga Miskin
 - Kegiatan Pemilihan Orsos, KT dan PSM Berprestasi
 - Kegiatan Pelatihan Manajemen KT, Orsos dan PSM
 - Kegiatan Monev Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tahun 2025, baik capaian kinerja makro maupun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan serta Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyusunan laporan ini dilakukan secara terkoordinasi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu. Keberhasilan yang telah dicapai dengan kerja keras selama ini belum sebanding dengan harapan semua pihak, namun demikian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Muara Enim dan *stakeholders* yang telah menjalin kerjasama yang baik sehingga apa yang diprogramkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar kedepan pelayanan prima dapat terwujud. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menunjukkan jalan-Nya dan meridhoi usaha kita bersama untuk mewujudkan Muara Enim yang lebih baik.



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

**“MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK
KEPADA MASYARAKAT”**